

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum  
Acara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Tahun 2024  
bagi Partai Perindo  
(Persatuan Indonesia)

Bogor, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia) mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A.1. Umum</b> .....	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan</b> .....	<b>3</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat</b> .....	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.4. Akomodasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6. Uraian Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i></b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.3. Acara Pembukaan</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.4. Penyampaian Materi</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.5. Acara Penutupan</b> .....	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN</b> .....	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i></b> .....	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner</b> .....	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN</b> .....	<b>20</b>
<b>E. PENUTUP</b> .....	<b>20</b>
<b>F. LAMPIRAN</b> .....	<b>21</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia) sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;





- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)”.

### B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan

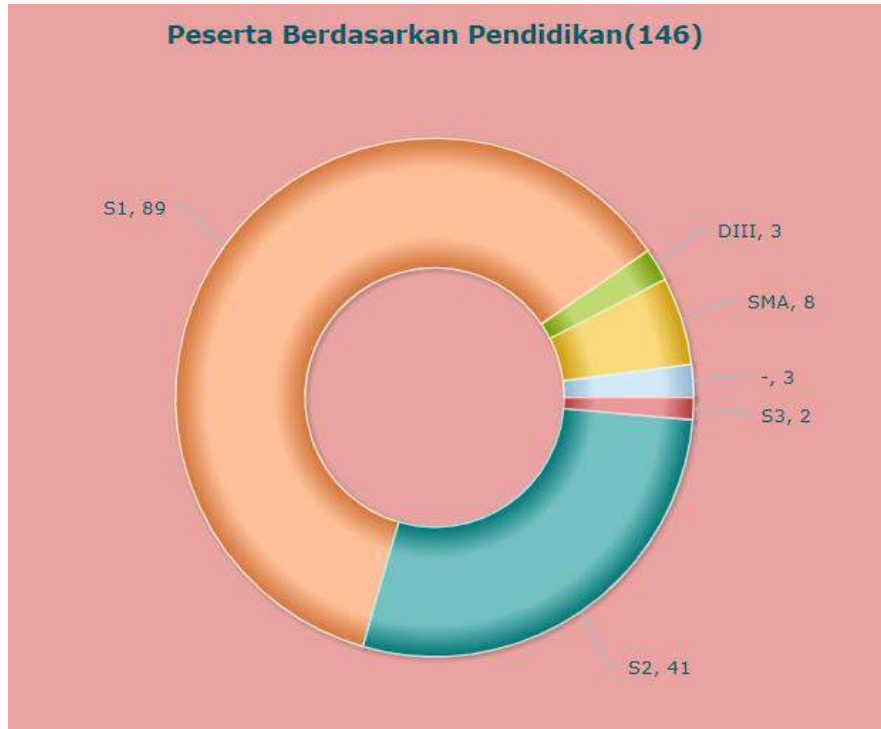
Peserta kegiatan sebanyak 146 orang pengurus dan/atau anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia):

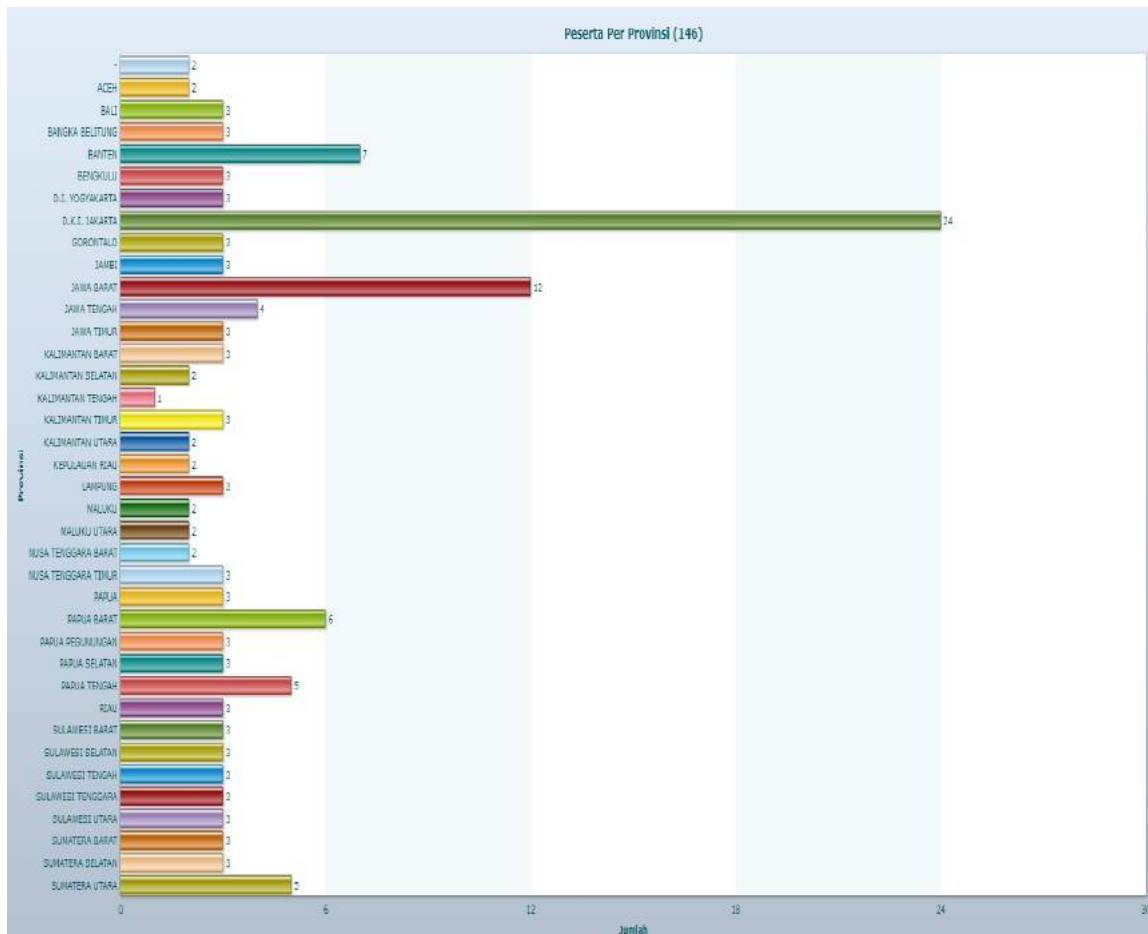
**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) *Id card*;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
  - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
  - 5) *Block Note* dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### B.6. Uraian Kegiatan

##### B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

##### B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 31 Juli 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



### B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 18.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Bapak Dr. Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul Majdi, Lc, MA. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
2.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
3.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Rudi Kurniawan
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	1. Ria Indriyani, S.H., M.H. 2. Intan Permata Putri, S.H. 3. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 4. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.
7.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 3. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 4. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





# HASIL EVALUASI KEGIATAN



## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,81 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 115 menunjukkan nilai sebesar 1,65821. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,39**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



### C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,55 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,94 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,65 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,64 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,54	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,69	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,61	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,61	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,61	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Bambang Sukmadi	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,64	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,66	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,65</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,59	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,64	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,65	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,62</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,62</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,58	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,45	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		<b>3,51</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,49	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,61	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		<b>3,55</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,67	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,66	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		<b>3,66</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,66	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,62	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		<b>3,64</b>	<b>Baik</b>
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,64	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,56	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		<b>3,60</b>	<b>Baik</b>





No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Layanan Keuangan</b>			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,94	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,65	<b>Baik</b>
	<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>	3,64	<b>Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,39 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,78. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,64 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,64+2,78)/2 = 3,21$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,21**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Perlu ada *outbond* untuk peserta;
  - b) Perlu waktu yang lebih luang untuk pembelajaran yang efektif;
  - c) Semoga dapat diundang kembali dalam bimtek PUU;
  - d) Semoga ke depan yang dapat beracara di MK adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat Bimtek MK;
  - e) Panitia harus lebih tegas terhadap waktu;
  - f) Narasumber atau moderator di setiap sesi untuk rutin mengingatkan peserta mengisi daftar hadir sesi;
  - g) Durasi praktik dapat diperpanjang.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) *Security* agar lebih ramah lagi dan murah senyum;
  - b) Kualitas wifi harus ditingkatkan;
  - c) Perlu ada TV di setiap kamar;
  - d) Air panas di kamar mandi ketika hari terakhir tidak berfungsi;
  - e) Colokan di dalam kamar dapat ditambah;
  - f) Sendok di dalam kamar mohon dapat dilengkapi;
  - g) Peserta dapat diberikan sepatu dan celana olahraga;
  - h) Menu makanan menurun dibanding acara yang sama tahun 2019;
  - i) Menu makanan jangan yang manis;
  - j) Dapat disediakan pengering rambut di dalam kamar;
  - k) Hidangan makanan hindari menu yang sama;
  - l) Kursi peserta harus diganti karena tidak nyaman.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 131 orang dari 146 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis



operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

#### **E. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**  
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 28 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





Peserta melakukan senam pagi.

**LAPORAN KEUANGAN**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun**  
**2024 Bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Rusli Hamid Arifin dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 457,548,000
2	R Wijaya Saputra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 16,394,766
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 44,138,040
6	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 124,750,000
7	Honor Narsum		Rp 8,500,000
<b>TOTAL</b>			Rp 654,630,806

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERINDO**

**Hari, Tanggal** : Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023  
**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor  
**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Perindo

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.30 WIB	ISHOMA		
	18.30 – 19.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Mars Partai Perindo</li> <li>5. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan</li> <li>6. Sambutan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo</li> <li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>9. Pembacaan Doa</li> </ol>	<b>YM Ketua MK</b> <b>Ketua Harian Nasional DPP</b> <b>Partai Perindo</b> <b>Kabid Program dan Penyelenggaraan</b>	Aula Grha Konstitusi 3

	19.30 – 21.30 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	21.30 WIB	Istirahat		
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 1 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KETIGA</b>				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 2 Agustus 2023	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
Kamis, 3 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	<b>Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)**

---

**Bogor, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Perindo yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	10
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum .....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat .....	14
8. Akomodasi .....	14
9. Konsumsi .....	14
10. Pembiayaan .....	14
11. Biaya Transportasi .....	15
12. Lain-lain .....	16
13. Kontak .....	16
<b>III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>17</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>27</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>29</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34



## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
  - Kepala Biro Kepegawaian MA
  - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir :
  - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
  - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
  - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
  - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
  - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
  - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).  
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.



## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	09.30 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check In</i></b>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<b>Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i></b>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Teks Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Mars Partai Perindo</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal MK</li> <li>Sambutan Ketua Umum Partai Perindo</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
<b>KEDUA</b>		
<b>Selasa, 1 Agustus 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
<b>KETIGA</b>		
<b>Rabu, 2 Agustus 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
<b>KEEMPAT</b>		
<b>Kamis, 3 Agustus 2023</b>	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i></b>

	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> </ol>
--	-------------------	--

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Perindo, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> <li>l. Putusan</li> <li>a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ol>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak</li> </ol>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya ( <i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i> )	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

## 9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

## 10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

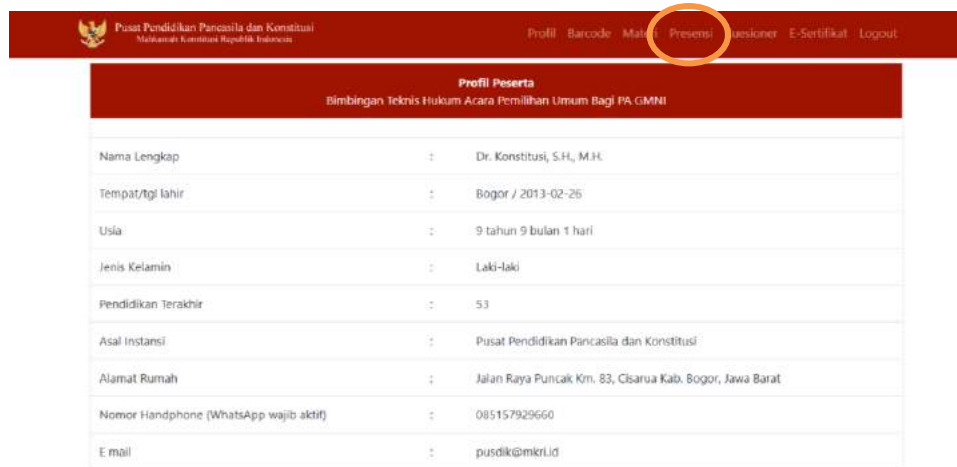




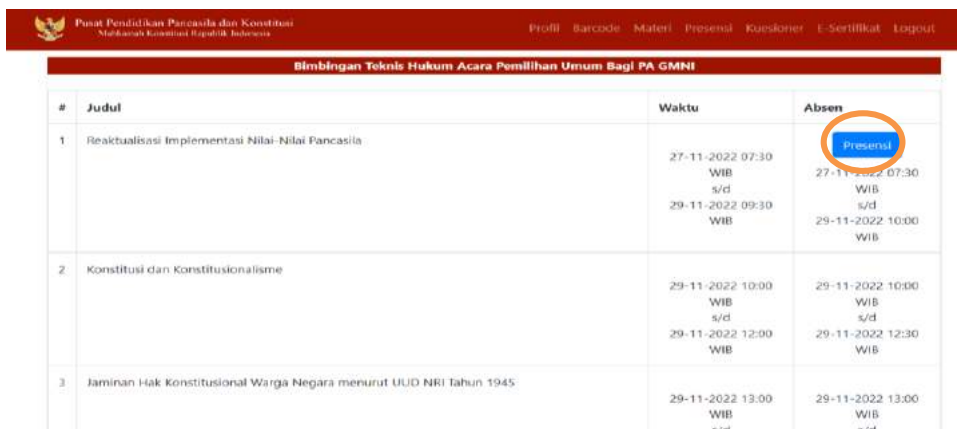
2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,  Komisi Pemilihan Umum,  Mahkamah Konstitusi, and  Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="227 414 834 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website),  Pengajuan permohonan secara daring (online),  Persidangan jarak jauh (video conference),  Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and  Semua benar. At the bottom, there is a blue 'Simpan' button circled in black." data-bbox="227 676 839 895"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1

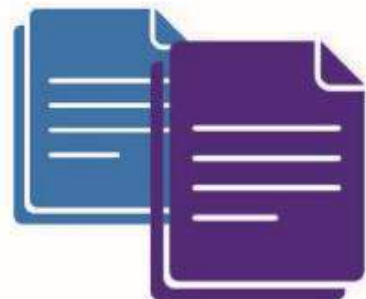
### Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,  
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.





## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Teguh Wahyudi, S.Sos.**

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E.**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.



### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat\_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3\_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



# PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2024 bagi Partai Perindo  
(Persatuan Indonesia)

Senin, 31 Juli 2023



SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
**PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun

**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id

# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

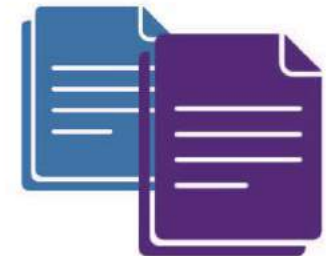
### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.





## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000  
- Whatsapp: 085157929660  
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)  
- Melalui Kotak Saran  
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



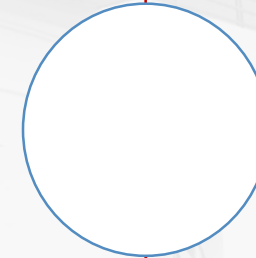
**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusdik  
Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti**  
Kabid Program  
dan  
Penyelenggaraan



**Nanda Adityansyah**  
Jabatan Fungsional  
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah  
Salim**  
Kasubid  
Program dan  
Evaluasi



**Santhy  
Kustrihardiani**  
Kasubid  
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma  
W**  
Kasubag Tata  
Usaha



**Bambang  
Sukmadi**  
Kasubag  
Sarana dan  
Prasarana



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Bangkit Panji Anarogo**



**Edwin Aditya Irawan**



**Fazlur Rahman El Islamy**



**Suhardi**



**Muhlis Nova**



**Angga Putri Gardina**



**Hadian Taofik Rohman**



**Chafid Sugianto**



**Yahya Amarullah Taufik**



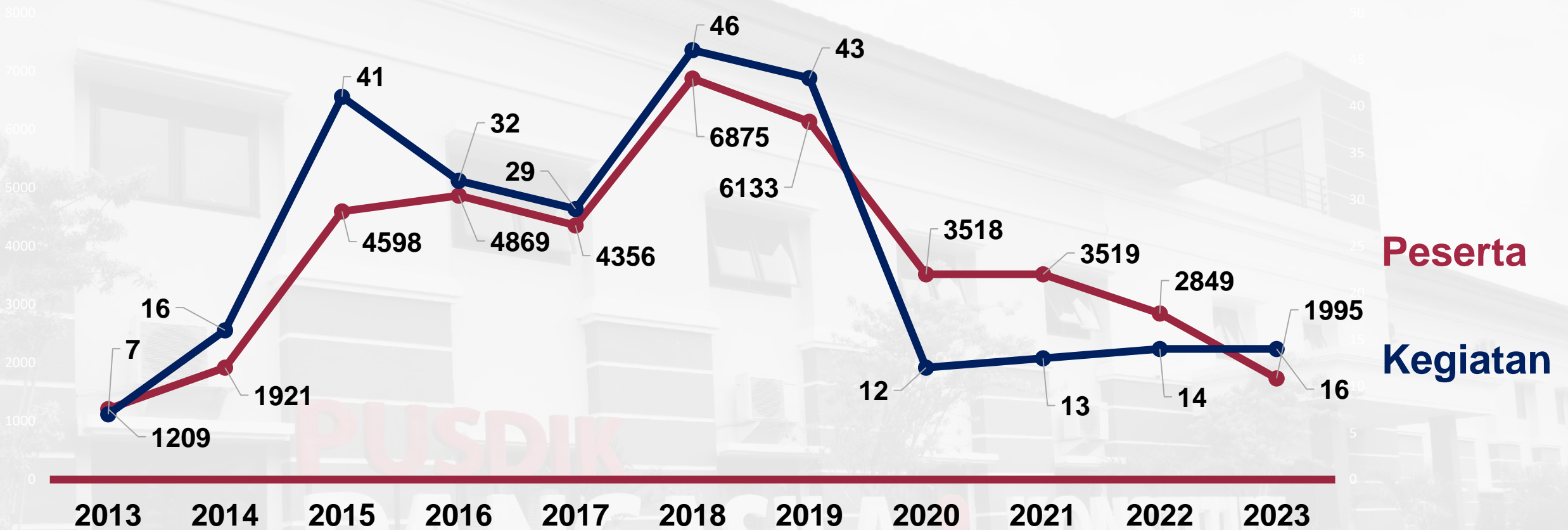
**Edwin Rivano**

# KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.274** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.850** orang

# PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis  
31 Juli s.d. 3 Agustus 2023
- **Tempat** :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,  
Jawa Barat



# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.30 – 19.30 WIB	<b>Pembukaan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Perindo</li><li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Perindo</li><li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Wakil Ketua MK</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>
	19.30 – 21.30 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. &amp; Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Selasa, 1 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi <b>Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 2 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.</b>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 3 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



# PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Perindo, terdiri dari:
  - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
  - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

# KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



# BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Perindo



## AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut);
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

## KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.





# PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



# MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ **Boarding pass**

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

## ❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

***pusdik.mkri.id***

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*





**FASILITAS  
DI PUSAT  
PENDIDIKAN  
PANCASILA  
DAN  
KONSTITUSI**

## Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

## Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir





## Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

## Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



## Grha Konstitusi 4



## Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

## Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



## Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

## Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

## Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



## Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

## Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas  
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift  
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi  
di Grha Konstitusi 4





## Fasilitas Lainnya



Poliklinik  
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital  
di Grha Konstitusi 2



**T  
E  
R  
I  
M  
A**

**K  
A  
S  
I  
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta**  
**Langsung dan Transparan)**



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital

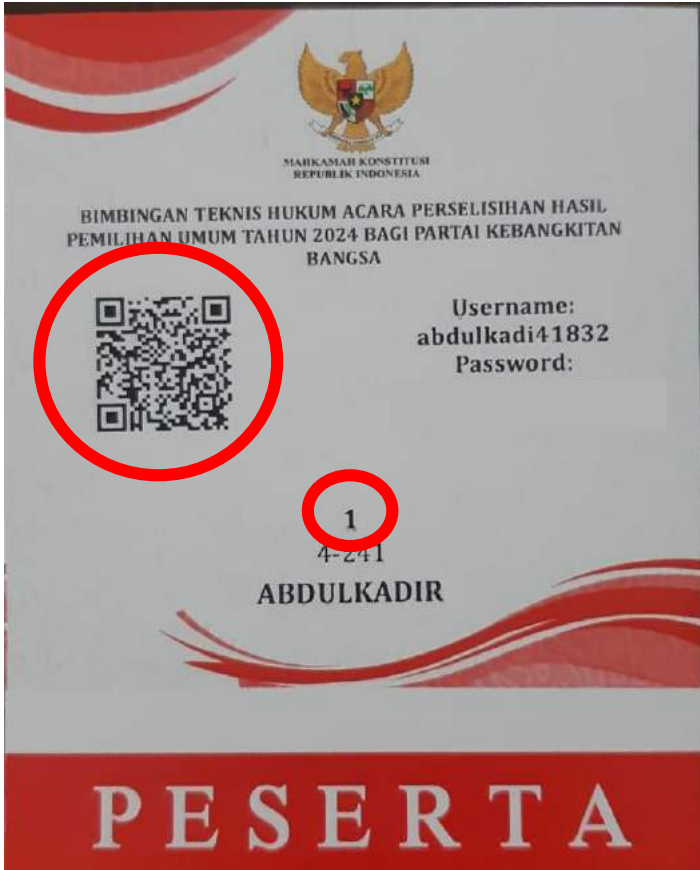


## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



## Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam  
Akun Sistem Informasi  
Peserta (SIMULTAN),  
Peserta Scan QR Code  
yang Ada pada Tanda  
Peserta (ID Card  
Peserta)**

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

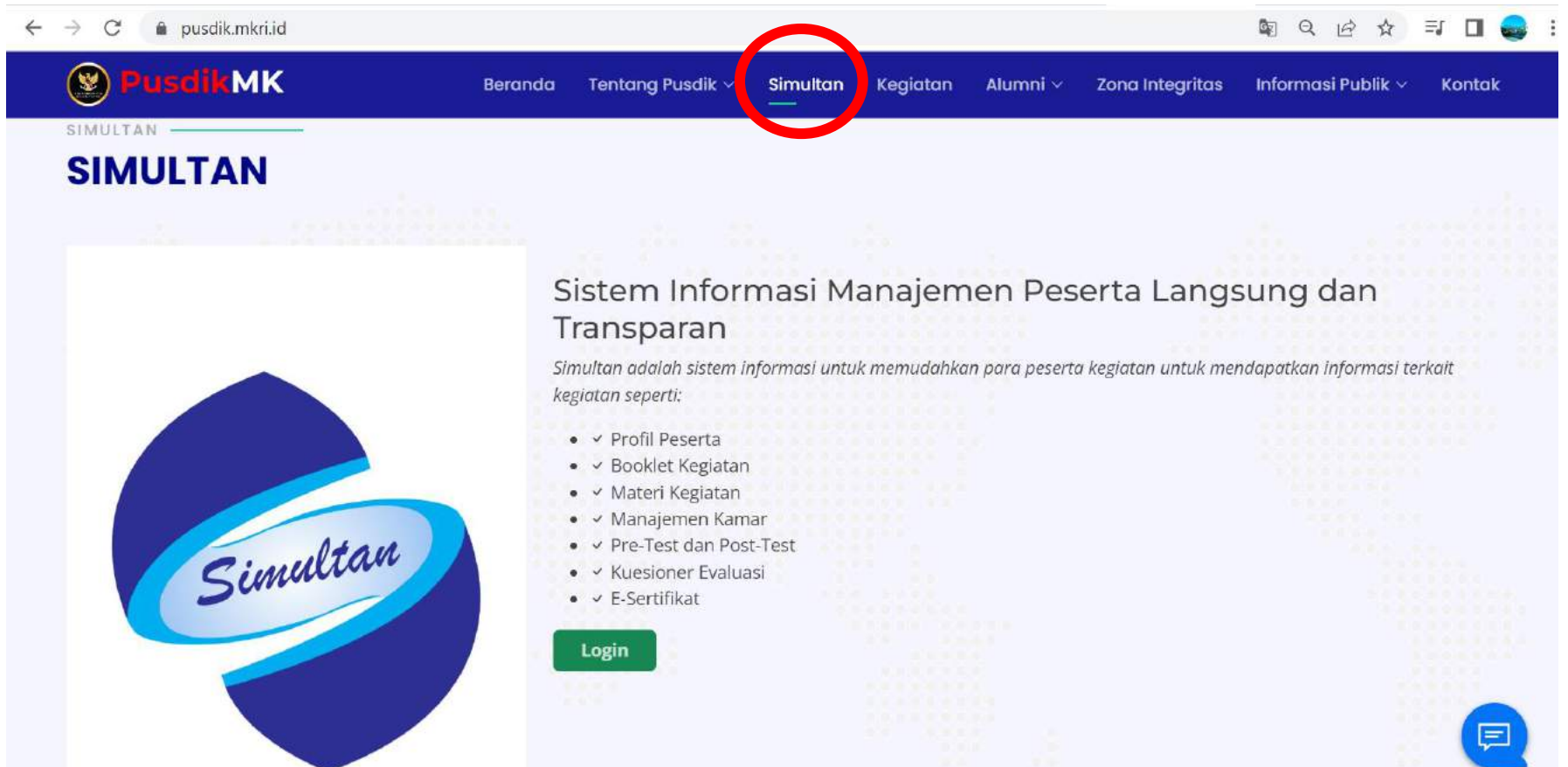
# Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website pusdik.mkri.id. The navigation bar includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the page title is 'SIMULTAN' and the main heading is 'SIMULTAN'. The content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent participant management information system, listing various features like participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test/post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

## SIMULTAN

### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

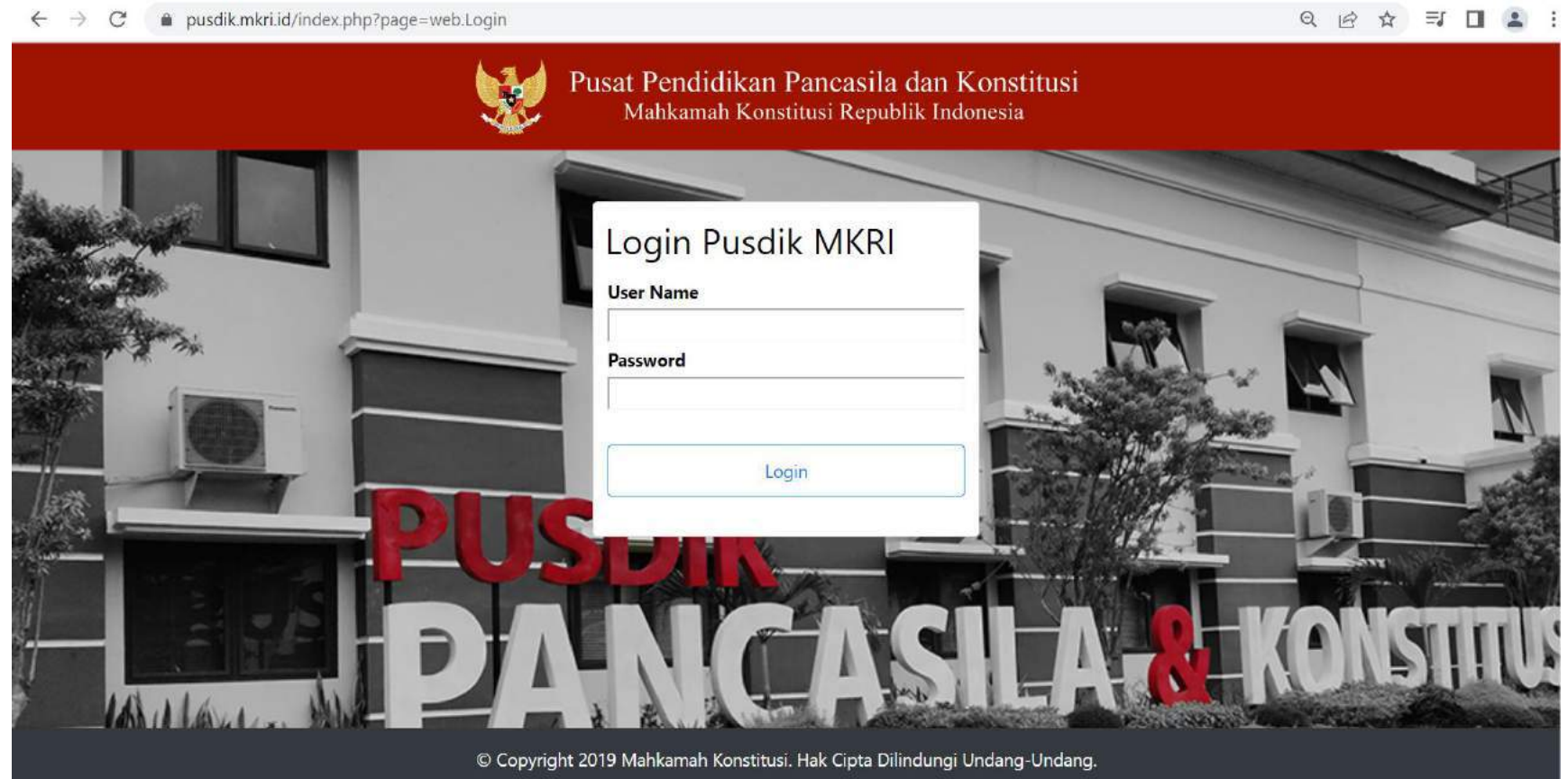
*Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:*

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat


Login



# Masukan Username dan Password



← → ↻ [pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login](https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login) 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

## Profil Peserta

# Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

## Klik “Edit Profile”

**Catatan:**

***Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat***

**Edit Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK \* :

Gelar Depan \* :

Nama Lengkap \* : Safira Putri Purnama  
Usulkan Perbaikan Nama :  
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang \* : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir \* : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin \* : Perempuan

Pendidikan \* : S2

Instansi \* : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan \* : Programmer Utama

Alamat \* :

Desa/Kelurahan \* : Desa Satriamekar

Provinsi \* : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota \* : KOTA JAKARTA TIMUR

HP \* :

Email \* :

[Update Data](#)

# Meng-edit Profil Peserta


## Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

## Meng-edit Profil Peserta

**Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama <b>(Ishak Purnama)</b> menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

### Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

\*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

\*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





# Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

# Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\* Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan





### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

**Mengisi Evaluasi kegiatan**



## Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Materi yang paling menarik**

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

### Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

**Mengunduh e-Sertifikat**



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



**Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)**

# TERIMA KASIH

## PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

### A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

### B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

### E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

### F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematernya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.



**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	Luar biasa Aman dan nyaman
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Nara sumber sangat menguasai materi. Semoga sehat selalu. Thks Semoga bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dgn materi yg berbeda.
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Secara keseluruhan pengelolaan materi ajar sudah baik ... bila diperkenankan memberikan saran, diperlukan pengembangan kualitas penggunaan media yang beragam dalam menyampaikan materi ajar, dengan maksud untuk menambah ketertarikan peserta dalam mencerna materi ... sehingga dapat lebih memudahkan pemahaman materi ...
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian materi sangat jelas dan mudah untuk di pahami Penyampaian materi ada beberapa hal baru yang dapat menambah wawasan bagi saya
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	kemalaman...
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	WAKTU SESI TANYA JAWAB HARAP DI PERPANJANG DAN TIDAK DI BATASI WAKTU waktu tanya jawab diperbanyak
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian sangat jelas dan lugas sehingga dapat mudah dipahami. Mungkin lebih bisa diatur untuk sesi pertanyaan dibuka lebih banyak waktu karena mengingat kondisi di lapanganlah yang banyak bermasalah sehingga banyak sekali permasalahan yang ingin ditanyakan.
24	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	9	54	3,38	Pertahankan situasi yang ada saat ini yang baik Di Pertahankan
25	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	7	51	3,19	Penyampaian yang mungkin lebih jelas lagi dan ditegaskan lebih dipertajam konkrit mengenai syarat pra syarat pemohon
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya di perpanjang agar penjelasannya lebih detail Lebih fokus pada hal-hal teknis berserta dasar hukumnya (pasal)
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	0	52	3,25	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik
29	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah baik
32	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	7	55	3,44	
33	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	9	57	3,56	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada, sangat baik.
38	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	8	45	2,81	Memberikan waktu yg cukup untuk tanya jawab kepada peserta Menghindari materi yang berulang dan tumpang tindih
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	8	54	3,38	Waktu materi sangat singkat Sebaiknya di laksanakan di siang hari dengan waktu 4 jam
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
44	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	8	55	3,44	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bermanfaat
47	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
48	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	54	3,38	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
49	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Materi yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi hendaknya waktunya lebih lama dan tidak terlalu malam
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16	1,00	Sesi tanya jawab waktunya ditambah
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
53	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	45	2,81	Dalam rangka pendidikan ataupun pelatihan yang terpenting adalah atensi peserta terhadap materi yang disampaikan. Jika cara penyampaian dan penyajiannya kurang semangat, peserta pun menjadi kurang bersemangat. Permainan intonasi suara dan interaksi dengan peserta dapat meningkatkan atensi peserta dalam mendengarkan materi.
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Sudah baik Sudah baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tetap lugas dan tegas Tepat sasaran
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih baik lagi kedepannya
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih proaktif discuss
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	61	3,81	Bahan /materi sebaiknya di berikan juga ke dalam FlasDisk. Apalah artinya Flashdisk yg dibagikan 🙏 Harapan kami kiranya materi yg di berikan bisa di masukkan ke dlm flashdisk agar kembali ke daerah masing2 bisa lebih diperdalam lagi. Dan no wa utk kami bertanya /sharing bisa di berikan. 🙏
63	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	saya sangat salut atas semua fasilitas dan narasumber Pusdik MK pemateri sangat menguasai materi yang disampaikan
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Sangat baik Sangat baik
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Efektifkan waktu
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	60	3,75	
76	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	9	60	3,75	Saran kami kedepan harus ada praktek simulasi nyata pemilunya
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan pelayanaannya.
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	sudah ok
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik semakin baik lagi ke depan
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik semakin baik lagi ke depan
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sehat selalu
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Saya kurang puas dalam narasumber menjawab pertanyaan namun saya merasa puas dengan praktik Keterangan Pihak Terkait Perseorangan
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,53	3,52	3,53	3,47	3,51	3,51	3,49	3,58	3,58	3,57	3,53	3,52	3,53	3,57	3,52				3,53

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Nara sumber sangat menguasai materi. Mantap. Trima kasih. Semoga dpt dilaksanakan secara berkesinambungan dgn materi lain yg berbeda.
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya di perpanjang agar penjelasannya lebih komplit
4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	7	51	3,19	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
7	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
9	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good job
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada, sangat baik.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good job
15	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	good
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik tingkatkan lagi
23	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	9	55	3,44	lebih dipertajam contoh yang lebih detail dari penguasaan materi
28	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	7	22	1,38	Sesi diskusi waktunya kurang lama
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan jelas dan lugas sehingga dapat diterima dengan baik. Penjelasan jelas dan lugas sehingga dapat diterima dengan baik.
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak bertele-tele Tepat sasaran
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Dalam penyampaian materi lebih banyak berdiskusi
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	7	57	3,56	Semoga lebih baik lagi kedepannya
43	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
44	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantabs
55	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	7	56	3,50	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harapan kami waktu pemberian materi utk di tambah Flashdisk yg di bagikan sebaiknya SDH berisi materi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan pertahankan pelayannya.
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sehat selalu
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sdh sangat baik dan smg bs di pertahankan baik sekali dan smg smkm sukses ke depan
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sdh sangat baik dan smg bs di pertahankan baik sekali dan smg smkm sukses ke depan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sdh sangat baik dan smg bs di pertahankan baik sekali dan smg smkm sukses ke depan
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
	3,45	3,44	3,47	3,45	3,44	3,45	3,47	3,53	3,55	3,55	3,55	3,48	3,48	3,47	3,45	3,50			3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penyajian materinya sangat mudah diserap, hanya saja waktu dalam penyampaian materi sangat terbatas kedepannya waktu sesi tanya jawab dibuat lebih lama;
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
9	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	9	62	3,88	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keep up the good working. Mantap. Sehat selalu pak.
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
20	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	8	55	3,44	
21	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
22	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
23	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pennyajian materi agar waktunya diberikan tambahan
27	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	9	56	3,50	tetap dipertahannya cara merespon pertanyaan dalam membawakan materi
28	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	Sesi diskusi kurang lama
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan jelas dang lugas sehingga dapat diterima dengan baik. Penjelasan jelas dang lugas sehingga dapat diterima dengan baik.
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
32	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	8	55	3,44	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Enak dlm menyampaikan materi Happy ending
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	60	3,75	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ruang untuk merokok dibuat nyaman
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	9	51	3,19	
42	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
43	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap.... luar biasa saya sangat bersyukur bisa ikut Bimtek ini
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	8	59	3,69	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sip
51	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	8	56	3,50	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya waktu pemberian materi utk ditambahkan Flashdisk yang di bagikan sebaiknya SDH berisikan semua materi.
53	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	9	55	3,44	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan pertahankan pelayanannya.
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sudah baik sekali
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sudah baik sekali
60	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,65	3,59	3,63	3,57	3,51	3,57	3,57	3,62	3,54	3,57	3,57	3,57	3,52	3,56	3,62	3,68			3,58	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Rudi Kumiawan*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
6	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
7	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	8	52	3,25	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyajian Materi untuk waktu ditambah
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan jelas dang lugas sehingga dapat diterima dengan baik. Penjelasan jelas dang lugas sehingga dapat diterima dengan baik.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
14	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	8	55	3,44	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Waktu kurang lama
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keep up the good working. Mantap. Tetap semangat
17	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
24	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
25	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	7	54	3,38	diperbaiki penguasaan materi
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	6	44	2,75	Materinya harus lebih berkualitas lagi. Materi hasus lebih mendalam, bukan hanya sebatas pemberitahuan kulitnya web dan program.
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Inovatif dan kreatif Ceria
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3,81	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Di fasilitasi kantin untuk ngopi
36	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	9	57	3,56	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK KE DEPAN MENJADI GARDA TERDEPAN MENGAWAL KONSTITUSI
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	í
48	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Good
52	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	9	56	3,50	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya waktu utk pemberian materi di tambahkan Flashdisk sebaiknya SUDAH berisikan materi2 BIMTEK
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan pertahankan pelayanannya.
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	di pertahankan qualis yg sdh sangat baik tersebut ke depan sangat baik selama ini bimtek mk ini,,smg ke depan bs terjaga selamanya
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	di pertahankan qualis yg sdh sangat baik tersebut ke depan sangat baik selama ini bimtek mk ini,,smg ke depan bs terjaga selamanya
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	



NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,50	3,52	3,55	3,48	3,45	3,48	3,50	3,48	3,47	3,48	3,50	3,48	3,48	3,48	3,52	3,52			3,49	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan sangat jelas dan lugas sehingga mudah dimengerti. Penjelasan sangat jelas dan lugas sehingga mudah dimengerti.
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa. Sangat baik dan jelas. Mantap. Keep up the good working.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
15	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	9	53	3,31	
16	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
17	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lugas dan cerdas Ga ngantuk
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good
22	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	54	3,38	
23	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	9	55	3,44	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Dalam Penyampaian materi hendaknya lebih banyak dialog
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Didalam ruang kelas selalu ngantuk, dicari solusi untuk peserta biar tidak ngantuk
29	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	8	57	3,56	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3,88	
32	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	59	3,69	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Mhn materi di tambahkan
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Siiiipiah
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya waktu pemberian materi ditambahkan Flashdisk yang dibagikan sebaiknya sudah berisikan materi2 BIMTEK
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan pertahankan pelayanannya.
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan smg smkn baik ke depan tetap di pertahankan yg sdh sangat bimbingan mk ini
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan smg smkn baik ke depan tetap di pertahankan yg sdh sangat bimbingan mk ini
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan smg smkn baik ke depan tetap di pertahankan yg sdh sangat bimbingan mk ini
55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
56	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,67	3,65	3,48	3,55	3,57	3,57	3,57	3,57	3,60	3,58	3,57	3,60	3,58	3,48	3,55	3,57			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia  
Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Ria Indriyani, S.H., M.H., Intan Permata Putri, S.H., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa. Sangat jelas dan paham. Mantap. Keep up the good working	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good	
8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penuh kelembutan Penuh perhatian	
10	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
11	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	7	53	3,31	
12	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	8	57	3,56	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	6	41	2,56	Penyajian materi hendaknya waktu ditambah	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tiap kamar, diberi teko pemanas air	
18	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	57	3,56		
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69		
23	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	8	38	2,38		
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	9	51	3,19		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan sangat lugas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh kami. Penjelasan sangat lugas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh kami.	
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Baik	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik pelayanannya dan mantabbb	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik	
46	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	8	54	3,38	Mhn waktu diskusi ditambahkan	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Luarr biasa	
48	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	59	3,69		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan pertahankan pelayanannya.	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya pemberian materi di tambahkan waktunya Flashdisk yang dibagikan sebaiknya sdh bersikan materi2 BIMTEK	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat puas kami mendapatkan pelatihan mk tetap di pertahankan pelayanan yg sdh baik ini	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat puas kami mendapatkan pelatihan mk tetap di pertahankan pelayanan yg sdh baik ini	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
59	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	61	3,81		
60	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,59	3,53	3,61	3,59	3,53	3,58	3,52	3,56	3,55	3,56	3,58	3,56	3,61	3,55	3,58	3,55			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia  
Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., & Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kursi duduk peserta harus di ganti, tidak nyaman dan mlorot ke depan terus
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	7	57	3,56	
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
15	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Komunikatif Mantap
17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	59	3,69	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
21	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemaparan yg baik dan sangt diapresiasi. Mantap. salam sehat selalu.
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Good Mantap
24	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
25	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan sangat lugas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh kami. Penjelasan sangat lugas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh kami.
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	alhamdulillah saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat penting pada kesempatan Bimtek ini Pusdik mantap luar biasa
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	good job
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
47	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	52	3,25	Mhn waktu sesi tanya jawab fitambahkan
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	9	62	3,88	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Ouke
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan pertahankan pelayanannya.
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu pemberian materi sebaiknya ditambahkan Flashdisk yang di bagikan sebaiknya sdh berisikan materi2 BIMTEK
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan smg di pertahankan trimakasih sdh sngt baik,,smg smkn baik lagi ke depan
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan smg di pertahankan trimakasih sdh sngt baik,,smg smkn baik lagi ke depan
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,73	3,68	3,70	3,70	3,67	3,65	3,63	3,70	3,63	3,67	3,67	3,73	3,65	3,63	3,68	3,71			3,68	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d 3 Agustus 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	83	3,95	Saran agar securitynya lebih rama lagi, murah senyum.
2	3	4	3	10	4	4	3	11	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Hanya akses wifi yg dihari terakhir TDK ada /sulit utk diakses Sarana air panas di hari terakhir TDK berfungsi. Kedepan hal2 tsb harapan kami bisa lebih di perbaiki
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
4	3	4	3	10	4	4	3	11	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Hanya akses wifi yg dihari terakhir TDK ada /sulit utk diakses Sarana air panas di hari terakhir TDK berfungsi. Kedepan hal2 tsb harapan kami bisa lebih di perbaiki
5	3	3	3	9	3	4	4	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
9	1	1	1	3	1	1	1	3	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	1	1	2	1	1	1	3	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	1,05	Perlu waktu yg lebih luang untuk pembelajaran yg efektif
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Perlu waktu yg lebih luang untuk pembelajaran yg efektif
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	melalui kolom ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK karena telah memberikan ilmu pengetahuan yang baru buat saya langsung dari orang-orang MK. Insha Allah ilmu pengetahuan yang didapat disini akan sangat berguna kelak di Pemilu 2024 ini
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
13	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Di kamar mohom di tambah tempat colokan Gelas,kopi,teh,gula kurangnya sendok tidak ada
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	3	4	3	10	4	3	3	10	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Fasilitas tempat cas sangat kurang dalam kamar yg mana kami 2 orang 1 kamar sedangkan tempat cas cuma 1 Pelayanan hari terakhir mandi air panas tdk ada Jaringan WiFi kadang hilang
17	3	4	3	10	4	3	3	10	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Fasilitas tempat cas sangat kurang dalam kamar yg mana kami 2 orang 1 kamar sedangkan tempat cas cuma 1 Pelayanan hari terakhir mandi air panas tdk ada Jaringan WiFi kadang hilang
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Rudi Kumiawan	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	Kapasitas Internet mesti ditambah Sepertinya perlu ada TV di setiap kamar...supaya bisa nonton berita. Jika ada bimtek...lebih menarik jika ada sesi outbound untuk peserta.
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tetap pertahankan,dan semakin ditingkatkan baik kurikulum materi maupun fasilitas diklat
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
23	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
25	3	3	4	10	3	4	4	11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Program seperti ini sangat baik dan perlu dipertahankan. Agar Pimpinan MK menerbitkan peraturan bahwa yang dapat beracara di MK adalah orang perorangan yang telah mendapatkan sertifikat Bimtek MK
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat menarik dan membantu saya di dalam mempelajari hukum acara dalam membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengenai sengketa pemilihan umum. Penjelasan demi penjelasan sangat lugas dan tegas sehingga mudah dipahami oleh kami. Semoga bisa kembali diundang kembali di dalam hal bimtek pada perkara yang lain seperti judicial review maupun kewenangan. Terimakasih
27	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	70	3,33	Semua sudah baik adanya. Saya menyarankan karena begitu pentingnya Bimtek MK, maka sebaiknya diakomodir dalam PMK supaya pemohon nanti baik perseorangan/kuasa hukum maupun pihak terkait bisa mewajibkan melampirkan SERTIFIKAT BIMTEK PHPU MK sebagai syarat formal untuk bisa beracara dalam Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU.
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Agar lebih tegas terhadap waktu.
29	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	71	3,38	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terimakasih Terimakasih terimakasih
31	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pertahankan yang sudah baik
32	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	79	3,76	
33	3	4	4	11	4	3	4	11	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	78	3,71	Pertahankan dalam pelayanan, dan kami mengucapkan terimakasih kepada MK atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Mohon selanjutnya diberikan masukan kepada Majelis Hakim di MK agar kalau bisa syarat berperacara di PHPU Mahkamah Agung diutamakan yang sudah ikut Bimtek PHPU di Pusdik MK Cisarua Bogor atau memiliki sertifikat Bimtek MK Bogor.
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tdk ada
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tdk ada
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Menyiapkan fasilitas transportasi untuk kegiatan lapangan/ filtrip



NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saya 1 kali terlewat absensi sesi materi yakni setelah agenda pembukaan... dikarenakan terkesan dan terbawa suasana pembukaan hingga terlupakan untuk acara materi tanpa ada peringatan dan pemberitahuan untuk sekedar mengingatkan... untuk itu perlunya kepedulian lebih lanjut bagi panitia maupun moderator agar supaya setiap akhir sesi untuk sedapat mungkin memberikan peringatan kepada peserta agar mengecek kembali absensinya guna kejadian serupa tidak terulang. Mohon maaf dan terima kasih
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pertahankan kinerja yang sudah baik saat ini.
40	3	4	3	10	2	3	4	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	semoga ke depan Mahkamah Konstitusi bisa memberikan perwakilan HAKIM Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjadi Narasumber agar semua pertanyaan yang di ajukan kepada Narasumber dapat terjawab semua dan agar tidak ada lgi jawaban bukan saya yang berwenang.
41	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
42	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
43	4	4	3	11	4	3	4	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	78	3,71	
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
45	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Luar biasa. Sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami khususnya ttg PHPU. Thks Mantap. Keep up the good working. Luar biasa. Sampai bertemu kembali dilain waktu dan kesempatan
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusional dan segenap Personil yang terlibat dalam kegiatan ini ... semoga menjadi amalan yang diperhitungkan oleh Allaah swt. Mohon maaf juga bila dalam berlangsungnya kegiatan, apabila terdapat hal2 yang kurang berkenan dari kami ... baik lisan maupun tulisan ... Salam dari kami, DPW Partai PERINDO Provinsi Kepulauan Riau ...
47	3	3	4	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Semua baik dan bagus
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pelayanan wifi dihari terakhir mati...kedepan jangan sampai terulang kembali. Hari terakhir sarana air panas juga tidak ada Perlu nya penertitipan aturan yang betul2 diterapkan.
49	3	4	3	10	4	3	3	10	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	agar bimtek macam ini jangan hanya dilakukan pada saat tahun politik dan untuk advokat yang akan beracara di MK harus memiliki sertifikasi dari acara bimtek ini
50	3	3	3	9	3	3	3	9	Intan Permata Putri, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	2	5	63	3,00	jaringan internet tidak sampai ke kamar dan sinyalnya lemah. mungkin bisa ditambah penguat jaringan sehingga di kamar pun bisa akses internet dengan lancar
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
52	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Materi diperkuat
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon agar materi untuk ketua DPW dan Sekretaris DPW berbeda /dipisahkan dengan materi kepada Advokat Partai/wakil ketua bidang hukum
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
56	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Sebelum menjalankan kegiatan Bimtek, kami dipersilahkan berolah raga, karena kami dari daerah ada yg tidak membawa baju dan celana olah raga beserta sepatu olah raga, kami mohon untuk kedepannya disediakan buat peserta Bimtek, terima kasih.
57	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	3	7	3	4	7	69	3,29	PRKTEK MOHON LEBIH BANYAK DIBANDING MATERI KARENA ITU YANG SESUNGGUHNYA HARUS DIKUASAI PESERTA KENAPA MENU MAKANAN DIBANDING 2019 MALAH MENURUN, DULU STANDAR HOTEL BERBINTANG DAN DIAKHIR ADA KAMBING GULING SEKARANG GAK ADA
58	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Narasumber yang memberikan materi dalam segala sesi yang inti.. Seharusnya diisi oleh YM hakim konstitusi supaya suasana tanya jawab bisa lebih hidup.. Karna banyak peserta yang bemasalah dari anggota dewan yang pemah menduduki jabatan dewan dan mempunyai permasalahan permasalahan yang sangat kredit dan menurut saya mampu di jawab oleh narasumber yang bemasalah dari YM hakim konstitusi.
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Intan Permata Putri, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Sangat baik
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good Good Good
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good Good Good
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	0	4	4	80	3,81	Good Good Good
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good Good Good
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	82	3,90	
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good Good Good
70	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good Good Good
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	2	2	4	8	1	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	54	2,57	Good Good Good
72	3	4	4	11	3	4	4	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	3	4	11	3	4	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	75	3,57	Good Good Good
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Good Good Good
74	3	4	4	11	4	4	3	11	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	74	3,52	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	4	3	10	4	3	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	76	3,62	Mantap Luar biasa Good
76	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	4	3	10	3	4	7	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	75	3,57	
77	4	4	3	11	3	4	3	10	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	4	3	10	4	3	7	4	3	7	4	3	7	3	4	7	3	4	7	73	3,48	
78	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	mohon untuk menu makanan jangan manis mohon untuk disediakan pengering rambut di kamar
79	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Untuk hidangan makan hindari menu yang sama . Contoh sayur buncis jangan sering di hidangkan dan kalau sudah kacang-kacangan di hidangkan maka jangan ada lagi sayur kacang panjang. untuk menu sop bisa di ganti deng soto Untuk menu makanan yang pertama kita datang rasanya manis semua. Internet kadang lambat
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kursi peserta harus di ganti, tidak nyaaman, dudknya mlorot terus
83	4	4	4	12	4	4	4	12	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,54	3,69	3,59	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61			3,64	3,66	3,65	3,59	3,64	3,65	3,62	3,58	3,45	3,51	3,49	3,61	3,55	3,67	3,66	3,66	3,66	3,62	3,64	3,64	3,56	3,60	79,37	3,61	



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

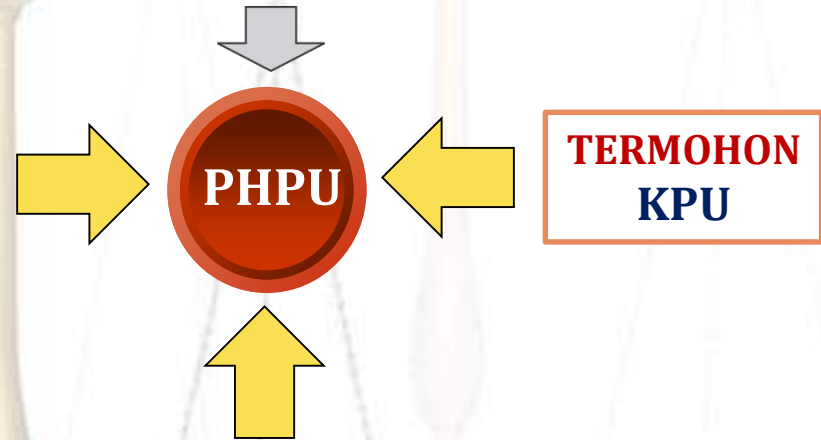


# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN  
BAWASLU



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**Perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya  
anggota  
DPR dan/atau DPRD  
di suatu daerah  
pemilihan**



# PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

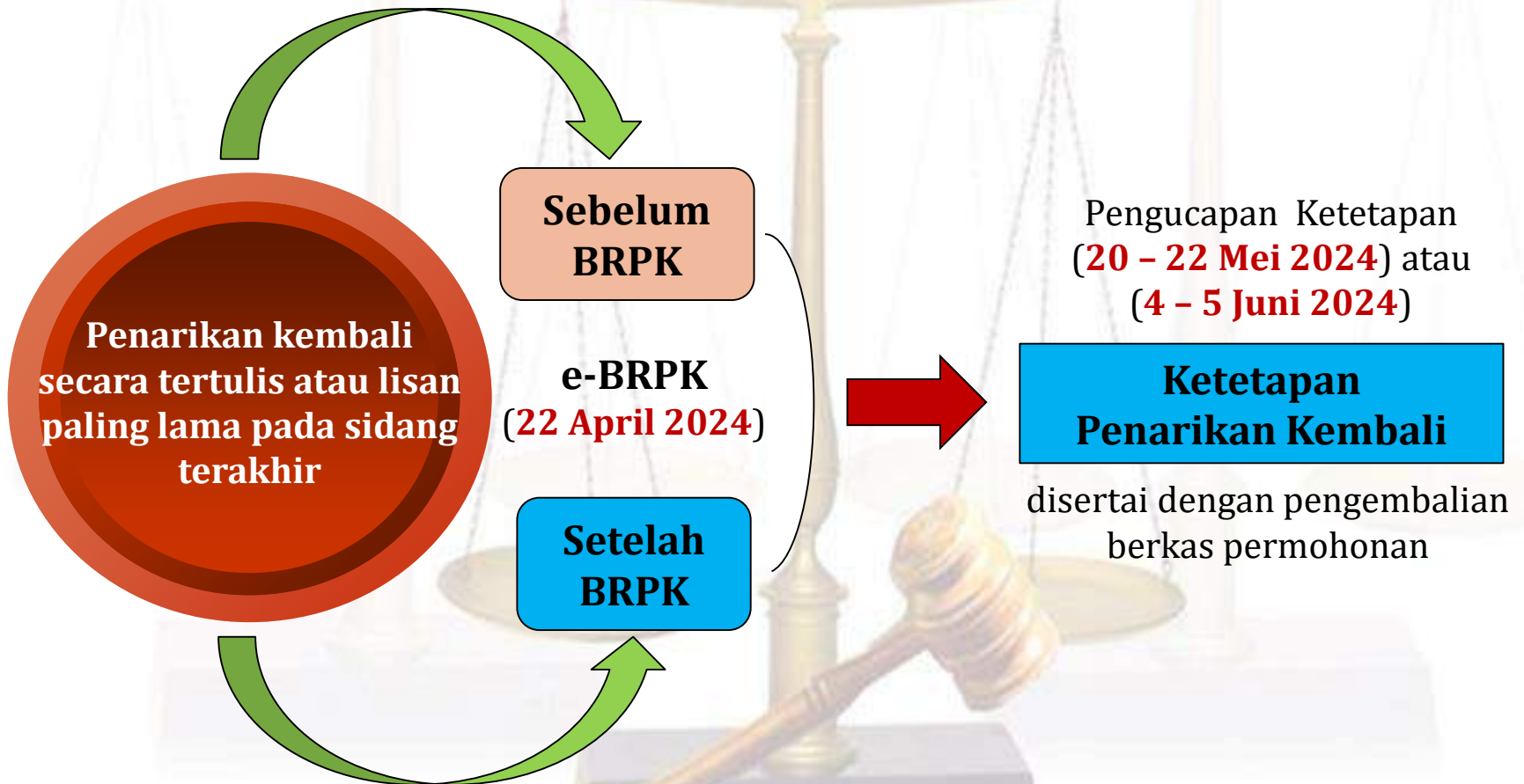
# PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

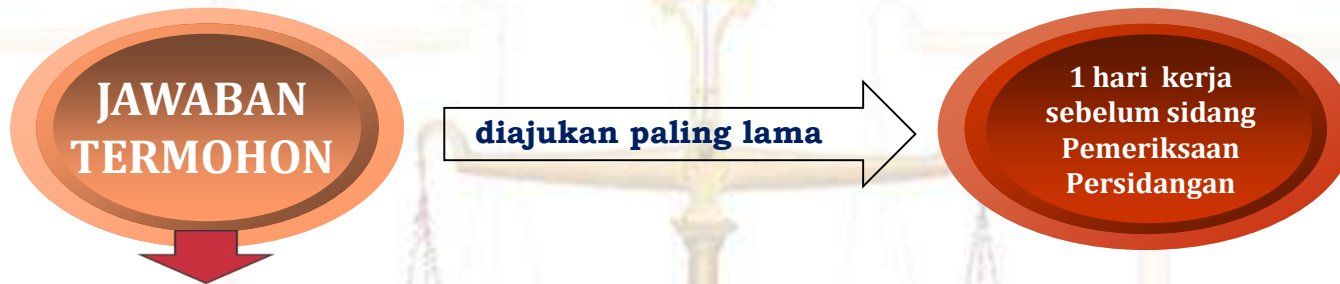
## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# JAWABAN TERMOHON

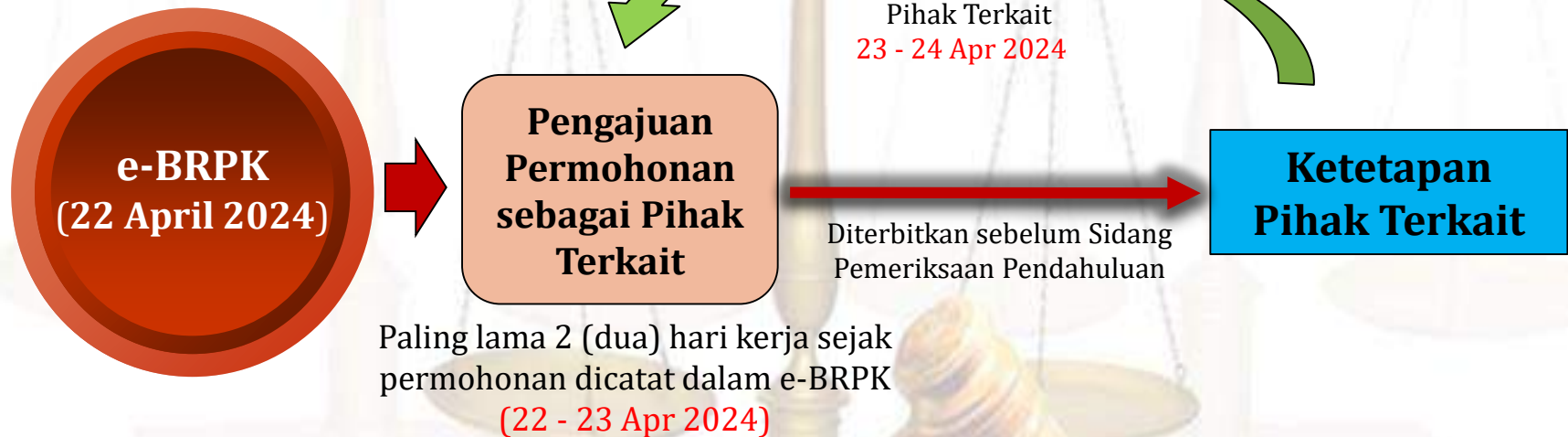


1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum Pemohon
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan  
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum  
Pemeriksaan  
Persidangan

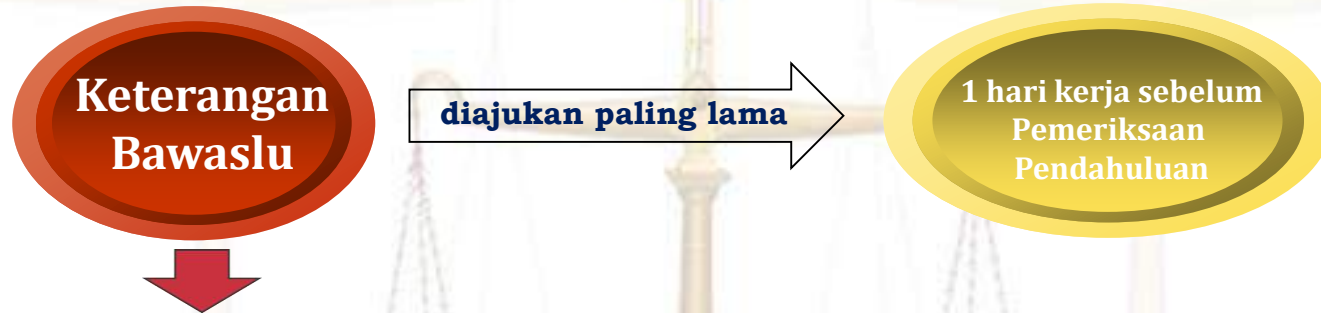
1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)



## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

# KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum



# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

# ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - b. KPU/KIP kabupaten/kota
  - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

**Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

**Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

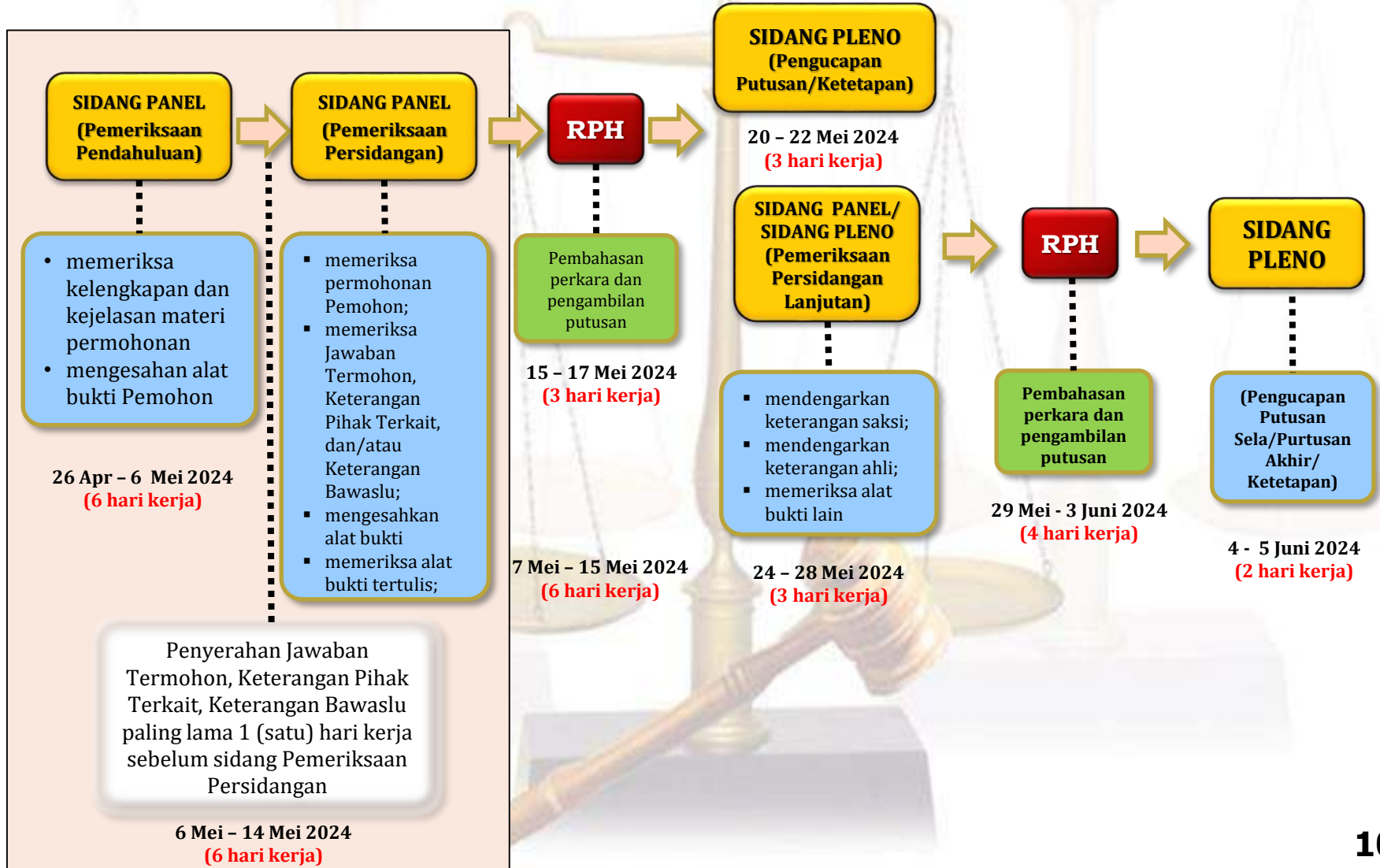
## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



# PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

**Putusan Mahkamah**, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## Lanjutan ...

### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur



# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

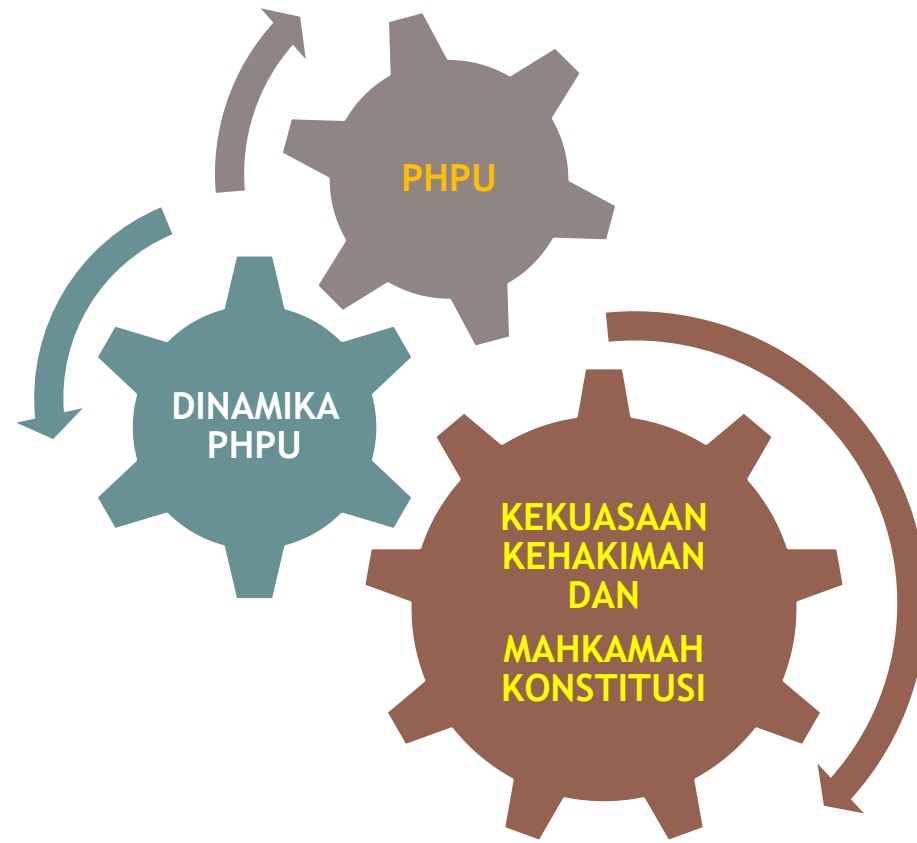
**SEKIAN  
TERIMA KASIH**

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

**ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Materi disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Perindo, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 1 Agustus 2023, Cisarua, Bogor.

# PEMBAHASAN



# KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**.

**Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



MAHKAMAH  
AGUNG



MAHKAMAH  
KONSTITUSI



# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

# MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

**OBJEK**

- PERSELISIHAN TENTANG  
HASIL PEMILU

**PARA  
PIHAK**

- PEMOHON
- TERMOHON
- PIHAK TERKAIT



# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILU



## PEMOHON

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



## TERMOHON

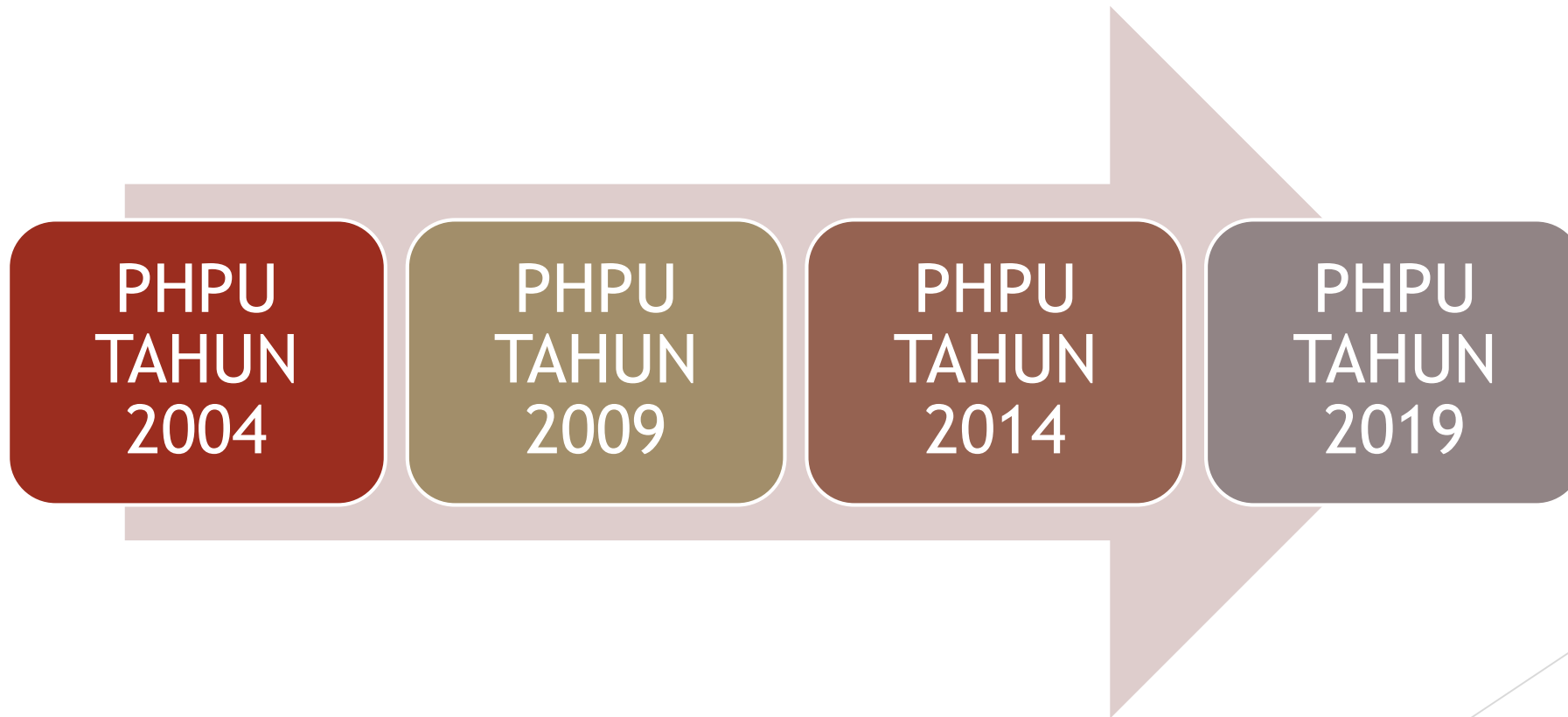
- KOMISI PEMILIHAN UMUM



## PIHAK TERKAIT

- PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON

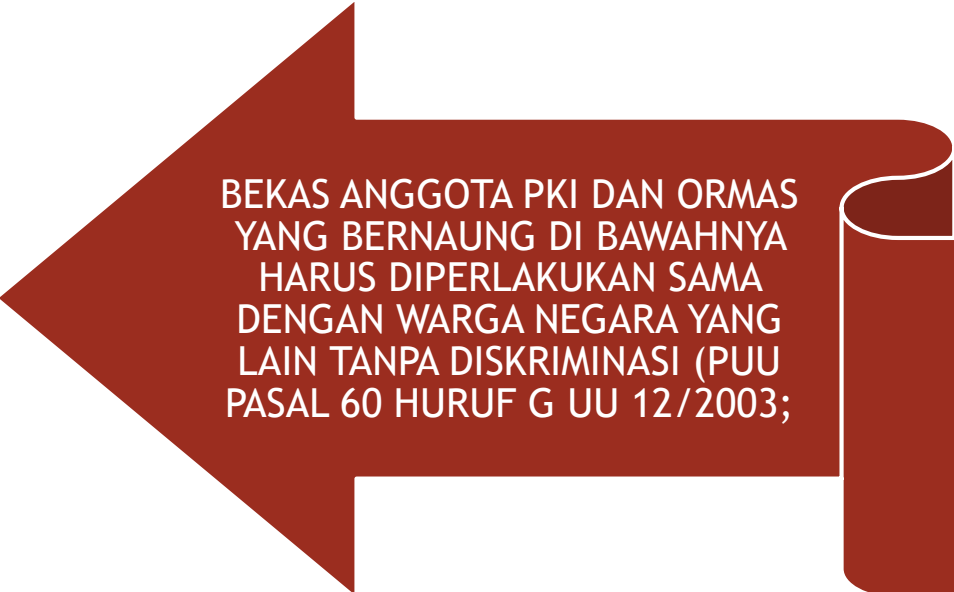
# DINAMIKA **PENANGANAN** PHPU



# PEMILU LEGISLATIF 2004



# HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU LANGSUNG



BEKAS ANGGOTA PKI DAN ORMAS  
YANG BERNAUNG DI BAWAHNYA  
HARUS DIPERLAKUKAN SAMA  
DENGAN WARGA NEGARA YANG  
LAIN TANPA DISKRIMINASI (PUU  
PASAL 60 HURUF G UU 12/2003;



PHPU  
PEMILU LANGSUNG

# PEMILU LEGISLATIF 2009



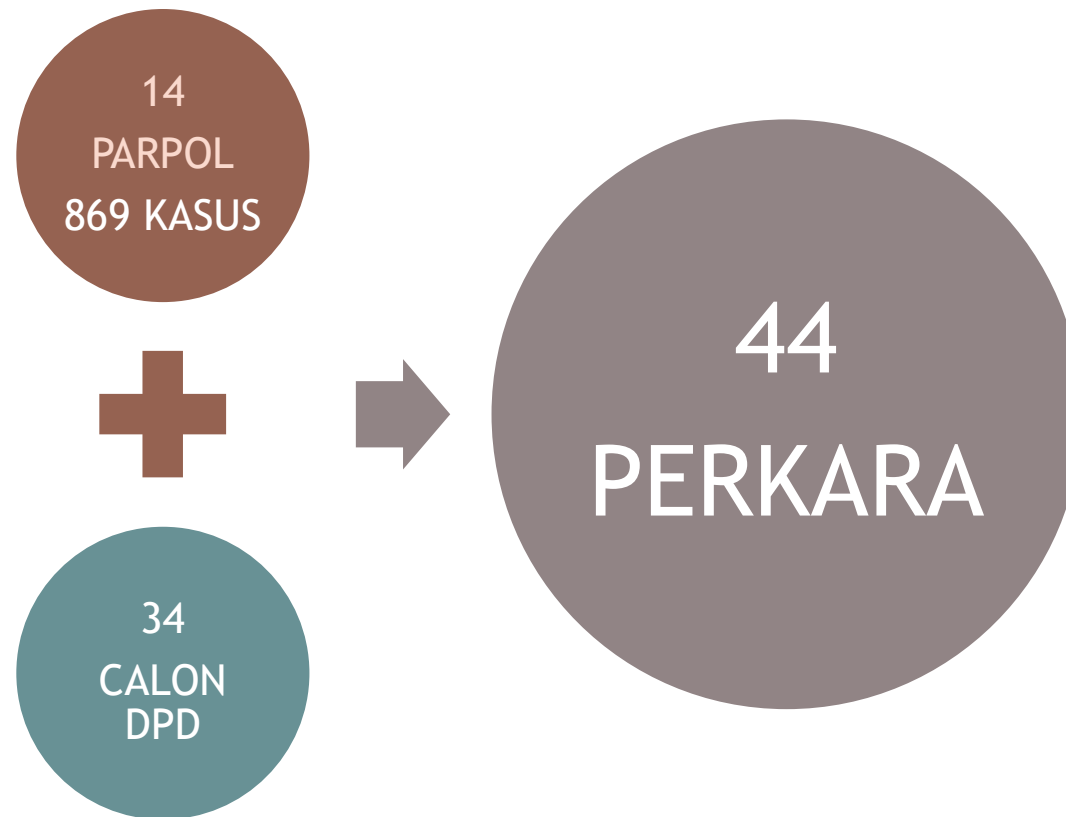
## KTP DAN PASPOR SEBAGAI IDENTITAS PEMILIH

- ▶ KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) (PUU Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008).
- ▶ Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Jatim.

## PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- ▶ Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- ▶ Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- ▶ Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

# PEMILU LEGISLATIF 2014

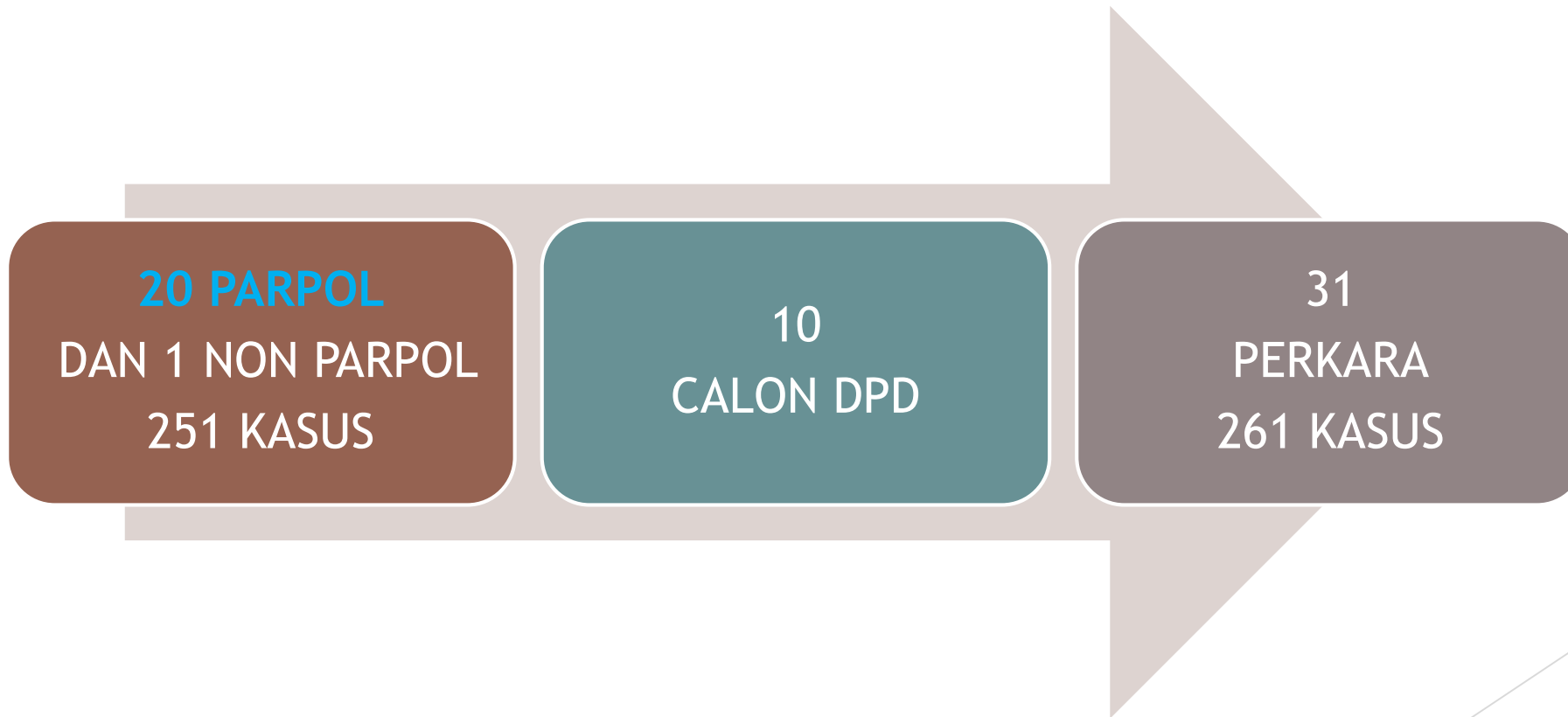




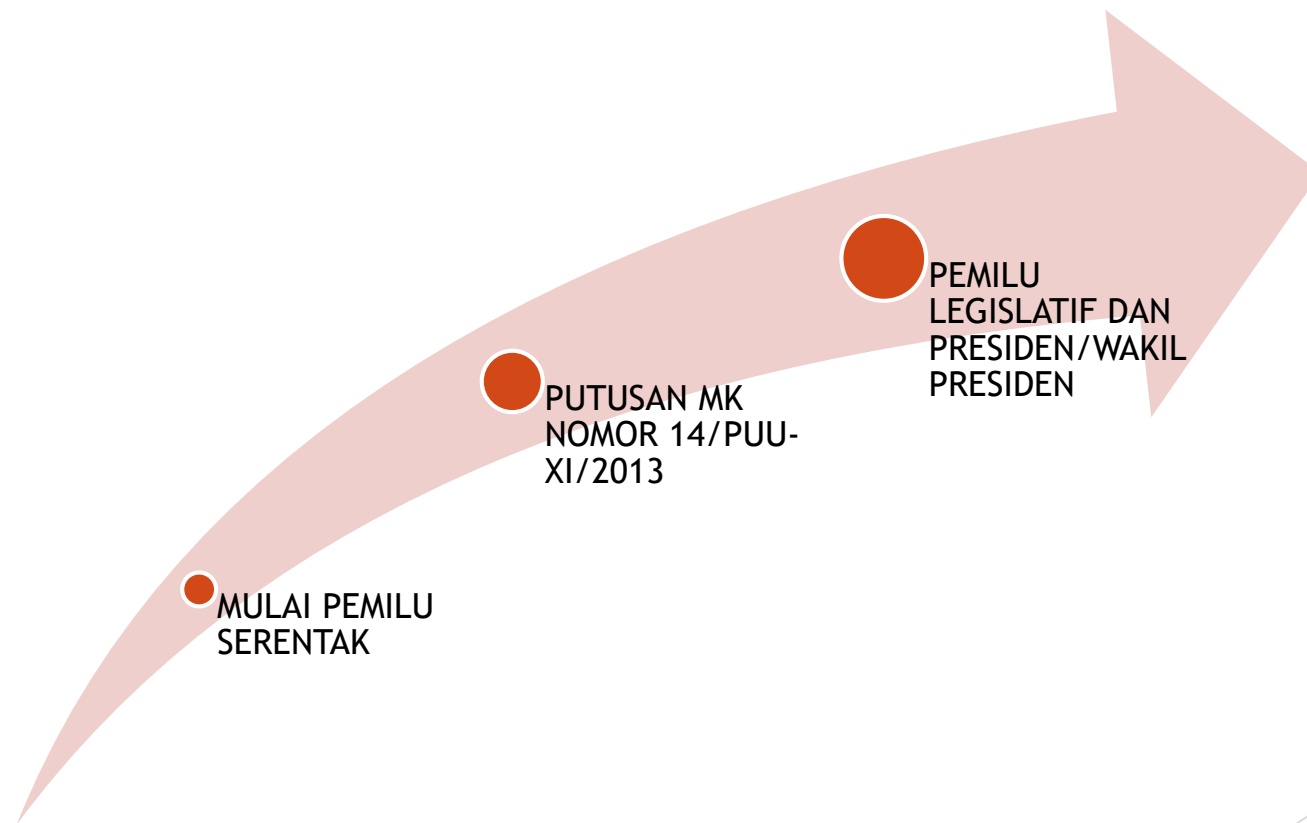
# PUTUSAN PEMILU SERENTAK

- ▶ Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Dilaksanakan Secara Bersamaan (Serentak), (Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013);
- ▶ Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan, (Putusan Mk Nomor 31/PUU-XI/2013);
  - \* Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP;
- ▶ Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013)

# PEMILU LEGISLATIF 2019



# PEMILU SERENTAK



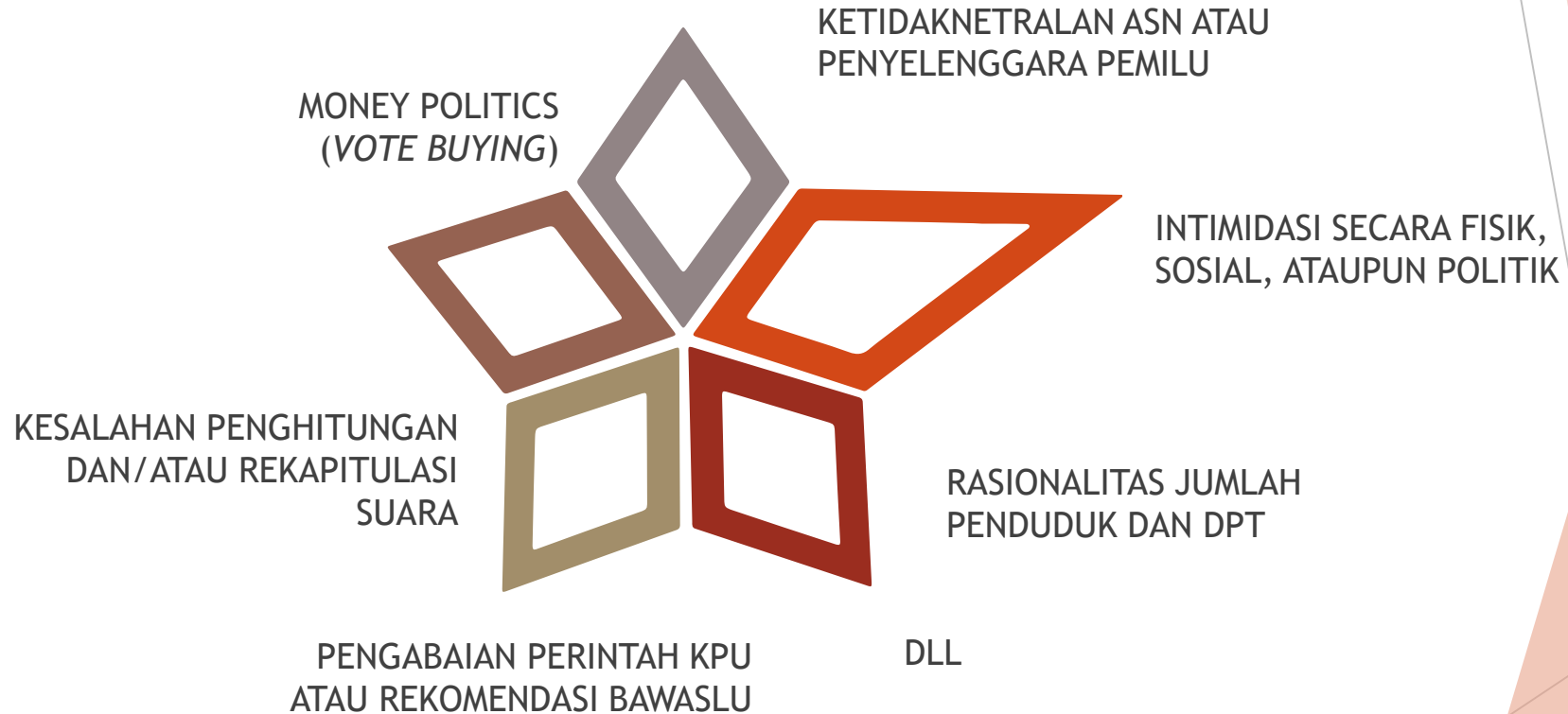
# PUTUSAN MK MONUMENTAL

- SUKET KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS  
PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019
- HITUNG CEPAT DI MASA TENANG (TIDAK ADA KAMPANYE)  
PUTUSAN MK NOMOR 24-25/PUU-XVII/2019
- MANTAN NAPI MAJU PILKADA (MASA TUNGGU 5 TAHUN)  
PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILU



# ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



# PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

## TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

## SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

## MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

## SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



# AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

## TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

**PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

APABILA TERJADI KESALAHAN  
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK  
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS  
ATAU WILAYAH TERTENTU

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN  
YANG MENAKIBATKAN TIDAK DAPAT  
DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG  
ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN  
AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG

**PUTUSAN SELA**



**PUTUSAN AKHIR**







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**

Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval

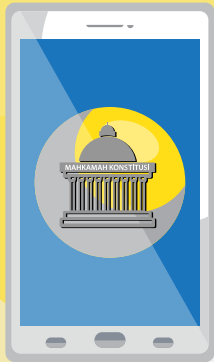
**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

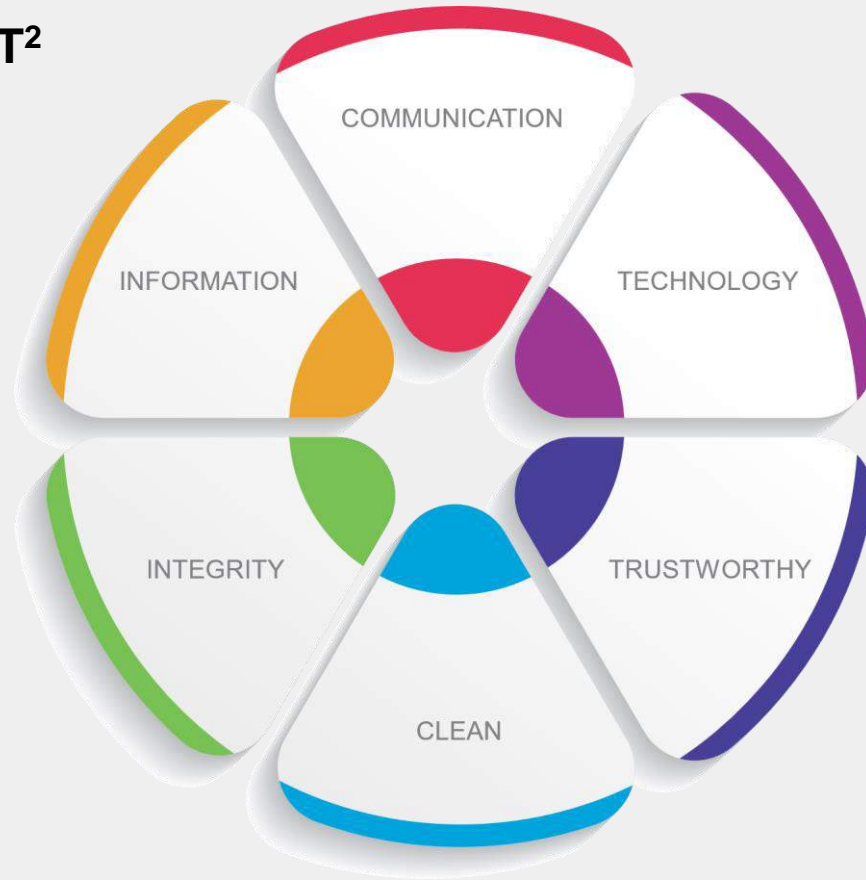




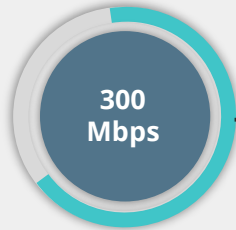
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET



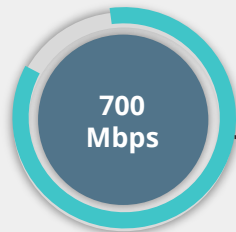
**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll



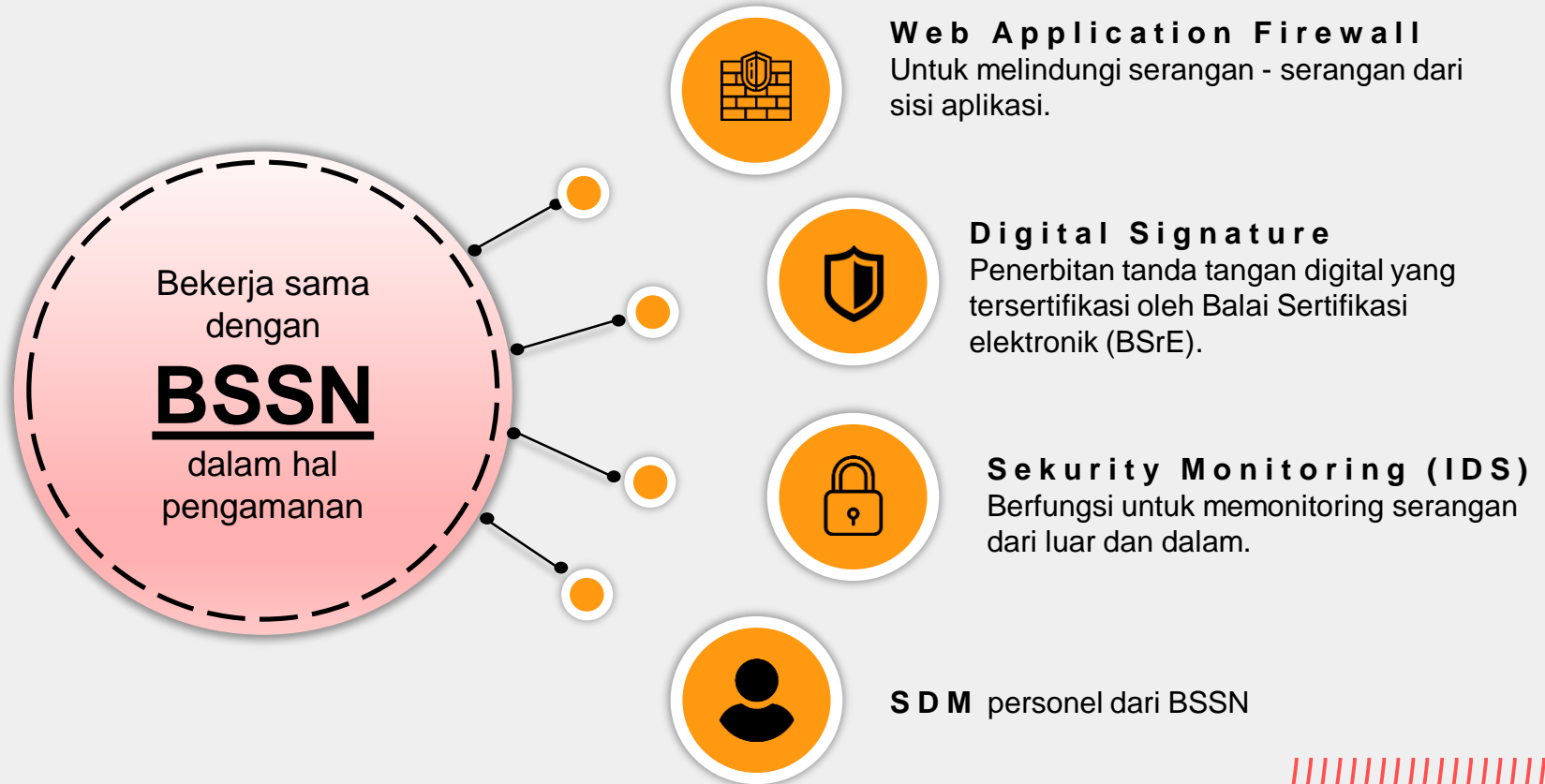
## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup





# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **MODEL PERSIDANGAN:**

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### **RUANG LINGKUP:**

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**

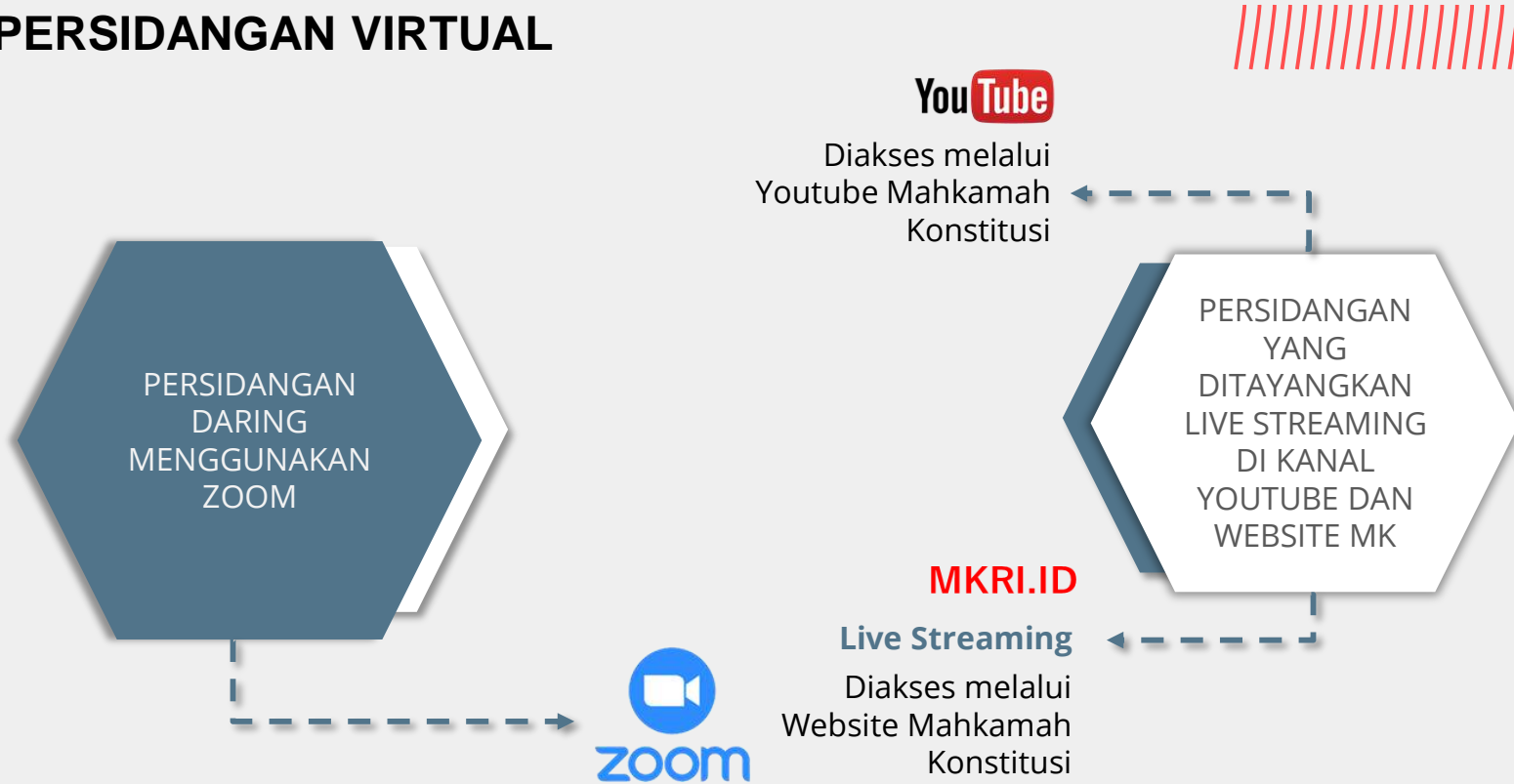
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



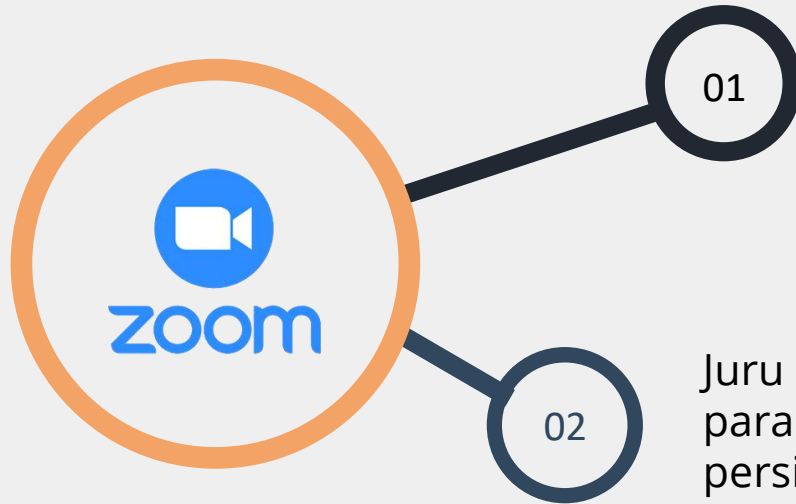
# PERSIDANGAN VIRTUAL



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



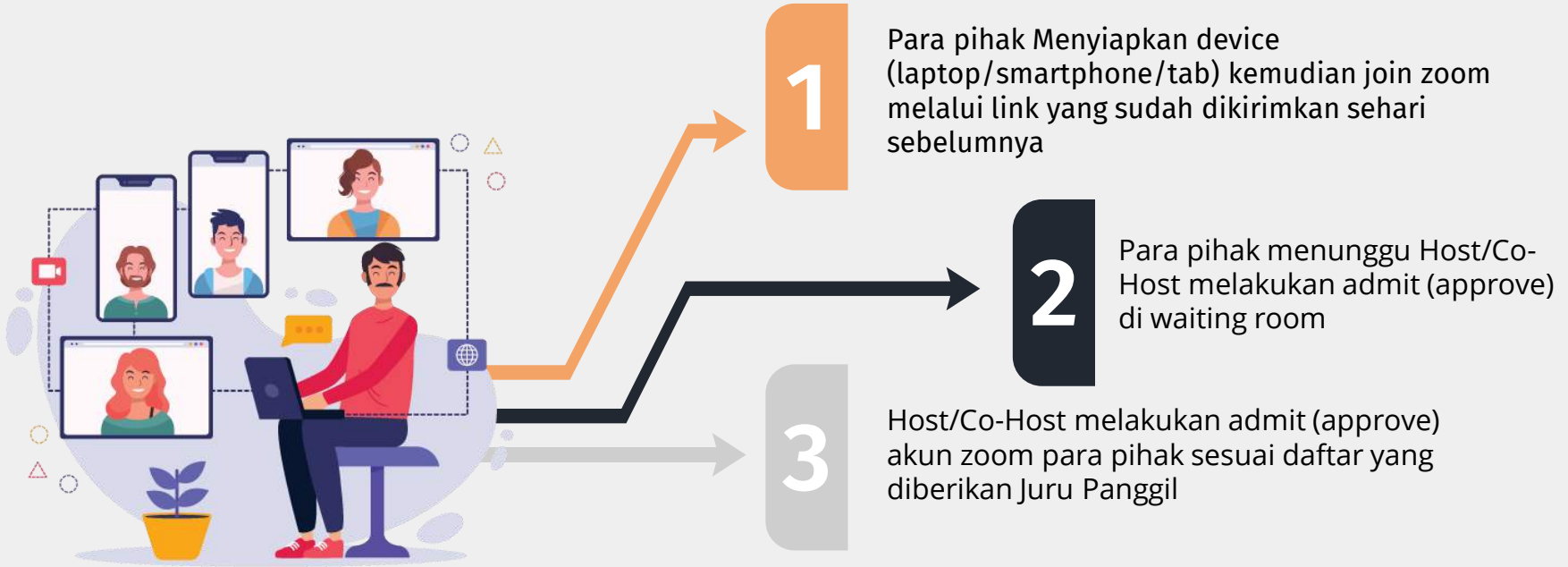
### TAHAP PERSIAPAN



01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

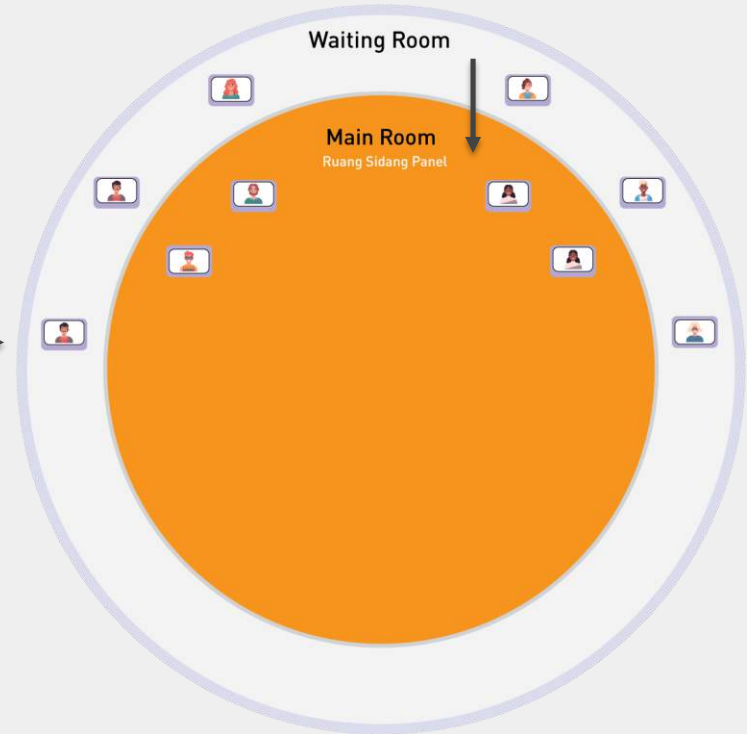
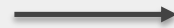
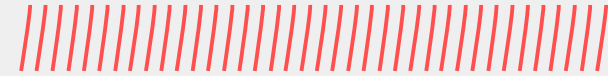
02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

# ALUR PERSIDANGAN DARING

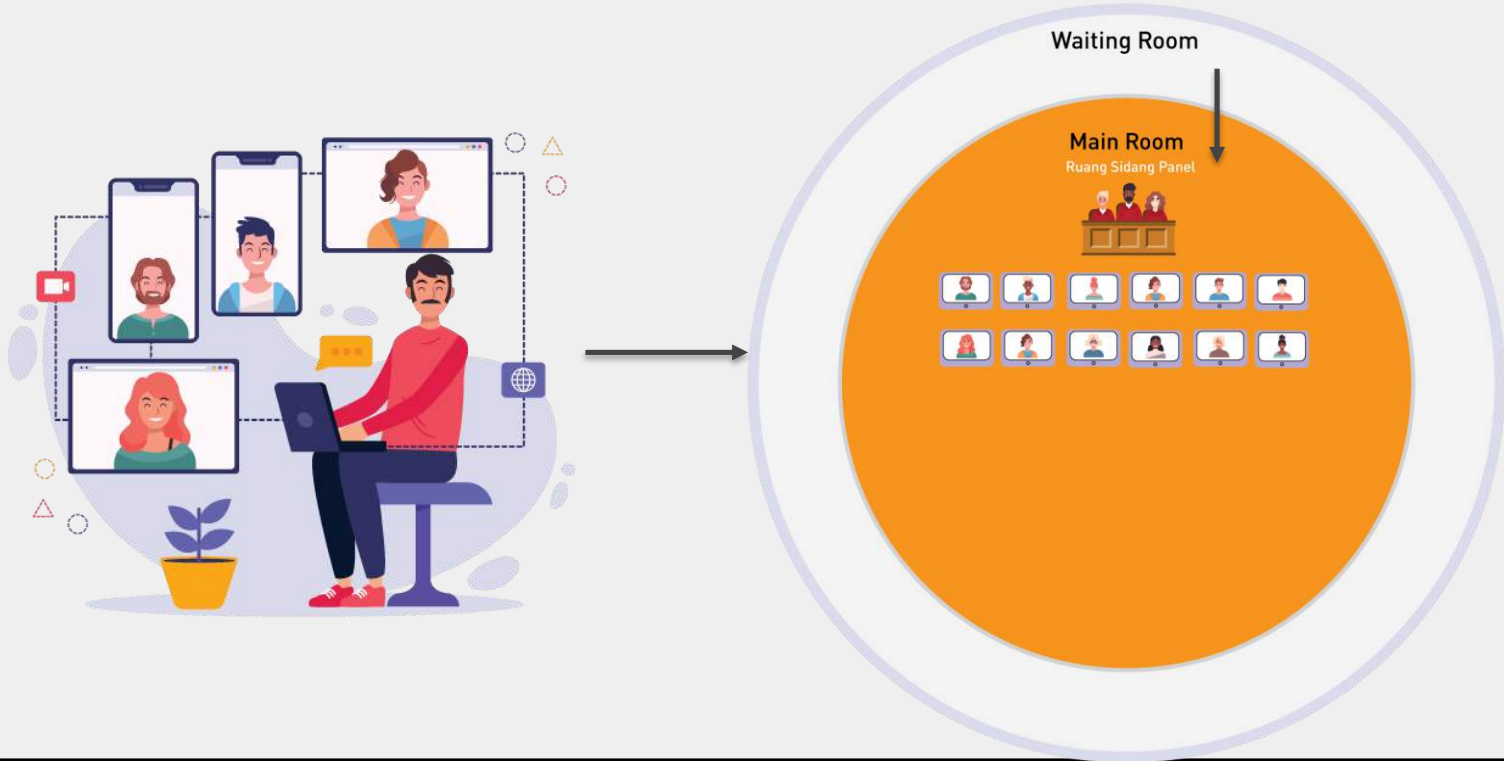




- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®

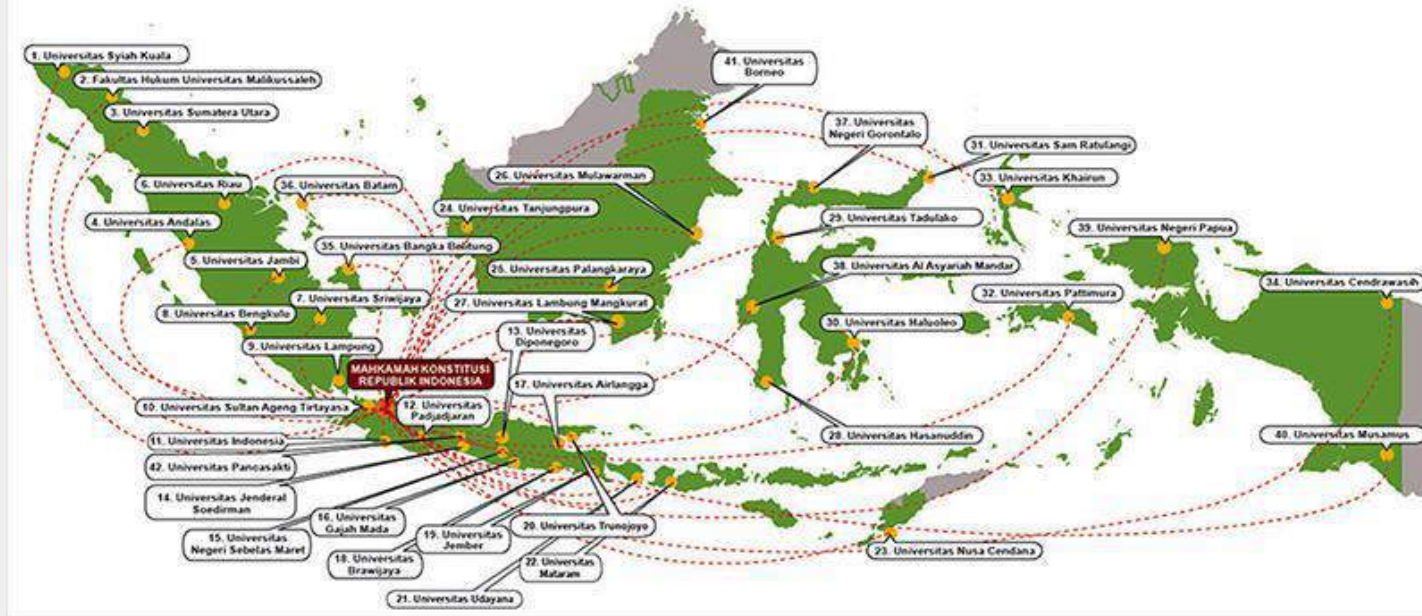


VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**





# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

rum : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

QR Code



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**

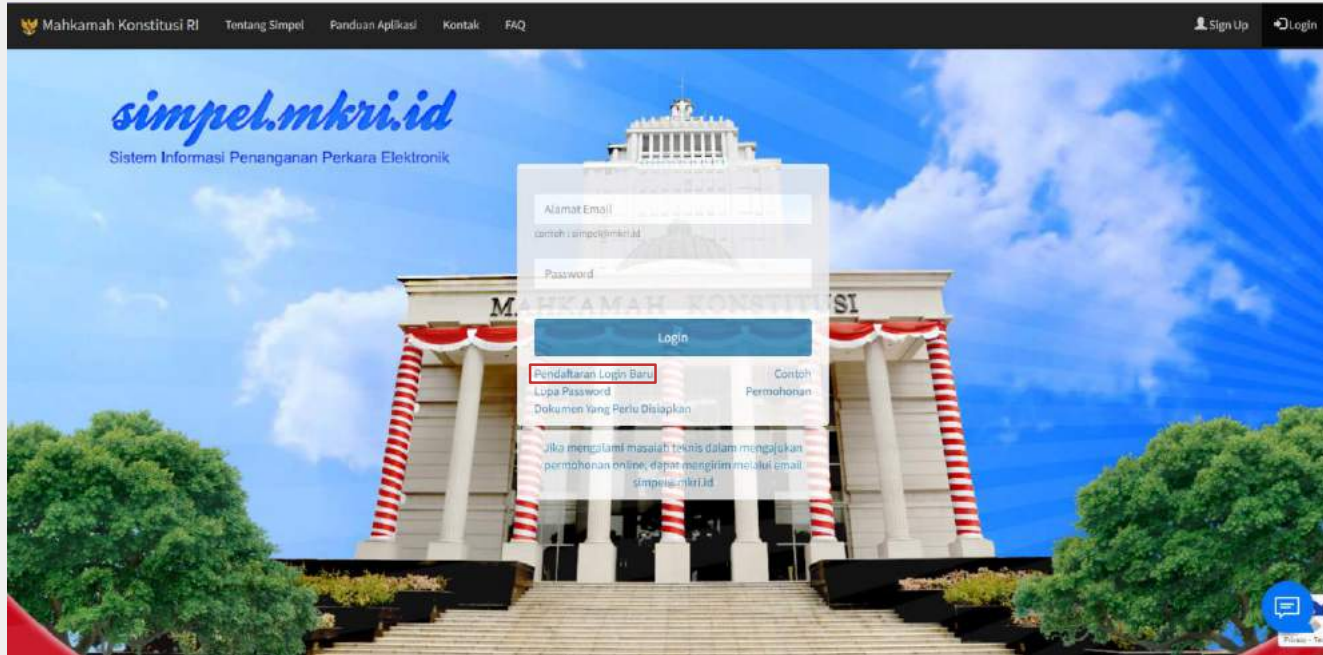
*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**



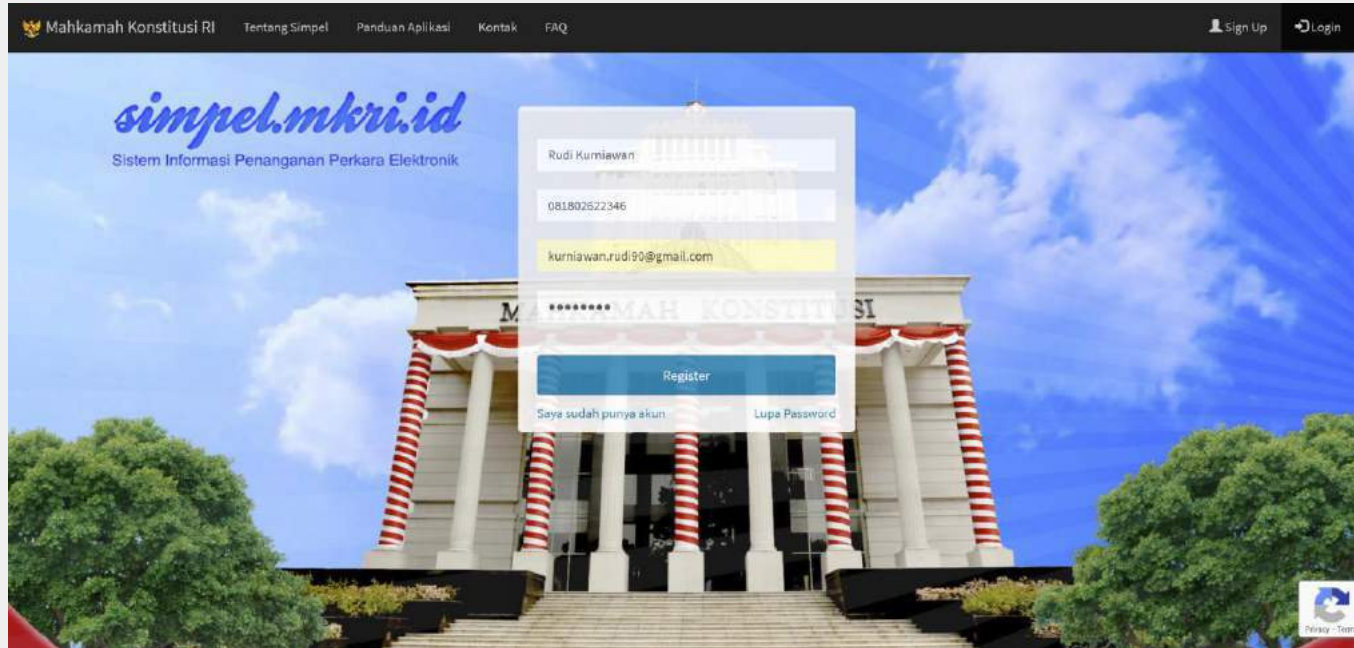
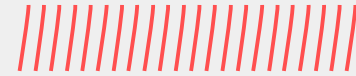
Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

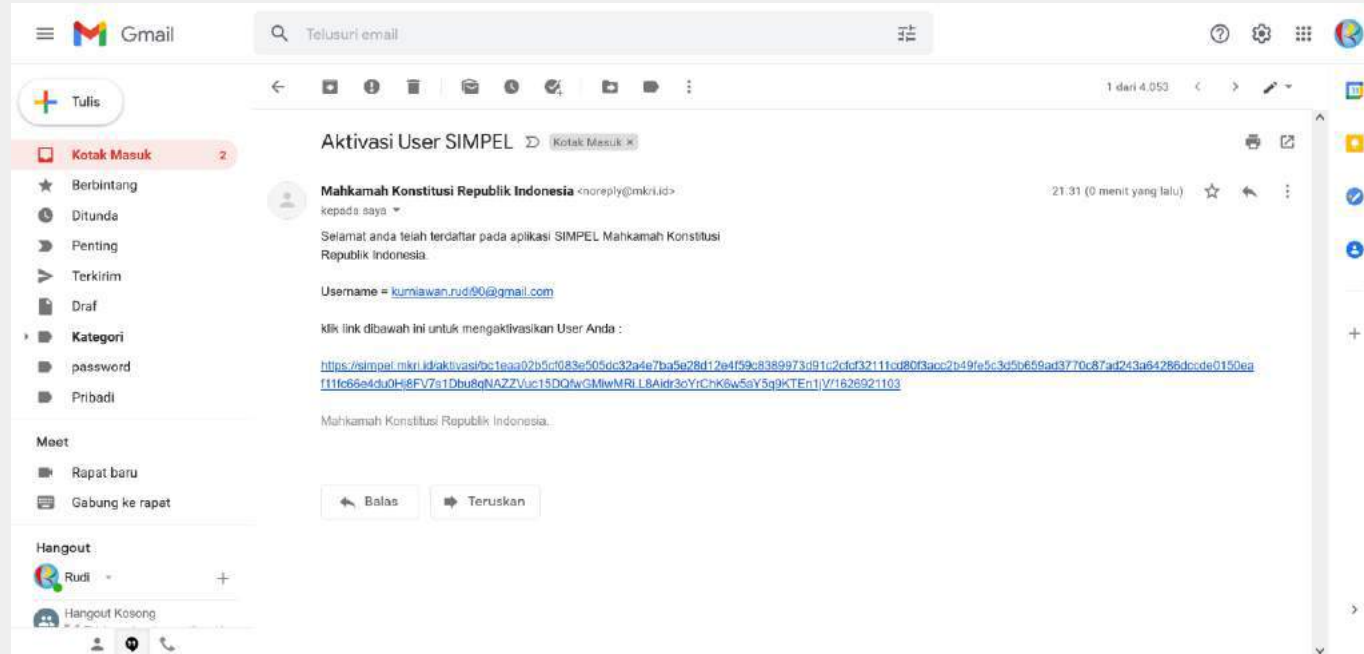
# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.



# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile icon for 'Rudi Kurniawan', and a 'Logout' button. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Profile, and a menu for 'PROSEDUR PERMOHONAN' (PUU, SKLN, PHEU, PIP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, Kontesasi). The main content area is titled 'Profile' and shows the user's profile information. The profile is currently incomplete, with a 'Profile User' header and a 'Rudi Kurniawan' name. The form fields are as follows:

- Nama \***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP \***: 081662622566
- Nomor KTP \***: 123456789011121
- File KTP \***: [Diunggah](#) [nt digital.org](#)  
[File type: image/jpeg, 47.68 kb](#)  
Belum ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A row of four cards showing the number of pending applications for different categories: Pungutan Undang-Undang (PUU) with 1 application, Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN) with 0 applications, Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden with 0 applications, and Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD) with 0 applications. Each card includes a 'Selengkapnya' (More) button.
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with 0 pending applications and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar is color-coded: green for 'Sidang' (Court Session), blue for 'Publik' (Public), and purple for 'Kerluangan' (Courtroom). A legend at the bottom indicates 'L' for 'Ubur' (Courtroom).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU(Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for entering the "Pokok Permohonan" (main application point). Below the form, a list of required documents is provided, including KTP, Email, KTP Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, and various application forms. A "Keterangan" section explains that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

**SIMPTEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan



Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen



**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**




Edit Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang .....

**Data Pemohon** [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

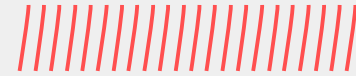
**Data Kuasa** [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)  Simpan Sementara  Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

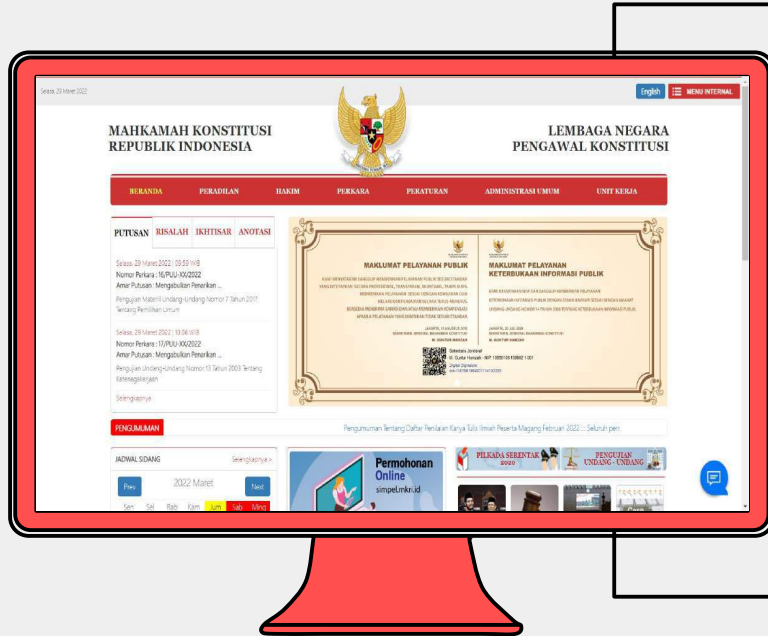
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)





# MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERJANGKAH, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020  
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001  
Zuhair Zuhair  
nip.1970081904201114102335

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >  
Prev 2022 Maret Next  
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERSAMA, BERSEDEKA MENYERAH SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019  
SUHARNO TANU, JENYAL BAL, MAHARAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001  
Zuhro Zuhro  
nip. 192 708 100420 1114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019  
SUHARNO TANU, JENYAL BAL, MAHARAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

#### BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



#### PILKADA SERENTAK 2020

#### PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

# LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev




SP4N-LAPOR!

## Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



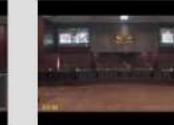
Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan





# CASE TRACKING



 MAHKAMAH KONSTITUSI

Q Cari

## CASE TRACKING

**MKRI** **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022



CLICK MK



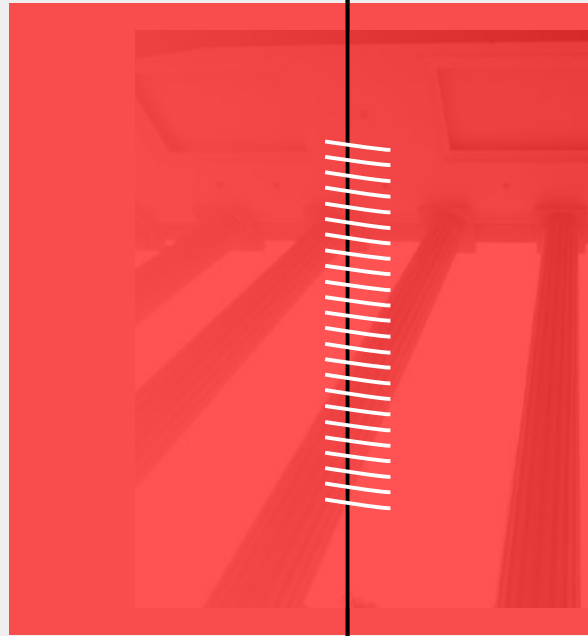
CLICK MK



CLICK MK



**TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"  
CISARUA – 2 Agustus 2023**

# PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

## A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

## B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

## C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;



# OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

## PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

## PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan  
permohonan ke MK  
paling lama **3 x 24 jam**  
**sejak** diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb - 20 Mar 2024**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

2 x 24  
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

3 x 24  
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

# **SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
  - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
  - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
  - 1. Kewenangan Mahkamah;
  - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

# Identitas Pemohon & Termohon

**Identitas Pemohon** memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. nomor telepon/seluler;
  - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- \*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,  
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD  
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan .....



# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat  
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta  
Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

# Identitas Pihak Terkait

**Identitas Pihak Terkait** memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

\*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,  
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh  
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan  
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
  - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
  - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
  - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
  - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

# Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.



# Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
  - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

# Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

*Jika permohonan diajukan perseorangan:*

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

# Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
  - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
  - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

# Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

## Pemohon Parpol:

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

## Pemohon Perseorangan:

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar



# Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

**DALAM EKSEPSI** (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

## **V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)**

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# Uraian Petitum Pihak Terkait

***Petitum*** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ....., bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# PARTAI PERINDO (PHPU 2019)

## Permohonan:

A. 11 Permohonan.

B. Jika dilihat dari Dapil: 14 Dapil dengan rincian sbb:

1)DPR: 0 Dapil dari 80 Dapil DPR RI

2)DPRD Provinsi: 2 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi

3)DPRD Kabupaten/Kota: 12 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

## Putusan

a) 0 Dapil dikabulkan

b) 2 Dapil ditarik kembali

c) 3 Dapil ditolak

**d) 9 Dapil tidak dapat diterima;**



# Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1321/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada,  
**YM. Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Juli 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1101932746230725015328

Lampiran I

Nomor : 1321/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**

Hari, Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1322/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada,

**YM. Hakim Mahkamah Konstitusi**

**Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Juli 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1692420839230725015554

Lampiran I

Nomor : 1322/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**

Hari, Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1404/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

31 Juli 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di  
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk-810053807230731090055



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1357/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

**1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**

**2. Hafidz Ikhsan Baihaki**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature  
mk1857939140230727082443





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3249/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024  
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1418/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Ria Indriyani**
  - 2. Jefri Porkonanta Tarigan**
  - 3. Agusniwan Etra**
  - 4. Intan Permata Putri**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk-769407313230801113051



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1319/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Yunita Rhamadani**
  - 2. Anak Agung Dian Onita**
  - 3. Anna Triningsih**
  - 4. Syamsudin Noer**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan  
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk688519518230725020415



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1315/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator  
Evaluasi**

25 Juli 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda III**  
**Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 122/DK.06.00/01/2023  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Perindo**

**Bapak Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, B.Com., M.B.A**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 Juli 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1812026882230119112540

Lampiran I

Nomor : 122/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN**  
**HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Indonesia yang terdiri dari:
  - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Persatuan Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **17 Juli 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

#### d. *Boarding pass*

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

#### e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



#### **f. Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

#### **6. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### **7. Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.





Lampiran II

Nomor : 122/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Persatuan Indonesia**

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Persatuan Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 31 Juli 2023</b>	09.30 – 11.30 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	<b>YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Ketua Partai Politik</li> <li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Pembacaan Doa</li> </ul>		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 1 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 2 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 3 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>Sekjen MK Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 122/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 122/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
31 Juli s.d. 3 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
DPP Partai Persatuan Indonesia  
ttd  
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 169/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis  
Hukum Acara Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Perindo**

**Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, B.Com., M.B.A**  
**di Tempat**

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature  
mk-2063373150230109040448



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1317/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

25 Juli 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Perindo**

**Bapak Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, B.Com., M.B.A**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo** yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-795802630230725015132



Lampiran I

Nomor : 1317/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**

**Hari, Tanggal** : **Senin, 31 Juli 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Persatuan Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 31 Juli 2023	16.30 –18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Persatuan Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Persatuan Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>Ketum Partai</b> <b>Persatuan Indonesia</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 624/ST.SPD/2000/08/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir**

**Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi

**Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

**Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Persatuan Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Juli 2023  
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth.  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



*Digital Signature*  
mk-391569059230803025502

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 624/ST.SPD/2000/08/2023

Tanggal : 31 Juli 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	31 Juli 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	31 Juli 2023
3	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H. M.H.	Narasumber	31 Juli 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	31 Juli 2023
5	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	1 Agustus 2023
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	1 Agustus 2023
7	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Narasumber	1 Agustus 2023
8	Rudi Kurniawan	Narasumber	1 Agustus 2023
9	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Narasumber	2 Agustus 2023
10	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	2 Agustus 2023
11	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	2 Agustus 2023
12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	2 Agustus 2023
13	Intan Permata Putri, S.H., M.H.	Narasumber	2 Agustus 2023
14	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	3 Agustus 2023
15	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	3 Agustus 2023
16	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.H.	Narasumber	3 Agustus 2023
17	Dr. Syamsoedin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	3 Agustus 2023
18	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	3 Agustus 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

## PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)  
TENTANG  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAGI PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)**

**NOMOR : 33/PK/2023**

**NOMOR : 455/P.2/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023**

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul Majdi, Lc, MA.**, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

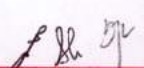
**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

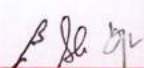
- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
  - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **17 Juli 2023**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **17 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

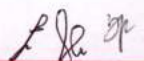
- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Teguh Wahyudi**

Kepala Pusat

*Sh* Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *P*

**PIHAK KEDUA,**  
Partai PERINDO (Persatuan Indonesia)



**Dr. Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul**

**Majdi, Lc, MA.**

Ketua Harian Nasional DPP





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

NOMOR : 33/PK/2023

NOMOR : 455/P.2/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul Majdi, Lc, MA.**, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo (Persatuan Indonesia), berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

*f&e*

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

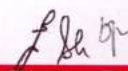
**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

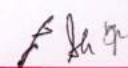
- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
  - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **17 Juli 2023**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **17 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia).

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

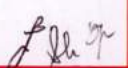
- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusat

*T* Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *f*

**PIHAK KEDUA,**  
Partai PERINDO (Persatuan Indonesia)



**Dr. Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul  
Majdi, Lc, MA.**  
Ketua Harian Nasional DPP

## Penjelasan Teknis

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MUH. ASRATILLAH SENGE	31/07/2023 15:33:20 WIB
2	SEPTIYANA WIDIYASTUTI	31/07/2023 15:46:17 WIB
3	THARIQA ZAHRA	31/07/2023 15:46:46 WIB
4	JEPRI DWI PURWANTO	31/07/2023 15:48:15 WIB
5	MARIA ANGELIN	31/07/2023 15:52:10 WIB
6	Muhammad Irwan	31/07/2023 15:56:56 WIB
7	ADRI FADLY	31/07/2023 15:57:52 WIB
8	MAHIRUDDIN	31/07/2023 15:57:52 WIB
9	KOMANG PURNAMA	31/07/2023 15:58:58 WIB
10	JERICHO MANDAHARI	31/07/2023 15:59:06 WIB
11	KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	31/07/2023 15:59:26 WIB
12	MAS AGUS IWAN SAPUTRA	31/07/2023 16:00:23 WIB
13	SYAIFUL ANWAR	31/07/2023 16:00:25 WIB
14	CHRISTIAN G. PIOH	31/07/2023 16:01:06 WIB
15	GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	31/07/2023 16:02:30 WIB
16	YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	31/07/2023 16:03:47 WIB
17	AGUS WINARNO	31/07/2023

	16:03:54 WIB
18 GERSON KOSSAY	31/07/2023 16:04:05 WIB
19 HERU BUDHI SUTRISNO	31/07/2023 16:04:39 WIB
20 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	31/07/2023 16:04:59 WIB
21 METTALIA YOLANDA	31/07/2023 16:04:59 WIB
22 Reza Ardiantori	31/07/2023 16:05:11 WIB
23 MOHAMMAD ZAM RONI	31/07/2023 16:05:16 WIB
24 DONY SETIO BUDI	31/07/2023 16:05:17 WIB
25 Inggrith S.R Luneto	31/07/2023 16:05:28 WIB
26 YUDA ADITIA MA ATFA	31/07/2023 16:05:38 WIB
27 JUNIANA SIPAYUNG	31/07/2023 16:06:46 WIB
28 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	31/07/2023 16:08:32 WIB
29 MIJOTO SOLEKAN	31/07/2023 16:09:07 WIB
30 Rouli Dame Marbun	31/07/2023 16:09:10 WIB
31 SRI SUDARTI	31/07/2023 16:09:25 WIB
32 SELVIANTI JOENoes	31/07/2023 16:10:28 WIB
33 YEHEskIAL NATONIS	31/07/2023 16:10:33 WIB
34 Emanuel Tebai	31/07/2023 16:10:39 WIB
35 AHMAD ALIFKA RAHIM	31/07/2023 16:10:58 WIB
36 RIYANTO	

	31/07/2023 16:11:04 WIB
37 JON KENEDI	31/07/2023 16:11:09 WIB
38 BUDIANTA TARIGAN	31/07/2023 16:11:23 WIB
39 M. Fajrin	31/07/2023 16:11:27 WIB
40 SAID EFFENDI	31/07/2023 16:11:30 WIB
41 Eko Supriyanto B Putro	31/07/2023 16:11:31 WIB
42 Wahyu Wagiman	31/07/2023 16:11:36 WIB
43 Bambang Anto Wibowo	31/07/2023 16:11:37 WIB
44 MUHAMMAD DEFRIZAL	31/07/2023 16:11:37 WIB
45 Semmy Hesron Ndolu	31/07/2023 16:11:38 WIB
46 SYAHRUL	31/07/2023 16:11:39 WIB
47 SEPRIZAL HAMZAH	31/07/2023 16:11:39 WIB
48 KAMILUS LOGO	31/07/2023 16:11:40 WIB
49 M. RUSYDANUL ANAM	31/07/2023 16:11:41 WIB
50 WIDI FARIS FAUZAN	31/07/2023 16:11:41 WIB
51 ANDI SYAFRIZAL	31/07/2023 16:11:41 WIB
52 NOVIYARTI	31/07/2023 16:11:42 WIB
53 Rudy Meyvo Rumengan	31/07/2023 16:11:43 WIB
54 AGUS TUGIMAN	31/07/2023 16:11:43 WIB



55 SELVIANA	31/07/2023 16:11:44 WIB
56 MARINI	31/07/2023 16:11:44 WIB
57 SURAHMAD	31/07/2023 16:11:47 WIB
58 HASNI	31/07/2023 16:11:47 WIB
59 RAMUDDIN SIBAGARIANG	31/07/2023 16:11:54 WIB
60 FIRMANSYAH	31/07/2023 16:11:54 WIB
61 SARI OCTALISA	31/07/2023 16:11:55 WIB
62 ANDRI YANDANI	31/07/2023 16:11:56 WIB
63 NAUFAL AFIF ALROZI	31/07/2023 16:11:56 WIB
64 RIMHOT TURNIP	31/07/2023 16:11:58 WIB
65 RUDI ZULHAM HASIBUAN	31/07/2023 16:12:00 WIB
66 ACHMAD BAIHAQI	31/07/2023 16:12:00 WIB
67 Engel Bertus Tekege	31/07/2023 16:12:03 WIB
68 ASWAR	31/07/2023 16:12:04 WIB
69 Doni Bondan Wicaksono	31/07/2023 16:12:12 WIB
70 RADIUS SIMBOLON	31/07/2023 16:12:14 WIB
71 YUSUF RAHMADHAN	31/07/2023 16:12:14 WIB
72 BENY SETIYONO	31/07/2023 16:12:16 WIB
73 Eligius Tebai	31/07/2023

	16:12:17 WIB
74 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	31/07/2023 16:12:17 WIB
75 SUITO ROBA	31/07/2023 16:12:17 WIB
76 BAMBANG H. RUMNAN	31/07/2023 16:12:17 WIB
77 ABDUL RAHMAN	31/07/2023 16:12:17 WIB
78 Rul Rudolfa Mantik	31/07/2023 16:12:21 WIB
79 TANIT PRAYITNO	31/07/2023 16:12:23 WIB
80 IRWAN FAHRIA	31/07/2023 16:12:27 WIB
81 DEDDY ARPANDY	31/07/2023 16:12:32 WIB
82 RICKY HARISMA HASANUDDIN	31/07/2023 16:12:44 WIB
83 LARISMAN S. ISHAK	31/07/2023 16:12:44 WIB
84 ADNAN	31/07/2023 16:12:46 WIB
85 YUNUS SUPARLIN	31/07/2023 16:12:47 WIB
86 SLAMET RIADY SULAIMAN	31/07/2023 16:12:54 WIB
87 ASKAR	31/07/2023 16:13:09 WIB
88 HAMDANI HB.	31/07/2023 16:13:16 WIB
89 IRFAN NITI SASMITA	31/07/2023 16:13:22 WIB
90 SUBAGYO SRI UTOMO	31/07/2023 16:13:27 WIB
91 YUNU HERDIANA	31/07/2023 16:13:44 WIB
92 SERVATIUS LAWANG	

	31/07/2023 16:13:58 WIB
93 M. WAHYUDI	31/07/2023 16:14:02 WIB
94 HASAN HANAFI	31/07/2023 16:14:02 WIB
95 RAFLUS DORANGGI	31/07/2023 16:14:11 WIB
96 ARMAN	31/07/2023 16:14:15 WIB
97 SYARIPUDDIN	31/07/2023 16:14:16 WIB
98 ARMAN	31/07/2023 16:14:20 WIB
99 Parawangsah	31/07/2023 16:14:30 WIB
100 MOH. IQBAL MUHIDDIN	31/07/2023 16:14:33 WIB
101 IZWAR IDRIS	31/07/2023 16:14:33 WIB
102 NURLAILA	31/07/2023 16:14:54 WIB
103 DONNA YULIETTA SIAGIAN	31/07/2023 16:14:55 WIB
104 DONNA YULIETTA SIAGIAN	31/07/2023 16:14:57 WIB
105 Yovensius Rosarindarta	31/07/2023 16:15:11 WIB
106 MASRUN YUNUS RIVAI	31/07/2023 16:15:46 WIB
107 ASEP NANDANG	31/07/2023 16:17:09 WIB
108 Doni Bondan Wicaksono	31/07/2023 16:17:43 WIB
109 Salta Mulyadi	31/07/2023 16:19:35 WIB
110 JUNAIDI	31/07/2023 16:20:36 WIB

111 Abdu	31/07/2023 16:23:48 WIB
112 SILVANA SUSAN KUMEANG	31/07/2023 16:24:41 WIB
113 Marlyana Shanty	31/07/2023 16:24:47 WIB
114 Okto Estomihi Saragi	31/07/2023 16:25:28 WIB
115 Okto Estomihi Saragi	31/07/2023 16:25:33 WIB
116 ENDI BASRUL C.	31/07/2023 16:29:00 WIB
117 MUHAMMAD YASIN HAKIM	31/07/2023 16:47:20 WIB
118 YENI SANTI	31/07/2023 16:48:03 WIB
119 SORTAMAN SARAGIH	31/07/2023 16:48:35 WIB
120 THOMAS BILI	31/07/2023 16:52:16 WIB
121 REYNOLD BUKORSYOM	31/07/2023 17:04:09 WIB
122 DALILI	31/07/2023 17:17:13 WIB
123 RONAL BIDAR	31/07/2023 18:10:36 WIB
124 PRISKA SIREGAR	31/07/2023 18:43:15 WIB
125 BOETJE THOMAS SIMAELA	31/07/2023 18:47:36 WIB
126 Fauzi Nugraha	31/07/2023 18:48:15 WIB
127 Bima Harits Kurniawan	31/07/2023 18:48:26 WIB
128 Agus Setiadi	31/07/2023 18:48:57 WIB
129 Maruli Tua Sinaga	31/07/2023

	18:48:59 WIB
130 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	31/07/2023 18:50:24 WIB
131 Ricky K. Margono	31/07/2023 19:06:32 WIB
132 David Surya	31/07/2023 19:06:39 WIB
133 Andrew Karts Steven	31/07/2023 19:07:54 WIB
134 JIMY YANSEN	31/07/2023 19:10:50 WIB
135 RONALDO RUMNGEVOER	31/07/2023 20:25:42 WIB
136 NOVIE P MARANI	31/07/2023 20:28:25 WIB
137 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	31/07/2023 20:58:19 WIB
138 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	31/07/2023 20:58:29 WIB
139 SRI YULI HARSINI	31/07/2023 21:38:53 WIB

## Pembukaan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MAS AGUS IWAN SAPUTRA	31/07/2023 18:38:32 WIB
2	M. Fajrin	31/07/2023 18:39:15 WIB
3	AGUS TUGIMAN	31/07/2023 18:40:48 WIB
4	M. WAHYUDI	31/07/2023 18:41:02 WIB
5	Doni Bondan Wicaksono	31/07/2023 18:41:25 WIB
6	YENI SANTI	31/07/2023 18:41:39 WIB

7 Ingrith S.R Luneto	31/07/2023 18:43:00 WIB
8 SLAMET RIADY SULAIMAN	31/07/2023 18:43:09 WIB
9 YUNU HERDIANA	31/07/2023 18:43:20 WIB
10 SAID EFFENDI	31/07/2023 18:43:22 WIB
11 PRISKA SIREGAR	31/07/2023 18:43:22 WIB
12 Parawangsah	31/07/2023 18:43:26 WIB
13 METTALIA YOLANDA	31/07/2023 18:43:29 WIB
14 BAMBANG H. RUMNAN	31/07/2023 18:43:30 WIB
15 RIMHOT TURNIP	31/07/2023 18:43:31 WIB
16 YUDA ADITIA MA ATFA	31/07/2023 18:43:37 WIB
17 SILVANA SUSAN KUMEANG	31/07/2023 18:43:37 WIB
18 Rul Rudolfa Mantik	31/07/2023 18:43:40 WIB
19 SYAIFUL ANWAR	31/07/2023 18:43:42 WIB
20 MOHAMMAD ZAM RONI	31/07/2023 18:43:43 WIB
21 Marlyana Shanty	31/07/2023 18:43:48 WIB
22 MASRUN YUNUS RIVAI	31/07/2023 18:43:55 WIB
23 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	31/07/2023 18:43:56 WIB
24 ASEP NANDANG	31/07/2023 18:44:03 WIB
25 M. RUSYDANUL ANAM	31/07/2023

	18:44:04 WIB
26 ENDI BASRUL C.	31/07/2023 18:44:06 WIB
27 RUDI ZULHAM HASIBUAN	31/07/2023 18:44:07 WIB
28 MARIA ANGELIN	31/07/2023 18:44:07 WIB
29 JERICHO MANDAHARI	31/07/2023 18:44:09 WIB
30 DONY SETIO BUDI	31/07/2023 18:44:16 WIB
31 MUHAMMAD DEFRIZAL	31/07/2023 18:44:18 WIB
32 Bambang Anto Wibowo	31/07/2023 18:44:20 WIB
33 SUBAGYO SRI UTOMO	31/07/2023 18:44:22 WIB
34 Eko Supriyanto B Putro	31/07/2023 18:44:22 WIB
35 JUNIANA SIPAYUNG	31/07/2023 18:44:26 WIB
36 Eligius Tebai	31/07/2023 18:44:27 WIB
37 SEPRIZAL HAMZAH	31/07/2023 18:44:27 WIB
38 Yovensius Rosarindarta	31/07/2023 18:44:27 WIB
39 ABDUL RAHMAN	31/07/2023 18:44:35 WIB
40 Reza Ardiantori	31/07/2023 18:44:44 WIB
41 CHRISTIAN G. PIOH	31/07/2023 18:45:00 WIB
42 NURLAILA	31/07/2023 18:45:00 WIB
43 Abdu	31/07/2023 18:45:01 WIB
44 SRI SUDARTI	

	31/07/2023 18:45:08 WIB
45 Engel Bertus Tekege	31/07/2023 18:45:08 WIB
46 Emanuel Tebai	31/07/2023 18:45:15 WIB
47 LARISMAN S. ISHAK	31/07/2023 18:45:19 WIB
48 Wahyu Wagiman	31/07/2023 18:45:21 WIB
49 YEHEKIAL NATONIS	31/07/2023 18:45:23 WIB
50 SELVIANTI JOENOS	31/07/2023 18:45:27 WIB
51 Okto Estomihi Saragi	31/07/2023 18:45:27 WIB
52 Rudy Meyvo Rumengan	31/07/2023 18:45:28 WIB
53 BENY SETIYONO	31/07/2023 18:45:33 WIB
54 SARI OCTALISA	31/07/2023 18:45:37 WIB
55 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	31/07/2023 18:45:40 WIB
56 MIJOTO SOLEKAN	31/07/2023 18:45:43 WIB
57 NOVIYARTI	31/07/2023 18:45:45 WIB
58 YUNUS SUPARLIN	31/07/2023 18:45:54 WIB
59 MARINI	31/07/2023 18:46:08 WIB
60 RAFLUS DORANGGI	31/07/2023 18:46:24 WIB
61 Salta Mulyadi	31/07/2023 18:46:31 WIB
62 HERU BUDHI SUTRISNO	31/07/2023 18:46:39 WIB



63 HAMDANI HB.	31/07/2023 18:46:41 WIB
64 RIYANTO	31/07/2023 18:46:55 WIB
65 SELVIANA	31/07/2023 18:47:00 WIB
66 MUHAMMAD YASIN HAKIM	31/07/2023 18:47:01 WIB
67 JEPRI DWI PURWANTO	31/07/2023 18:47:10 WIB
68 BOETJE THOMAS SIMAELA	31/07/2023 18:47:20 WIB
69 DEDDY ARPANDY	31/07/2023 18:47:21 WIB
70 HASNI	31/07/2023 18:47:31 WIB
71 Rouli Dame Marbun	31/07/2023 18:47:48 WIB
72 ANDRI YANDANI	31/07/2023 18:47:49 WIB
73 TANIT PRAYITNO	31/07/2023 18:47:50 WIB
74 JUNAIDI	31/07/2023 18:47:59 WIB
75 DONNA YULIETTA SIAGIAN	31/07/2023 18:48:00 WIB
76 Muhammad Irwan	31/07/2023 18:48:01 WIB
77 BUDIANTA TARIGAN	31/07/2023 18:48:17 WIB
78 Fauzi Nugraha	31/07/2023 18:48:18 WIB
79 Bima Harits Kurniawan	31/07/2023 18:48:33 WIB
80 HASAN HANAFI	31/07/2023 18:48:50 WIB
81 Maruli Tua Sinaga	31/07/2023

	18:49:02 WIB
82 RAMUDDIN SIBAGARIANG	31/07/2023 18:49:07 WIB
83 RAMUDDIN SIBAGARIANG	31/07/2023 18:49:07 WIB
84 Agus Setiadi	31/07/2023 18:49:09 WIB
85 DALILI	31/07/2023 18:49:17 WIB
86 SYARIPUDDIN	31/07/2023 18:49:35 WIB
87 FIRMANSYAH	31/07/2023 18:49:42 WIB
88 YUSUF RAHMADHAN	31/07/2023 18:50:04 WIB
89 MUH. ASRATILLAH SENGE	31/07/2023 18:50:05 WIB
90 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	31/07/2023 18:50:29 WIB
91 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	31/07/2023 18:50:36 WIB
92 KOMANG PURNAMA	31/07/2023 18:50:57 WIB
93 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	31/07/2023 18:51:21 WIB
94 GERSON KOSSAY	31/07/2023 18:51:34 WIB
95 Doni Bondan Wicaksono	31/07/2023 18:53:32 WIB
96 ACHMAD BAIHAQI	31/07/2023 18:59:46 WIB
97 ANDI SYAFRIZAL	31/07/2023 19:00:21 WIB
98 THARIQA ZAHRA	31/07/2023 19:01:58 WIB
99 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	31/07/2023 19:02:12 WIB
100 Semmy Hesron Ndolu	

	31/07/2023 19:06:00 WIB
101 Ricky K. Margono	31/07/2023 19:06:34 WIB
102 AHMAD ALIFKA RAHIM	31/07/2023 19:06:41 WIB
103 David Surya	31/07/2023 19:06:47 WIB
104 Mariani Anggreini	31/07/2023 19:07:33 WIB
105 JON KENEDI	31/07/2023 19:07:51 WIB
106 Andrew Karts Steven	31/07/2023 19:07:57 WIB
107 SURAHMAD	31/07/2023 19:09:35 WIB
108 Radius Simbolon	31/07/2023 19:09:49 WIB
109 NAUFAL AFIF ALROZI	31/07/2023 19:10:09 WIB
110 JIMY YANSEN	31/07/2023 19:10:54 WIB
111 IRWAN FAHRIA	31/07/2023 19:12:27 WIB
112 SUITO ROBA	31/07/2023 19:12:43 WIB
113 ARMAN	31/07/2023 19:13:21 WIB
114 RICKY HARISMA HASANUDDIN	31/07/2023 19:15:00 WIB
115 AGUS WINARNO	31/07/2023 19:15:54 WIB
116 ASKAR	31/07/2023 19:16:14 WIB
117 IZWAR IDRIS	31/07/2023 19:17:19 WIB
118 THOMAS BILI	31/07/2023 19:18:25 WIB

119 THOMAS BILI	31/07/2023 19:18:27 WIB
120 THOMAS BILI	31/07/2023 19:18:28 WIB
121 THOMAS BILI	31/07/2023 19:18:29 WIB
122 KAMILUS LOGO	31/07/2023 19:18:45 WIB
123 SORTAMAN SARAGIH	31/07/2023 19:31:33 WIB
124 ADRI FADLY	31/07/2023 19:51:52 WIB
125 MAHIRUDDIN	31/07/2023 19:59:38 WIB
126 MOH. IQBAL MUHIDDIN	31/07/2023 20:01:02 WIB
127 REYNOLD BUKORSYOM	31/07/2023 20:02:06 WIB
128 SYAHRUL	31/07/2023 20:04:03 WIB
129 ASWAR	31/07/2023 20:05:04 WIB
130 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	31/07/2023 20:09:32 WIB
131 RONAL BIDAR	31/07/2023 20:15:31 WIB
132 RONALDO RUMNGEVOER	31/07/2023 20:25:44 WIB
133 WIDI FARIS FAUZAN	31/07/2023 20:27:26 WIB
134 NOVIE P MARANI	31/07/2023 20:28:32 WIB
135 IRFAN NITI SASMITA	31/07/2023 20:54:15 WIB
136 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	31/07/2023 20:58:28 WIB
137 ADNAN	31/07/2023

	21:23:40 WIB
138 SRI YULI HARSINI	
	31/07/2023
	21:38:56 WIB

## Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	SORTAMAN SARAGIH	31/07/2023 19:31:38 WIB
2	HASNI	31/07/2023 19:34:40 WIB
3	Rudy Meyvo Rumengan	31/07/2023 19:36:00 WIB
4	Salta Mulyadi	31/07/2023 19:39:18 WIB
5	CHRISTIAN G. PIOH	31/07/2023 19:39:28 WIB
6	SRI SUDARTI	31/07/2023 19:39:56 WIB
7	MIJOTO SOLEKAN	31/07/2023 19:40:22 WIB
8	OTOPIANUS P TEBAI	31/07/2023 19:41:33 WIB
9	Rouli Dame Marbun	31/07/2023 19:42:07 WIB
10	NOVELIA INDRI RAMANDEY	31/07/2023 19:42:33 WIB
11	Okto Estomihi Saragi	31/07/2023 19:42:46 WIB
12	Engel Bertus Tekege	31/07/2023 19:42:54 WIB
13	ASEP NANDANG	31/07/2023 19:44:26 WIB
14	ASEP NANDANG	31/07/2023 19:44:27 WIB
15	SARI OCTALISA	31/07/2023 19:44:33 WIB

16 MARINI	31/07/2023 19:46:03 WIB
17 ANDRI YANDANI	31/07/2023 19:46:48 WIB
18 Fauzi Nugraha	31/07/2023 19:48:15 WIB
19 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	31/07/2023 19:50:46 WIB
20 ADRI FADLY	31/07/2023 19:52:12 WIB
21 MAS AGUS IWAN SAPUTRA	31/07/2023 19:53:32 WIB
22 METTALIA YOLANDA	31/07/2023 19:54:46 WIB
23 MAHIRUDDIN	31/07/2023 19:59:46 WIB
24 MARIA ANGELIN	31/07/2023 19:59:57 WIB
25 SYARIPUDDIN	31/07/2023 20:00:08 WIB
26 YUNU HERDIANA	31/07/2023 20:00:51 WIB
27 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	31/07/2023 20:00:57 WIB
28 MOH. IQBAL MUHIDDIN	31/07/2023 20:01:09 WIB
29 KOMANG PURNAMA	31/07/2023 20:01:13 WIB
30 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	31/07/2023 20:01:19 WIB
31 MOHAMMAD ZAM RONI	31/07/2023 20:01:31 WIB
32 REYNOLD BUKORSYOM	31/07/2023 20:02:15 WIB
33 JEPRI DWI PURWANTO	31/07/2023 20:02:30 WIB
34 THOMAS BILI	31/07/2023

	20:03:17 WIB
35 RIYANTO	31/07/2023 20:03:27 WIB
36 Eko Supriyanto B Putro	31/07/2023 20:03:57 WIB
37 ASWAR	31/07/2023 20:05:08 WIB
38 Rul Rudolfa Mantik	31/07/2023 20:05:22 WIB
39 SYAHRUL	31/07/2023 20:05:48 WIB
40 BUDIANTA TARIGAN	31/07/2023 20:07:24 WIB
41 LARISMAN S. ISHAK	31/07/2023 20:07:45 WIB
42 Wahyu Wagiman	31/07/2023 20:07:52 WIB
43 Parawangsah	31/07/2023 20:07:57 WIB
44 SYAIFUL ANWAR	31/07/2023 20:07:58 WIB
45 GERSON KOSSAY	31/07/2023 20:08:00 WIB
46 Radius Simbolon	31/07/2023 20:08:01 WIB
47 SEPRIZAL HAMZAH	31/07/2023 20:08:15 WIB
48 THARIQA ZAHRA	31/07/2023 20:09:26 WIB
49 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	31/07/2023 20:09:37 WIB
50 FIRMANSYAH	31/07/2023 20:09:41 WIB
51 Yovensius Rosarindarta	31/07/2023 20:09:55 WIB
52 TANIT PRAYITNO	31/07/2023 20:10:26 WIB
53 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	

	31/07/2023 20:10:55 WIB
54 AGUS WINARNO	31/07/2023 20:10:55 WIB
55 MUHAMMAD YASIN HAKIM	31/07/2023 20:11:05 WIB
56 YUSUF RAHMADHAN	31/07/2023 20:11:50 WIB
57 RAFLUS DORANGGI	31/07/2023 20:12:01 WIB
58 BENY SETIYONO	31/07/2023 20:12:38 WIB
59 MASRUN YUNUS RIVAL	31/07/2023 20:13:32 WIB
60 Maruli Tua Sinaga	31/07/2023 20:13:33 WIB
61 BAMBANG H. RUMNAN	31/07/2023 20:13:37 WIB
62 RUDI ZULHAM HASIBUAN	31/07/2023 20:13:39 WIB
63 Bambang Anto Wibowo	31/07/2023 20:13:49 WIB
64 ACHMAD BAIHAQI	31/07/2023 20:14:02 WIB
65 ARMAN	31/07/2023 20:14:35 WIB
66 RIMHOT TURNIP	31/07/2023 20:14:42 WIB
67 NURLAILA	31/07/2023 20:15:08 WIB
68 M. RUSYDANUL ANAM	31/07/2023 20:15:31 WIB
69 Ingrith S.R Luneto	31/07/2023 20:15:42 WIB
70 MUHAMMAD DEFRIZAL	31/07/2023 20:15:44 WIB
71 PRISKA SIREGAR	31/07/2023 20:16:02 WIB



72 RONAL BIDAR	31/07/2023 20:16:03 WIB
73 Reza Ardiantori	31/07/2023 20:16:12 WIB
74 YUDA ADITIA MA ATFA	31/07/2023 20:16:35 WIB
75 SAID EFFENDI	31/07/2023 20:18:09 WIB
76 IZWAR IDRIS	31/07/2023 20:18:24 WIB
77 SURAHMAD	31/07/2023 20:19:56 WIB
78 Muhammad Irwan	31/07/2023 20:20:09 WIB
79 RONALDO RUMNGEVOER	31/07/2023 20:25:46 WIB
80 Agus Setiadi	31/07/2023 20:26:57 WIB
81 Agus Setiadi	31/07/2023 20:27:05 WIB
82 WIDI FARIS FAUZAN	31/07/2023 20:27:45 WIB
83 ABDUL RAHMAN	31/07/2023 20:28:05 WIB
84 NOVIE P MARANI	31/07/2023 20:28:43 WIB
85 ENDI BASRUL C.	31/07/2023 20:30:26 WIB
86 Andrew Karts Steven	31/07/2023 20:30:43 WIB
87 ASKAR	31/07/2023 20:42:07 WIB
88 JIMY YANSEN	31/07/2023 20:45:38 WIB
89 HERU BUDHI SUTRISNO	31/07/2023 20:46:02 WIB
90 SUBAGYO SRI UTOMO	31/07/2023

91 HASAN HANAFI	20:46:59 WIB
	31/07/2023
	20:47:44 WIB
92 ANDI SYAFRIZAL	
	31/07/2023
	20:52:21 WIB
93 IRFAN NITI SASMITA	
	31/07/2023
	20:54:21 WIB
94 NOVIYARTI	
	31/07/2023
	20:57:21 WIB
95 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	
	31/07/2023
	20:58:34 WIB
96 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	
	31/07/2023
	20:59:01 WIB
97 Marlyana Shanty	
	31/07/2023
	21:03:36 WIB
98 RICKY HARISMA HASANUDDIN	
	31/07/2023
	21:15:24 WIB
99 NAUFAL AFIF ALROZI	
	31/07/2023
	21:16:04 WIB
100 AHMAD ALIFKA RAHIM	
	31/07/2023
	21:17:11 WIB
101 Doni Bondan Wicaksono	
	31/07/2023
	21:18:09 WIB
102 IRWAN FAHRIA	
	31/07/2023
	21:19:18 WIB
103 ADNAN	
	31/07/2023
	21:23:45 WIB
104 Semmy Hesron Ndolu	
	31/07/2023
	21:28:47 WIB
105 SRI YULI HARSINI	
	31/07/2023
	21:39:02 WIB

## Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ABDUL RAHMAN	01/08/2023 07:31:22 WIB

2 HASAN HANAFI	01/08/2023 07:34:16 WIB
3 ANDRI YANDANI	01/08/2023 07:34:44 WIB
4 MAS AGUS IWAN SAPUTRA	01/08/2023 07:34:47 WIB
5 SEPRIZAL HAMZAH	01/08/2023 07:35:33 WIB
6 Mariyana Shanty	01/08/2023 07:35:34 WIB
7 David Surya	01/08/2023 07:35:53 WIB
8 JERICHO MANDAHARI	01/08/2023 07:36:42 WIB
9 ENDI BASRUL C.	01/08/2023 07:37:01 WIB
10 SLAMET RIADY SULAIMAN	01/08/2023 07:37:25 WIB
11 Mariani Anggreini	01/08/2023 07:37:29 WIB
12 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	01/08/2023 07:37:38 WIB
13 DONNA YULIETTA SIAGIAN	01/08/2023 07:38:02 WIB
14 Maruli Tua Sinaga	01/08/2023 07:38:03 WIB
15 Muhammad Irwan	01/08/2023 07:38:12 WIB
16 Muhammad Irwan	01/08/2023 07:38:12 WIB
17 ADRI FADLY	01/08/2023 07:38:17 WIB
18 SURAHMAD	01/08/2023 07:38:39 WIB
19 SYARIPUDDIN	01/08/2023 07:38:56 WIB
20 NURLAILA	01/08/2023

	07:38:58 WIB
21 METTALIA YOLANDA	01/08/2023 07:39:02 WIB
22 M. Fajrin	01/08/2023 07:39:22 WIB
23 HERU BUDHI SUTRISNO	01/08/2023 07:39:51 WIB
24 YUNU HERDIANA	01/08/2023 07:39:56 WIB
25 Eko Supriyanto B Putro	01/08/2023 07:40:08 WIB
26 ASEP NANDANG	01/08/2023 07:40:52 WIB
27 ASEP NANDANG	01/08/2023 07:40:52 WIB
28 TANIT PRAYITNO	01/08/2023 07:40:53 WIB
29 BAMBANG H. RUMNAN	01/08/2023 07:40:55 WIB
30 MAHIRUDDIN	01/08/2023 07:41:25 WIB
31 MARIA ANGELIN	01/08/2023 07:41:28 WIB
32 RIMHOT TURNIP	01/08/2023 07:41:43 WIB
33 AGUS TUGIMAN	01/08/2023 07:41:50 WIB
34 Doni Bondan Wicaksono	01/08/2023 07:41:55 WIB
35 PRISKA SIREGAR	01/08/2023 07:42:06 WIB
36 AGUS WINARNO	01/08/2023 07:42:21 WIB
37 Agus Setiadi	01/08/2023 07:42:23 WIB
38 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	01/08/2023 07:43:01 WIB
39 MOHAMMAD ZAM RONI	

	01/08/2023 07:43:12 WIB
40 Bima Harits Kurniawan	
	01/08/2023 07:44:11 WIB
41 ACHMAD BAIHAQI	
	01/08/2023 07:44:11 WIB
42 CHRISTIAN G. PIOH	
	01/08/2023 07:44:15 WIB
43 RAMUDDIN SIBAGARIANG	
	01/08/2023 07:45:15 WIB
44 RAMUDDIN SIBAGARIANG	
	01/08/2023 07:45:15 WIB
45 M. RUSYDANUL ANAM	
	01/08/2023 07:45:20 WIB
46 SRI YULI HARSINI	
	01/08/2023 07:45:21 WIB
47 MIJOTO SOLEKAN	
	01/08/2023 07:45:24 WIB
48 SARI OCTALISA	
	01/08/2023 07:45:34 WIB
49 Parawangsah	
	01/08/2023 07:45:57 WIB
50 MUHAMMAD DEFRIZAL	
	01/08/2023 07:46:02 WIB
51 SELVIANTI JOENoes	
	01/08/2023 07:46:07 WIB
52 Salta Mulyadi	
	01/08/2023 07:46:08 WIB
53 REYNOLD BUKORSYOM	
	01/08/2023 07:46:25 WIB
54 Bambang Anto Wibowo	
	01/08/2023 07:46:29 WIB
55 Yovensius Rosarindarta	
	01/08/2023 07:46:38 WIB
56 Rouli Dame Marbun	
	01/08/2023 07:46:42 WIB
57 SYAIFUL ANWAR	
	01/08/2023 07:46:47 WIB

58 JUNIANA SIPAYUNG	01/08/2023 07:46:51 WIB
59 JEPRI DWI PURWANTO	01/08/2023 07:47:17 WIB
60 YUNUS SUPARLIN	01/08/2023 07:47:25 WIB
61 M. WAHYUDI	01/08/2023 07:47:25 WIB
62 YENI SANTI	01/08/2023 07:47:31 WIB
63 YUDA ADITIA MA ATFA	01/08/2023 07:47:51 WIB
64 SRI SUDARTI	01/08/2023 07:47:55 WIB
65 BENY SETIYONO	01/08/2023 07:48:12 WIB
66 SELVIANA	01/08/2023 07:48:13 WIB
67 Rudy Meyvo Rumengan	01/08/2023 07:48:21 WIB
68 SUI TO ROBA	01/08/2023 07:48:42 WIB
69 SUBAGYO SRI UTOMO	01/08/2023 07:48:53 WIB
70 RAFLUS DORANGGI	01/08/2023 07:48:57 WIB
71 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	01/08/2023 07:49:00 WIB
72 WIDI FARIS FAUZAN	01/08/2023 07:49:03 WIB
73 DONY SETIO BUDI	01/08/2023 07:49:09 WIB
74 JON KENEDI	01/08/2023 07:49:21 WIB
75 THARIQA ZAHRA	01/08/2023 07:49:33 WIB
76 SYAHRUL	01/08/2023

	07:49:45 WIB
77 Fauzi Nugraha	01/08/2023 07:49:57 WIB
78 Semmy Hesron Ndolu	01/08/2023 07:50:09 WIB
79 Inggrith S.R Luneto	01/08/2023 07:50:17 WIB
80 THOMAS BILI	01/08/2023 07:50:31 WIB
81 RIYANTO	01/08/2023 07:50:44 WIB
82 Rul Rudolfa Mantik	01/08/2023 07:50:49 WIB
83 OTOPIANUS P TEBAI	01/08/2023 07:51:02 WIB
84 HAMDANI HB.	01/08/2023 07:51:04 WIB
85 KOMANG PURNAMA	01/08/2023 07:51:16 WIB
86 ARMAN	01/08/2023 07:51:18 WIB
87 Engel Bertus Tekege	01/08/2023 07:51:40 WIB
88 FIRMANSYAH	01/08/2023 07:51:43 WIB
89 RINDAYU SITOMPUL	01/08/2023 07:51:45 WIB
90 YUSUF RAHMADHAN	01/08/2023 07:52:10 WIB
91 KAMILUS LOGO	01/08/2023 07:52:11 WIB
92 NOVELIA INDRI RAMANDEY	01/08/2023 07:52:19 WIB
93 ASWAR	01/08/2023 07:52:39 WIB
94 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	01/08/2023 07:52:42 WIB
95 HASNI	

	01/08/2023 07:52:52 WIB
96 NOVIYARTI	01/08/2023 07:53:36 WIB
97 BUDIANTA TARIGAN	01/08/2023 07:54:49 WIB
98 Reza Ardiantori	01/08/2023 07:55:21 WIB
99 IZWAR IDRIS	01/08/2023 07:55:32 WIB
100 RUDI ZULHAM HASIBUAN	01/08/2023 07:55:45 WIB
101 ANDI SYAFRIZAL	01/08/2023 07:55:48 WIB
102 MUHAMMAD YASIN HAKIM	01/08/2023 07:56:15 WIB
103 LARISMAN S. ISHAK	01/08/2023 07:56:18 WIB
104 MUH. ASRATILLAH SENGE	01/08/2023 07:56:38 WIB
105 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	01/08/2023 07:56:41 WIB
106 BOETJE THOMAS SIMAELA	01/08/2023 07:57:00 WIB
107 MASRUN YUNUS RIVAI	01/08/2023 07:57:01 WIB
108 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	01/08/2023 07:57:04 WIB
109 IRFAN NITI SASMITA	01/08/2023 07:57:17 WIB
110 MOH. IQBAL MUHIDDIN	01/08/2023 07:57:26 WIB
111 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	01/08/2023 07:57:48 WIB
112 IRWAN FAHRIA	01/08/2023 07:57:52 WIB
113 MARINI	01/08/2023 07:58:54 WIB



114 Okto Estomihi Saragi	01/08/2023 07:59:27 WIB
115 GERSON KOSSAY	01/08/2023 08:01:57 WIB
116 Andrew Karts Steven	01/08/2023 08:04:22 WIB
117 DALILI	01/08/2023 08:04:25 WIB
118 RICKY HARISMA HASANUDDIN	01/08/2023 08:06:07 WIB
119 AHMAD ALIFKA RAHIM	01/08/2023 08:06:38 WIB
120 Radius Simbolon	01/08/2023 08:07:05 WIB
121 RONAL BIDAR	01/08/2023 08:13:24 WIB
122 SAID EFFENDI	01/08/2023 08:19:44 WIB
123 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	01/08/2023 08:27:34 WIB
124 SORTAMAN SARAGIH	01/08/2023 08:29:57 WIB
125 Abdu	01/08/2023 08:31:29 WIB
126 Wahyu Wagiman	01/08/2023 08:32:10 WIB
127 Ricky K. Margono	01/08/2023 08:42:24 WIB
128 NAUFAL AFIF ALROZI	01/08/2023 08:43:18 WIB
129 JIMY YANSEN	01/08/2023 08:43:46 WIB
130 ASKAR	01/08/2023 09:04:25 WIB

**Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	RINDAYU SITOMPUL	01/08/2023 10:00:42 WIB
2	HASAN HANAFI	01/08/2023 10:00:45 WIB
3	JIMY YANSEN	01/08/2023 10:01:44 WIB
4	SEPRIZAL HAMZAH	01/08/2023 10:02:21 WIB
5	GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	01/08/2023 10:02:51 WIB
6	AGUS WINARNO	01/08/2023 10:03:13 WIB
7	JUNAIDI	01/08/2023 10:03:23 WIB
8	Saita Mulyadi	01/08/2023 10:03:43 WIB
9	YUNU HERDIANA	01/08/2023 10:03:52 WIB
10	SUITO ROBA	01/08/2023 10:03:59 WIB
11	Radius Simbolon	01/08/2023 10:05:48 WIB
12	ACHMAD BAIHAQI	01/08/2023 10:05:52 WIB
13	FIRMANSYAH	01/08/2023 10:06:17 WIB
14	OTOPIANUS P TEBAI	01/08/2023 10:06:27 WIB
15	NOVIYARTI	01/08/2023 10:06:30 WIB
16	Bambang Anto Wibowo	01/08/2023 10:06:35 WIB
17	Eko Supriyanto B Putro	01/08/2023 10:06:43 WIB
18	RIMHOT TURNIP	

	01/08/2023 10:06:46 WIB
19 M. WAHYUDI	01/08/2023 10:06:47 WIB
20 AGUS TUGIMAN	01/08/2023 10:06:59 WIB
21 Rouli Dame Marbun	01/08/2023 10:07:02 WIB
22 PRISKA SIREGAR	01/08/2023 10:07:12 WIB
23 SELVIANA	01/08/2023 10:07:14 WIB
24 ENDI BASRUL C.	01/08/2023 10:07:14 WIB
25 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	01/08/2023 10:07:16 WIB
26 NOVELIA INDRI RAMANDEY	01/08/2023 10:07:40 WIB
27 BAMBANG H. RUMNAN	01/08/2023 10:08:41 WIB
28 ARMAN	01/08/2023 10:09:37 WIB
29 HERU BUDHI SUTRISNO	01/08/2023 10:09:40 WIB
30 BUDIANTA TARIGAN	01/08/2023 10:09:46 WIB
31 Parawangсах	01/08/2023 10:09:54 WIB
32 NURLAILA	01/08/2023 10:10:11 WIB
33 CHRISTIAN G. PIOH	01/08/2023 10:10:15 WIB
34 MARIA ANGELIN	01/08/2023 10:10:15 WIB
35 MAHIRUDDIN	01/08/2023 10:10:21 WIB
36 RONAL BIDAR	01/08/2023 10:10:21 WIB

37 Reza Ardiantori	01/08/2023 10:10:24 WIB
38 TANIT PRAYITNO	01/08/2023 10:10:29 WIB
39 M. RUSYDANUL ANAM	01/08/2023 10:10:30 WIB
40 GERSON KOSSAY	01/08/2023 10:10:32 WIB
41 RIYANTO	01/08/2023 10:10:32 WIB
42 RAFLUS DORANGGI	01/08/2023 10:10:35 WIB
43 MASRUN YUNUS RIVAI	01/08/2023 10:10:37 WIB
44 SURAHMAD	01/08/2023 10:10:42 WIB
45 RAMUDDIN SIBAGARIANG	01/08/2023 10:10:44 WIB
46 RAMUDDIN SIBAGARIANG	01/08/2023 10:10:44 WIB
47 SRI SUDARTI	01/08/2023 10:10:53 WIB
48 HASNI	01/08/2023 10:10:54 WIB
49 IRFAN NITI SASMITA	01/08/2023 10:10:55 WIB
50 MARINI	01/08/2023 10:10:56 WIB
51 YUSUF RAHMADHAN	01/08/2023 10:11:03 WIB
52 MUHAMMAD DEFRIZAL	01/08/2023 10:11:05 WIB
53 BENY SETIYONO	01/08/2023 10:11:09 WIB
54 THARIQA ZAHRA	01/08/2023 10:11:10 WIB
55 LARISMAN S. ISHAK	01/08/2023

	10:11:11 WIB
56 JEPRI DWI PURWANTO	01/08/2023 10:11:12 WIB
57 Marlyana Shanty	01/08/2023 10:11:16 WIB
58 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	01/08/2023 10:11:17 WIB
59 YUSUF RAHMADHAN	01/08/2023 10:11:19 WIB
60 KOMANG PURNAMA	01/08/2023 10:11:19 WIB
61 ADRI FADLY	01/08/2023 10:11:27 WIB
62 JERICHO MANDAHARI	01/08/2023 10:11:28 WIB
63 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	01/08/2023 10:11:29 WIB
64 IZWAR IDRIS	01/08/2023 10:11:32 WIB
65 MAS AGUS IWAN SAPUTRA	01/08/2023 10:11:37 WIB
66 SYARIPUDDIN	01/08/2023 10:11:38 WIB
67 ABDUL RAHMAN	01/08/2023 10:11:40 WIB
68 SUBAGYO SRI UTOMO	01/08/2023 10:11:40 WIB
69 Rudy Meyvo Rumengan	01/08/2023 10:11:50 WIB
70 Okto Estomihi Saragi	01/08/2023 10:11:52 WIB
71 SYAIFUL ANWAR	01/08/2023 10:11:52 WIB
72 MUH. ASRATILLAH SENGE	01/08/2023 10:11:58 WIB
73 THOMAS BILI	01/08/2023 10:12:01 WIB
74 THOMAS BILI	

	01/08/2023 10:12:03 WIB
75 SYAHRUL	01/08/2023 10:12:03 WIB
76 THOMAS BILI	01/08/2023 10:12:04 WIB
77 Engel Bertus Tekege	01/08/2023 10:12:24 WIB
78 Rul Rudolfa Mantik	01/08/2023 10:12:27 WIB
79 MOHAMMAD ZAM RONI	01/08/2023 10:12:51 WIB
80 JON KENEDI	01/08/2023 10:12:55 WIB
81 Doni Bondan Wicaksono	01/08/2023 10:12:56 WIB
82 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	01/08/2023 10:12:59 WIB
83 ANDRI YANDANI	01/08/2023 10:13:05 WIB
84 Abdu	01/08/2023 10:13:08 WIB
85 Agus Setiadi	01/08/2023 10:13:10 WIB
86 SILVANA SUSAN KUMEANG	01/08/2023 10:13:17 WIB
87 SILVANA SUSAN KUMEANG	01/08/2023 10:13:17 WIB
88 M. Fajrin	01/08/2023 10:13:19 WIB
89 YENI SANTI	01/08/2023 10:13:21 WIB
90 Fauzi Nugraha	01/08/2023 10:13:22 WIB
91 SELVIANTI JOENOES	01/08/2023 10:13:24 WIB
92 Ricky K. Margono	01/08/2023 10:13:29 WIB

93 YENI SANTI	01/08/2023 10:13:34 WIB
94 SARI OCTALISA	01/08/2023 10:13:41 WIB
95 SAID EFFENDI	01/08/2023 10:13:41 WIB
96 MUHAMMAD YASIN HAKIM	01/08/2023 10:13:51 WIB
97 Yovensius Rosarindarta	01/08/2023 10:13:54 WIB
98 YUSUF RAHMADHAN	01/08/2023 10:13:58 WIB
99 Semmy Hesron Ndolu	01/08/2023 10:14:05 WIB
100 SLAMET RIADY SULAIMAN	01/08/2023 10:14:23 WIB
101 DALILI	01/08/2023 10:14:36 WIB
102 Inggrith S.R Luneto	01/08/2023 10:14:42 WIB
103 Andrew Karts Steven	01/08/2023 10:15:06 WIB
104 ASWAR	01/08/2023 10:15:51 WIB
105 RICKY HARISMA HASANUDDIN	01/08/2023 10:16:07 WIB
106 ANDI SYAFRIZAL	01/08/2023 10:16:37 WIB
107 MIJOTO SOLEKAN	01/08/2023 10:16:38 WIB
108 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	01/08/2023 10:17:35 WIB
109 METTALIA YOLANDA	01/08/2023 10:18:03 WIB
110 REYNOLD BUKORSYOM	01/08/2023 10:18:56 WIB
111 YUDA ADITIA MA ATFA	01/08/2023

	10:19:15 WIB
112 Muhammad Irwan	01/08/2023 10:19:44 WIB
113 David Surya	01/08/2023 10:20:25 WIB
114 Maruli Tua Sinaga	01/08/2023 10:21:31 WIB
115 HAMDANI HB.	01/08/2023 10:21:48 WIB
116 YUNUS SUPARLIN	01/08/2023 10:23:46 WIB
117 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	01/08/2023 10:23:46 WIB
118 MOH. IQBAL MUHIDDIN	01/08/2023 10:31:40 WIB
119 NOVIE P MARANI	01/08/2023 10:40:03 WIB
120 NAUFAL AFIF ALROZI	01/08/2023 10:48:09 WIB
121 NAUFAL AFIF ALROZI	01/08/2023 10:48:20 WIB
122 WIDI FARIS FAUZAN	01/08/2023 11:04:45 WIB
123 RONALDO RUMNGEVOER	01/08/2023 11:06:07 WIB
124 BOETJE THOMAS SIMAELA	01/08/2023 11:18:43 WIB
125 Bima Harits Kurniawan	01/08/2023 11:19:38 WIB
126 Wahyu Wagiman	01/08/2023 11:20:42 WIB
127 DONY SETIO BUDI	01/08/2023 11:29:53 WIB
128 DONNA YULIETTA SIAGIAN	01/08/2023 11:31:25 WIB
129 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	01/08/2023 11:57:54 WIB



## Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	PRISKA SIREGAR	01/08/2023 13:01:33 WIB
2	Marlyana Shanty	01/08/2023 13:02:29 WIB
3	SYARIPUDDIN	01/08/2023 13:03:16 WIB
4	MARIA ANGELIN	01/08/2023 13:03:25 WIB
5	HERU BUDHI SUTRISNO	01/08/2023 13:03:29 WIB
6	YUNU HERDIANA	01/08/2023 13:04:08 WIB
7	ASEP NANDANG	01/08/2023 13:04:12 WIB
8	ASEP NANDANG	01/08/2023 13:04:12 WIB
9	Reza Ardiantori	01/08/2023 13:04:22 WIB
10	ANDRI YANDANI	01/08/2023 13:04:38 WIB
11	Rul Rudolfa Mantik	01/08/2023 13:04:50 WIB
12	YUDA ADITIA MA ATFA	01/08/2023 13:05:09 WIB
13	TANIT PRAYITNO	01/08/2023 13:05:10 WIB
14	MAS AGUS IWAN SAPUTRA	01/08/2023 13:05:20 WIB
15	FIRMANSYAH	01/08/2023 13:05:33 WIB
16	Doni Bondan Wicaksono	01/08/2023 13:05:34 WIB
17	SEPTIYANA WIDIYASTUTI	01/08/2023 13:06:15 WIB

18 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	01/08/2023 13:06:15 WIB
19 RAFLUS DORANGGI	01/08/2023 13:06:16 WIB
20 JEPRI DWI PURWANTO	01/08/2023 13:06:24 WIB
21 SURAHMAD	01/08/2023 13:06:57 WIB
22 REYNOLD BUKORSYOM	01/08/2023 13:06:59 WIB
23 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	01/08/2023 13:07:03 WIB
24 NURLAILA	01/08/2023 13:07:29 WIB
25 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	01/08/2023 13:07:31 WIB
26 M. Fajrin	01/08/2023 13:07:36 WIB
27 AGUS TUGIMAN	01/08/2023 13:07:46 WIB
28 AGUS TUGIMAN	01/08/2023 13:07:46 WIB
29 OTOPIANUS P TEBAI	01/08/2023 13:08:18 WIB
30 YUSUF RAHMADHAN	01/08/2023 13:08:23 WIB
31 RIMHOT TURNIP	01/08/2023 13:08:23 WIB
32 THARIQA ZAHRA	01/08/2023 13:08:26 WIB
33 SEPRIZAL HAMZAH	01/08/2023 13:08:30 WIB
34 Maruli Tua Sinaga	01/08/2023 13:08:49 WIB
35 BUDIANTA TARIGAN	01/08/2023 13:08:53 WIB
36 MUHAMMAD DEFRIZAL	01/08/2023

	13:08:59 WIB
37 DONNA YULIETTA SIAGIAN	01/08/2023 13:09:35 WIB
38 YENI SANTI	01/08/2023 13:09:37 WIB
39 AGUS WINARNO	01/08/2023 13:09:38 WIB
40 Eko Supriyanto B Putro	01/08/2023 13:09:42 WIB
41 RINDAYU SITOMPUL	01/08/2023 13:09:52 WIB
42 BENY SETIYONO	01/08/2023 13:10:00 WIB
43 GERSON KOSSAY	01/08/2023 13:10:00 WIB
44 ACHMAD BAIHAQI	01/08/2023 13:10:10 WIB
45 JUNIANA SIPAYUNG	01/08/2023 13:10:14 WIB
46 Bambang Anto Wibowo	01/08/2023 13:10:17 WIB
47 SLAMET RIADY SULAIMAN	01/08/2023 13:10:46 WIB
48 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	01/08/2023 13:10:53 WIB
49 SELVIANTI JOENONES	01/08/2023 13:10:56 WIB
50 CHRISTIAN G. PIOH	01/08/2023 13:10:57 WIB
51 YUNUS SUPARLIN	01/08/2023 13:11:02 WIB
52 THOMAS BILI	01/08/2023 13:11:05 WIB
53 THOMAS BILI	01/08/2023 13:11:06 WIB
54 Salta Mulyadi	01/08/2023 13:11:06 WIB
55 SYAHRUL	

	01/08/2023 13:11:07 WIB
56 THOMAS BILI	
	01/08/2023 13:11:07 WIB
57 Parawangsah	
	01/08/2023 13:11:08 WIB
58 THOMAS BILI	
	01/08/2023 13:11:08 WIB
59 THOMAS BILI	
	01/08/2023 13:11:09 WIB
60 ANDI SYAFRIZAL	
	01/08/2023 13:11:26 WIB
61 KAMILUS LOGO	
	01/08/2023 13:11:38 WIB
62 MOHAMMAD ZAM RONI	
	01/08/2023 13:11:39 WIB
63 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	
	01/08/2023 13:12:05 WIB
64 DEDDY ARPANDY	
	01/08/2023 13:12:18 WIB
65 JERICHO MANDAHARI	
	01/08/2023 13:12:22 WIB
66 ARMAN	
	01/08/2023 13:12:32 WIB
67 BAMBANG H. RUMNAN	
	01/08/2023 13:12:32 WIB
68 HASNI	
	01/08/2023 13:12:51 WIB
69 SUITO ROBA	
	01/08/2023 13:13:06 WIB
70 SELVIANA	
	01/08/2023 13:13:21 WIB
71 RIYANTO	
	01/08/2023 13:13:29 WIB
72 ENDI BASRUL C.	
	01/08/2023 13:13:36 WIB
73 ABDUL RAHMAN	
	01/08/2023 13:13:43 WIB

74 RAMUDDIN SIBAGARIANG	01/08/2023 13:13:56 WIB
75 RAMUDDIN SIBAGARIANG	01/08/2023 13:13:57 WIB
76 Andrew Karts Steven	01/08/2023 13:14:17 WIB
77 Rudy Meyvo Rumengan	01/08/2023 13:15:52 WIB
78 IRFAN NITI SASMITA	01/08/2023 13:16:10 WIB
79 KOMANG PURNAMA	01/08/2023 13:16:35 WIB
80 ADRI FADLY	01/08/2023 13:16:48 WIB
81 HAMDANI HB.	01/08/2023 13:16:56 WIB
82 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	01/08/2023 13:18:28 WIB
83 IRWAN FAHRIA	01/08/2023 13:18:44 WIB
84 Rouli Dame Marbun	01/08/2023 13:18:58 WIB
85 NOVIYARTI	01/08/2023 13:19:09 WIB
86 Inggrith S.R Luneto	01/08/2023 13:19:21 WIB
87 ASWAR	01/08/2023 13:19:26 WIB
88 SRI SUDARTI	01/08/2023 13:20:02 WIB
89 JON KENEDI	01/08/2023 13:20:10 WIB
90 SUBAGYO SRI UTOMO	01/08/2023 13:20:16 WIB
91 Abdu	01/08/2023 13:20:18 WIB
92 LARISMAN S. ISHAK	01/08/2023

	13:20:42 WIB
93 SRI YULI HARSINI	01/08/2023 13:22:43 WIB
94 M. RUSYDANUL ANAM	01/08/2023 13:22:47 WIB
95 MIJOTO SOLEKAN	01/08/2023 13:22:58 WIB
96 SYAIFUL ANWAR	01/08/2023 13:23:14 WIB
97 Yovensius Rosarindarta	01/08/2023 13:24:54 WIB
98 MAHIRUDDIN	01/08/2023 13:25:37 WIB
99 DALILI	01/08/2023 13:26:17 WIB
100 Engel Bertus Tekege	01/08/2023 13:26:30 WIB
101 SARI OCTALISA	01/08/2023 13:28:41 WIB
102 MARINI	01/08/2023 13:29:04 WIB
103 AHMAD ALIFKA RAHIM	01/08/2023 13:30:32 WIB
104 Muhammad Irwan	01/08/2023 13:31:10 WIB
105 MASRUN YUNUS RIVAI	01/08/2023 13:31:49 WIB
106 Mariani Anggreini	01/08/2023 13:32:08 WIB
107 SAID EFFENDI	01/08/2023 13:32:14 WIB
108 Okto Estomihi Saragi	01/08/2023 13:33:09 WIB
109 M. WAHYUDI	01/08/2023 13:33:53 WIB
110 JUNAI DI	01/08/2023 13:34:46 WIB
111 RONAL BIDAR	

	01/08/2023 13:35:05 WIB
112 MUHAMMAD YASIN HAKIM	01/08/2023 13:35:28 WIB
113 NOVELIA INDRI RAMANDEY	01/08/2023 13:37:41 WIB
114 IZWAR IDRIS	01/08/2023 13:39:48 WIB
115 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	01/08/2023 13:40:31 WIB
116 METTALIA YOLANDA	01/08/2023 13:42:44 WIB
117 David Surya	01/08/2023 13:42:59 WIB
118 MUH. ASRATILLAH SENGE	01/08/2023 13:43:12 WIB
119 RUDI ZULHAM HASIBUAN	01/08/2023 13:46:58 WIB
120 Agus Setiadi	01/08/2023 13:50:33 WIB
121 ASKAR	01/08/2023 13:50:44 WIB
122 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	01/08/2023 13:53:56 WIB
123 WIDI FARIS FAUZAN	01/08/2023 13:57:41 WIB
124 ADNAN	01/08/2023 14:01:50 WIB
125 MOH. IQBAL MUHIDDIN	01/08/2023 14:02:42 WIB
126 Semmy Hesron Ndolu	01/08/2023 14:05:49 WIB
127 DONY SETIO BUDI	01/08/2023 14:10:30 WIB
128 NAUFAL AFIF ALROZI	01/08/2023 14:21:47 WIB
129 Ricky K. Margono	01/08/2023 14:25:48 WIB

130 Wahyu Wagiman	01/08/2023 14:32:25 WIB
131 RADIUS SIMBOLON	01/08/2023 14:32:54 WIB
132 RICKY HARISMA HASANUDDIN	01/08/2023 14:40:07 WIB
133 JIMY YANSEN	01/08/2023 14:42:47 WIB
134 HASAN HANAFI	01/08/2023 14:44:29 WIB

## Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Ardiantori	02/08/2023 08:33:22 WIB
2	YUNU HERDIANA	02/08/2023 08:33:32 WIB
3	SUBAGYO SRI UTOMO	02/08/2023 08:35:33 WIB
4	HERU BUDHI SUTRISNO	02/08/2023 08:36:28 WIB
5	Mariyana Shanty	02/08/2023 08:37:49 WIB
6	Doni Bondan Wicaksono	02/08/2023 08:37:55 WIB
7	ENDI BASRUL C.	02/08/2023 08:38:09 WIB
8	BENY SETIYONO	02/08/2023 08:38:20 WIB
9	JIMY YANSEN	02/08/2023 08:38:40 WIB
10	SLAMET RIADY SULAIMAN	02/08/2023 08:38:57 WIB
11	SYARIPUDDIN	02/08/2023 08:39:03 WIB



12 Bambang Anto Wibowo	02/08/2023 08:39:08 WIB
13 Bima Harits Kurniawan	02/08/2023 08:39:14 WIB
14 MAS AGUS IWAN SAPUTRA	02/08/2023 08:39:19 WIB
15 Andrew Karst Steven	02/08/2023 08:39:22 WIB
16 Eko Supriyanto B Putro	02/08/2023 08:39:27 WIB
17 Rul Rudolfa Mantik	02/08/2023 08:39:28 WIB
18 JEPRI DWI PURWANTO	02/08/2023 08:39:32 WIB
19 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	02/08/2023 08:40:08 WIB
20 RINDAYU SITOMPUL	02/08/2023 08:40:13 WIB
21 RUDI ZULHAM HASIBUAN	02/08/2023 08:40:48 WIB
22 NURLAILA	02/08/2023 08:41:02 WIB
23 WELHELM DANIEL KURNALA	02/08/2023 08:41:07 WIB
24 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	02/08/2023 08:41:09 WIB
25 HASAN HANAFI	02/08/2023 08:41:11 WIB
26 SEPRIZAL HAMZAH	02/08/2023 08:41:30 WIB
27 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	02/08/2023 08:41:30 WIB
28 Rudy Meyvo Rumengan	02/08/2023 08:41:46 WIB
29 GERSON KOSSAY	02/08/2023 08:41:49 WIB
30 Yovensius Rosarindarta	02/08/2023

	08:42:04 WIB
31 SELVIANA	02/08/2023 08:42:07 WIB
32 SELVIANTI JOENONES	02/08/2023 08:42:14 WIB
33 M. Fajrin	02/08/2023 08:42:17 WIB
34 Inggrith S.R Luneto	02/08/2023 08:42:27 WIB
35 Parawangsah	02/08/2023 08:42:28 WIB
36 CHRISTIAN G. PIOH	02/08/2023 08:42:29 WIB
37 Salta Mulyadi	02/08/2023 08:42:33 WIB
38 MARIA ANGELIN	02/08/2023 08:42:35 WIB
39 YUNUS SUPARLIN	02/08/2023 08:42:40 WIB
40 MAHIRUDDIN	02/08/2023 08:42:41 WIB
41 SAID EFFENDI	02/08/2023 08:42:42 WIB
42 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	02/08/2023 08:42:47 WIB
43 FIRMANSYAH	02/08/2023 08:42:49 WIB
44 HASNI	02/08/2023 08:42:52 WIB
45 Muhammad Irwan	02/08/2023 08:42:56 WIB
46 Muhammad Irwan	02/08/2023 08:42:56 WIB
47 TANIT PRAYITNO	02/08/2023 08:42:56 WIB
48 SUITO ROBA	02/08/2023 08:42:56 WIB
49 YENI SANTI	

	02/08/2023 08:43:01 WIB
50 RIMHOT TURNIP	
	02/08/2023 08:43:04 WIB
51 ABDUL RAHMAN	
	02/08/2023 08:43:12 WIB
52 BAMBANG H. RUMNAN	
	02/08/2023 08:43:15 WIB
53 Abdu	
	02/08/2023 08:43:21 WIB
54 SERVATIUS LAWANG	
	02/08/2023 08:43:21 WIB
55 Agus Setiadi	
	02/08/2023 08:43:23 WIB
56 SYAHRUL	
	02/08/2023 08:43:26 WIB
57 PRISKA SIREGAR	
	02/08/2023 08:43:33 WIB
58 M. RUSYDANUL ANAM	
	02/08/2023 08:43:39 WIB
59 M. WAHYUDI	
	02/08/2023 08:43:40 WIB
60 ANDI SYAFRIZAL	
	02/08/2023 08:43:42 WIB
61 MOHAMMAD ZAM RONI	
	02/08/2023 08:43:47 WIB
62 BUDIANTA TARIGAN	
	02/08/2023 08:43:55 WIB
63 SYAIFUL ANWAR	
	02/08/2023 08:43:58 WIB
64 AGUS TUGIMAN	
	02/08/2023 08:44:07 WIB
65 RIYANTO	
	02/08/2023 08:44:07 WIB
66 DONY SETIO BUDI	
	02/08/2023 08:44:14 WIB
67 ADRI FADLY	
	02/08/2023 08:44:21 WIB

68 MIJOTO SOLEKAN	02/08/2023 08:44:21 WIB
69 OTOPIANUS P TEBAI	02/08/2023 08:44:22 WIB
70 SURAHMAD	02/08/2023 08:44:33 WIB
71 Engel Bertus Tekege	02/08/2023 08:44:43 WIB
72 ARMAN	02/08/2023 08:44:44 WIB
73 HAMDANI HB.	02/08/2023 08:44:49 WIB
74 NOVELIA INDRI RAMANDEY	02/08/2023 08:45:13 WIB
75 THOMAS BILI	02/08/2023 08:45:15 WIB
76 MUHAMMAD DEFRIZAL	02/08/2023 08:45:16 WIB
77 JUNAIDI	02/08/2023 08:45:18 WIB
78 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	02/08/2023 08:45:19 WIB
79 ASWAR	02/08/2023 08:45:26 WIB
80 KAMILUS LOGO	02/08/2023 08:45:57 WIB
81 SARI OCTALISA	02/08/2023 08:46:00 WIB
82 SRI YULI HARSINI	02/08/2023 08:46:06 WIB
83 IZWAR IDRIS	02/08/2023 08:46:26 WIB
84 SRI SUDARTI	02/08/2023 08:46:27 WIB
85 RAFLUS DORANGGI	02/08/2023 08:46:29 WIB
86 JUNIANA SIPAYUNG	02/08/2023

87 WIDI FARIS FAUZAN	08:46:30 WIB
	02/08/2023
	08:46:35 WIB
88 NOVIYARTI	
	02/08/2023
	08:46:45 WIB
89 David Surya	
	02/08/2023
	08:46:51 WIB
90 MUHAMMAD YASIN HAKIM	
	02/08/2023
	08:48:33 WIB
91 MASRUN YUNUS RIVAI	
	02/08/2023
	08:48:40 WIB
92 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	
	02/08/2023
	08:48:52 WIB
93 Maruli Tua Sinaga	
	02/08/2023
	08:48:55 WIB
94 THARIQA ZAHRA	
	02/08/2023
	08:49:14 WIB
95 REYNOLD BUKORSYOM	
	02/08/2023
	08:49:20 WIB
96 Mariani Anggreini	
	02/08/2023
	08:49:29 WIB
97 JON KENEDI	
	02/08/2023
	08:49:38 WIB
98 RADIUS SIMBOLON	
	02/08/2023
	08:50:04 WIB
99 DONI BONDAN WICAKSONO	
	02/08/2023
	08:50:24 WIB
100 ASEPNANDANG	
	02/08/2023
	08:51:12 WIB
101 ASEPNANDANG	
	02/08/2023
	08:51:12 WIB
102 ANDRI YANDANI	
	02/08/2023
	08:51:34 WIB
103 LARISMAN S. ISHAK	
	02/08/2023
	08:52:14 WIB
104 OKTO ESTOMIHI SARAGI	
	02/08/2023
	08:52:17 WIB
105 RONAL BIDAR	

	02/08/2023 08:52:17 WIB
106 MARINI	
	02/08/2023 08:52:34 WIB
107 AGUS WINARNO	
	02/08/2023 08:53:37 WIB
108 DONNA YULIETTA SIAGIAN	
	02/08/2023 08:53:41 WIB
109 RAMUDDIN SIBAGARIANG	
	02/08/2023 08:53:49 WIB
110 RAMUDDIN SIBAGARIANG	
	02/08/2023 08:53:49 WIB
111 DALILI	
	02/08/2023 08:56:54 WIB
112 ASKAR	
	02/08/2023 08:57:12 WIB
113 Ali Hamdan Bogra	
	02/08/2023 08:57:39 WIB
114 Rouli Dame Marbun	
	02/08/2023 08:59:29 WIB
115 MOH. IQBAL MUHIDDIN	
	02/08/2023 08:59:45 WIB
116 IRWAN FAHRIA	
	02/08/2023 08:59:53 WIB
117 YUDA ADITIA MA ATFA	
	02/08/2023 09:01:22 WIB
118 METTALIA YOLANDA	
	02/08/2023 09:03:37 WIB
119 KOMANG PURNAMA	
	02/08/2023 09:04:06 WIB
120 JERICHO MANDAHARI	
	02/08/2023 09:04:26 WIB
121 JERICHO MANDAHARI	
	02/08/2023 09:04:29 WIB
122 Semmy Hesron Ndolu	
	02/08/2023 09:04:45 WIB
123 YUSUF RAHMADHAN	
	02/08/2023 09:07:02 WIB

124 IRFAN NITI SASMITA	02/08/2023 09:09:45 WIB
125 MUH. ASRATILLAH SENGE	02/08/2023 09:09:56 WIB
126 ADNAN	02/08/2023 09:12:54 WIB
127 AHMAD ALIFKA RAHIM	02/08/2023 09:14:02 WIB
128 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	02/08/2023 09:23:06 WIB
129 Wahyu Wagiman	02/08/2023 09:24:13 WIB
130 ACHMAD BAIHAQI	02/08/2023 09:28:18 WIB
131 YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	02/08/2023 09:44:09 WIB
132 YEHESKIAL NATONIS	02/08/2023 10:19:28 WIB
133 Fauzi Nugraha	02/08/2023 10:21:24 WIB

## Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MOH. IQBAL MUHIDDIN	02/08/2023 10:02:59 WIB
2	Parawangsah	02/08/2023 10:03:52 WIB
3	Rudy Meyvo Rumengan	02/08/2023 10:04:33 WIB
4	FIRMANSYAH	02/08/2023 10:08:46 WIB
5	KAMILUS LOGO	02/08/2023 10:09:18 WIB
6	MOHAMMAD ZAM RONI	02/08/2023 10:09:29 WIB

7 YUNU HERDIANA	02/08/2023 10:09:45 WIB
8 DONNA YULIETTA SIAGIAN	02/08/2023 10:09:46 WIB
9 ASEP NANDANG	02/08/2023 10:10:14 WIB
10 ASEP NANDANG	02/08/2023 10:10:14 WIB
11 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	02/08/2023 10:10:20 WIB
12 HASNI	02/08/2023 10:10:27 WIB
13 Inggrith S.R Luneto	02/08/2023 10:10:27 WIB
14 NOVIYARTI	02/08/2023 10:11:00 WIB
15 JUNIANA SIPAYUNG	02/08/2023 10:11:29 WIB
16 RAFLUS DORANGGI	02/08/2023 10:11:44 WIB
17 AGUS TUGIMAN	02/08/2023 10:13:20 WIB
18 Marlyana Shanty	02/08/2023 10:13:47 WIB
19 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	02/08/2023 10:14:29 WIB
20 Salta Mulyadi	02/08/2023 10:14:32 WIB
21 NURLAILA	02/08/2023 10:15:25 WIB
22 RIMHOT TURNIP	02/08/2023 10:16:28 WIB
23 KOMANG PURNAMA	02/08/2023 10:16:31 WIB
24 HAMDANI HB.	02/08/2023 10:17:13 WIB
25 DONY SETIO BUDI	02/08/2023



	10:17:58 WIB
26 BAMBANG H. RUMNAN	02/08/2023 10:18:09 WIB
27 YENI SANTI	02/08/2023 10:18:16 WIB
28 Doni Bondan Wicaksono	02/08/2023 10:18:56 WIB
29 SUBAGYO SRI UTOMO	02/08/2023 10:18:56 WIB
30 MAHIRUDDIN	02/08/2023 10:19:24 WIB
31 YEHESKIAL NATONIS	02/08/2023 10:19:31 WIB
32 IZWAR IDRIS	02/08/2023 10:19:38 WIB
33 OTOPIANUS P TEBAI	02/08/2023 10:19:50 WIB
34 ANDI SYAFRIZAL	02/08/2023 10:20:05 WIB
35 ABDUL RAHMAN	02/08/2023 10:20:19 WIB
36 Doni Bondan Wicaksono	02/08/2023 10:20:47 WIB
37 JEPRI DWI PURWANTO	02/08/2023 10:21:15 WIB
38 SYAIFUL ANWAR	02/08/2023 10:21:25 WIB
39 Fauzi Nugraha	02/08/2023 10:21:28 WIB
40 RINDAYU SITOMPUL	02/08/2023 10:21:55 WIB
41 THOMAS BILI	02/08/2023 10:21:58 WIB
42 MUH. ASRATILLAH SENGE	02/08/2023 10:22:00 WIB
43 SUITO ROBA	02/08/2023 10:22:04 WIB
44 Agus Setiadi	

	02/08/2023 10:22:08 WIB
45 WIDI FARIS FAUZAN	02/08/2023 10:22:09 WIB
46 Andrew Karst Steven	02/08/2023 10:22:10 WIB
47 SLAMET RIADY SULAIMAN	02/08/2023 10:22:19 WIB
48 Bima Harits Kurniawan	02/08/2023 10:22:23 WIB
49 MARINI	02/08/2023 10:22:47 WIB
50 SURAHMAD	02/08/2023 10:23:24 WIB
51 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	02/08/2023 10:23:31 WIB
52 NOVELIA INDRI RAMANDEY	02/08/2023 10:23:48 WIB
53 Semmy Hesron Ndolu	02/08/2023 10:23:56 WIB
54 BENY SETIYONO	02/08/2023 10:24:07 WIB
55 Engel Bertus Tekege	02/08/2023 10:24:13 WIB
56 DALILI	02/08/2023 10:24:14 WIB
57 MUHAMMAD YASIN HAKIM	02/08/2023 10:24:18 WIB
58 M. Fajrin	02/08/2023 10:24:26 WIB
59 JIMY YANSEN	02/08/2023 10:24:38 WIB
60 IRFAN NITI SASMITA	02/08/2023 10:24:57 WIB
61 SERVATIUS LAWANG	02/08/2023 10:25:05 WIB
62 Muhammad Irwan	02/08/2023 10:25:18 WIB

63 Eko Supriyanto B Putro	02/08/2023 10:26:21 WIB
64 RAMUDDIN SIBAGARIANG	02/08/2023 10:27:06 WIB
65 SYAHRUL	02/08/2023 10:27:10 WIB
66 HERU BUDHI SUTRISNO	02/08/2023 10:27:26 WIB
67 Rouli Dame Marbun	02/08/2023 10:27:47 WIB
68 MASRUN YUNUS RIVALI	02/08/2023 10:27:52 WIB
69 Radius Simbolon	02/08/2023 10:28:14 WIB
70 ENDI BASRUL C.	02/08/2023 10:29:04 WIB
71 GERSON KOSSAY	02/08/2023 10:29:11 WIB
72 ARMAN	02/08/2023 10:29:12 WIB
73 SAID EFFENDI	02/08/2023 10:30:17 WIB
74 Bambang Anto Wibowo	02/08/2023 10:30:24 WIB
75 LARISMAN S. ISHAK	02/08/2023 10:30:36 WIB
76 RUDI ZULHAM HASIBUAN	02/08/2023 10:30:40 WIB
77 Ricky K. Margono	02/08/2023 10:31:24 WIB
78 AHMAD ALIFKA RAHIM	02/08/2023 10:31:34 WIB
79 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	02/08/2023 10:31:35 WIB
80 M. RUSYDANUL ANAM	02/08/2023 10:31:58 WIB
81 THARIQA ZAHRA	02/08/2023

	10:34:56 WIB
82 MUHAMMAD DEFRIZAL	02/08/2023 10:57:40 WIB
83 RONALDO RUMNGEVOER	02/08/2023 11:06:54 WIB
84 JERICHO MANDAHARI	02/08/2023 11:07:59 WIB
85 David Surya	02/08/2023 11:09:09 WIB
86 Maruli Tua Sinaga	02/08/2023 11:10:07 WIB
87 RICKY HARISMA HASANUDDIN	02/08/2023 11:16:11 WIB
88 Reza Ardiantori	02/08/2023 11:50:12 WIB
89 ACHMAD BAIHAQI	02/08/2023 12:02:52 WIB
90 HASAN HANAFI	02/08/2023 12:03:02 WIB
91 SARI OCTALISA	02/08/2023 12:08:48 WIB
92 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	02/08/2023 13:08:16 WIB
93 METTALIA YOLANDA	02/08/2023 13:16:03 WIB
94 SRI YULI HARSINI	02/08/2023 13:17:38 WIB
95 Okto Estomihi Saragi	02/08/2023 13:20:43 WIB
96 JUNAIDI	02/08/2023 13:33:52 WIB
97 BUDIANTA TARIGAN	02/08/2023 13:49:39 WIB
98 YUDA ADITIA MA ATFA	02/08/2023 14:07:39 WIB
99 ADRI FADLY	02/08/2023 14:16:33 WIB
100 NOVIE P MARANI	

	02/08/2023 14:19:00 WIB
101 RONAL BIDAR	02/08/2023 14:25:37 WIB
102 SILVANA SUSAN KUMEANG	02/08/2023 14:27:16 WIB
103 Wahyu Wagiman	02/08/2023 14:40:45 WIB
104 MIJOTO SOLEKAN	02/08/2023 15:24:03 WIB
105 AGUS WINARNO	02/08/2023 15:24:18 WIB
106 SRI SUDARTI	02/08/2023 15:24:27 WIB
107 Ali Hamdan Bogra	02/08/2023 15:26:34 WIB
108 RIYANTO	02/08/2023 15:26:44 WIB
109 ASWAR	02/08/2023 15:26:54 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam  
PHPU Tahun 2024**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	MIJOTO SOLEKAN	03/08/2023 08:00:16 WIB
2	Bambang Anto Wibowo	03/08/2023 08:00:36 WIB
3	SRI SUDARTI	03/08/2023 08:01:09 WIB
4	Abdu	03/08/2023 08:01:57 WIB
5	M. RUSYDANUL ANAM	03/08/2023 08:02:55 WIB
6	REYNOLD BUKORSYOM	03/08/2023 08:03:06 WIB
7	Maruli Tua Sinaga	03/08/2023

	08:03:55 WIB
8 ABDUL RAHMAN	03/08/2023 08:04:18 WIB
9 AGUS TUGIMAN	03/08/2023 08:05:01 WIB
10 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	03/08/2023 08:07:35 WIB
11 SURAHMAD	03/08/2023 08:07:45 WIB
12 YUNUS SUPARLIN	03/08/2023 08:08:03 WIB
13 MUHAMMAD NATSIR BUSRAH	03/08/2023 08:10:22 WIB
14 SUITO ROBA	03/08/2023 08:10:43 WIB
15 JEPRI DWI PURWANTO	03/08/2023 08:10:47 WIB
16 CHRISTIAN G. PIOH	03/08/2023 08:11:13 WIB
17 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	03/08/2023 08:11:18 WIB
18 YENI SANTI	03/08/2023 08:11:27 WIB
19 M. Fajrin	03/08/2023 08:11:29 WIB
20 Muhammad Irwan	03/08/2023 08:11:34 WIB
21 Inggrih S.R Luneto	03/08/2023 08:11:43 WIB
22 Salta Mulyadi	03/08/2023 08:12:02 WIB
23 YUNU HERDIANA	03/08/2023 08:12:06 WIB
24 BAMBANG H. RUMNAN	03/08/2023 08:12:10 WIB
25 NURLAILA	03/08/2023 08:12:19 WIB
26 SELVIANTI JOENoes	

	03/08/2023 08:12:23 WIB
27 ASEP NANDANG	03/08/2023 08:12:40 WIB
28 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	03/08/2023 08:12:41 WIB
29 ASEP NANDANG	03/08/2023 08:12:41 WIB
30 SLAMET RIADY SULAIMAN	03/08/2023 08:12:42 WIB
31 Radius Simbolon	03/08/2023 08:12:49 WIB
32 METTALIA YOLANDA	03/08/2023 08:12:53 WIB
33 TANIT PRAYITNO	03/08/2023 08:12:54 WIB
34 AGUS WINARNO	03/08/2023 08:13:05 WIB
35 PRISKA SIREGAR	03/08/2023 08:13:20 WIB
36 SUBAGYO SRI UTOMO	03/08/2023 08:13:29 WIB
37 RIMHOT TURNIP	03/08/2023 08:13:35 WIB
38 JUNIANA SIPAYUNG	03/08/2023 08:13:50 WIB
39 Ricky K. Margono	03/08/2023 08:14:01 WIB
40 Agus Setiadi	03/08/2023 08:14:03 WIB
41 Yovensius Rosarindarta	03/08/2023 08:14:04 WIB
42 HASNI	03/08/2023 08:14:11 WIB
43 HERU BUDHI SUTRISNO	03/08/2023 08:14:18 WIB
44 SEPTIYANA WIDIYASTUTI	03/08/2023 08:14:35 WIB

45 DONNA YULIETTA SIAGIAN	03/08/2023 08:14:36 WIB
46 SARI OCTALISA	03/08/2023 08:14:51 WIB
47 SRI YULI HARSINI	03/08/2023 08:14:58 WIB
48 MARIA ANGELIN	03/08/2023 08:14:58 WIB
49 SYAIFUL ANWAR	03/08/2023 08:15:01 WIB
50 ADRI FADLY	03/08/2023 08:15:15 WIB
51 RIYANTO	03/08/2023 08:15:42 WIB
52 FIRMANSYAH	03/08/2023 08:16:06 WIB
53 SYAHRUL	03/08/2023 08:16:15 WIB
54 JUNAIDI	03/08/2023 08:16:51 WIB
55 SELVIANA	03/08/2023 08:17:02 WIB
56 Eko Supriyanto B Putro	03/08/2023 08:17:13 WIB
57 OTOPIANUS P TEBAI	03/08/2023 08:18:12 WIB
58 JERICHO MANDAHARI	03/08/2023 08:18:32 WIB
59 ANDRI YANDANI	03/08/2023 08:19:00 WIB
60 MARINI	03/08/2023 08:19:01 WIB
61 ANDRI YANDANI	03/08/2023 08:19:08 WIB
62 ENDI BASRUL C.	03/08/2023 08:19:18 WIB
63 KAMILUS LOGO	03/08/2023



	08:19:33 WIB
64 NOVELIA INDRI RAMANDEY	03/08/2023 08:19:38 WIB
65 SEPRIZAL HAMZAH	03/08/2023 08:19:43 WIB
66 RUDI ZULHAM HASIBUAN	03/08/2023 08:20:09 WIB
67 SYARIPUDDIN	03/08/2023 08:20:36 WIB
68 DALILI	03/08/2023 08:20:38 WIB
69 Rouli Dame Marbun	03/08/2023 08:20:43 WIB
70 SERVATIUS LAWANG	03/08/2023 08:21:21 WIB
71 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	03/08/2023 08:21:34 WIB
72 Rul Rudolfa Mantik	03/08/2023 08:21:47 WIB
73 IRWAN FAHRIA	03/08/2023 08:22:10 WIB
74 NOVIYARTI	03/08/2023 08:22:16 WIB
75 WIDI FARIS FAUZAN	03/08/2023 08:22:29 WIB
76 THOMAS BILI	03/08/2023 08:22:53 WIB
77 THOMAS BILI	03/08/2023 08:22:55 WIB
78 THOMAS BILI	03/08/2023 08:22:57 WIB
79 THOMAS BILI	03/08/2023 08:22:58 WIB
80 MOHAMMAD ZAM RONI	03/08/2023 08:22:59 WIB
81 GERSON KOSSAY	03/08/2023 08:23:11 WIB
82 BUDIANTA TARIGAN	

	03/08/2023 08:23:11 WIB
83 Ali Hamdan Bogra	03/08/2023 08:23:28 WIB
84 THARIQA ZAHRA	03/08/2023 08:23:32 WIB
85 ARMAN	03/08/2023 08:24:09 WIB
86 MUH. ASRATILLAH SENGE	03/08/2023 08:24:13 WIB
87 MUHAMMAD YASIN HAKIM	03/08/2023 08:24:14 WIB
88 YUDA ADITIA MA ATFA	03/08/2023 08:24:57 WIB
89 IZWAR IDRIS	03/08/2023 08:24:59 WIB
90 Engel Bertus Tekege	03/08/2023 08:25:35 WIB
91 RAMUDDIN SIBAGARIANG	03/08/2023 08:25:37 WIB
92 Bima Harits Kurniawan	03/08/2023 08:26:21 WIB
93 Doni Bondan Wicaksono	03/08/2023 08:27:30 WIB
94 SAID EFFENDI	03/08/2023 08:27:36 WIB
95 Andrew Karst Steven	03/08/2023 08:28:11 WIB
96 MUHAMMAD DEFRIZAL	03/08/2023 08:29:15 WIB
97 SILVANA SUSAN KUMEANG	03/08/2023 08:29:25 WIB
98 Doni Bondan Wicaksono	03/08/2023 08:30:50 WIB
99 DONY SETIO BUDI	03/08/2023 08:31:15 WIB
100 BENY SETIYONO	03/08/2023 08:33:01 WIB

101 LARISMAN S. ISHAK	03/08/2023 08:33:35 WIB
102 IRFAN NITI SASMITA	03/08/2023 08:34:16 WIB
103 Reza Ardiantori	03/08/2023 08:36:11 WIB
104 KOMANG PURNAMA	03/08/2023 08:36:25 WIB
105 Parawangsah	03/08/2023 08:37:12 WIB
106 MOH. IQBAL MUHIDDIN	03/08/2023 08:38:19 WIB
107 ACHMAD BAIHAQI	03/08/2023 08:43:09 WIB
108 Rudy Meyvo Rumengan	03/08/2023 08:45:36 WIB
109 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	03/08/2023 08:46:53 WIB
110 JIMY YANSEN	03/08/2023 08:47:11 WIB
111 RAFLUS DORANGGI	03/08/2023 08:47:16 WIB
112 RONAL BIDAR	03/08/2023 08:48:24 WIB
113 Semmy Hesron Ndolu	03/08/2023 08:49:00 WIB
114 Fauzi Nugraha	03/08/2023 08:51:11 WIB
115 RINDAYU SITOMPUL	03/08/2023 08:58:57 WIB
116 AHMAD ALIFKA RAHIM	03/08/2023 09:00:41 WIB
117 MASRUN YUNUS RIVAI	03/08/2023 09:00:45 WIB
118 HAMDANI HB.	03/08/2023 09:06:37 WIB
119 Wahyu Wagiman	03/08/2023

		09:06:55 WIB
120 ADNAN		03/08/2023
		09:16:01 WIB
121 ASWAR		03/08/2023
		09:17:05 WIB
122 JON KENEDI		03/08/2023
		09:17:34 WIB
123 Herry Yerry Pantouw		03/08/2023
		09:18:31 WIB
124 Mariani Anggreini		03/08/2023
		09:31:44 WIB
125 ANDI SYAFRIZAL		03/08/2023
		09:31:52 WIB
126 David Surya		03/08/2023
		09:33:25 WIB
127 RICKY HARISMA HASANUDDIN		03/08/2023
		09:34:40 WIB
128 YEHESKIAL NATONIS		03/08/2023
		09:55:03 WIB
129 ASKAR		03/08/2023
		09:56:03 WIB
130 Okto Estomihi Saragi		03/08/2023
		10:07:07 WIB
131 Marlyana Shanty		03/08/2023
		10:07:58 WIB
132 HASAN HANAFI		03/08/2023
		10:11:34 WIB
133 MAS AGUS IWAN SAPUTRA		03/08/2023
		10:24:15 WIB

### Penutupan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	THOMAS BILI	03/08/2023
		10:30:14 WIB
2	THOMAS BILI	03/08/2023
		10:30:15 WIB

3 JEPRI DWI PURWANTO	03/08/2023 10:30:45 WIB
4 REYNOLD BUKORSYOM	03/08/2023 10:30:47 WIB
5 Muhammad Irwan	03/08/2023 10:30:49 WIB
6 SELVIANA	03/08/2023 10:31:01 WIB
7 Reza Ardiantori	03/08/2023 10:31:16 WIB
8 JERICHO MANDAHARI	03/08/2023 10:31:21 WIB
9 Rul Rudolfa Mantik	03/08/2023 10:31:28 WIB
10 ENDI BASRUL C.	03/08/2023 10:31:33 WIB
11 Rudy Meyvo Rumengan	03/08/2023 10:31:49 WIB
12 SELVIANTI JOENOS	03/08/2023 10:31:53 WIB
13 SUBAGYO SRI UTOMO	03/08/2023 10:32:04 WIB
14 Agus Setiadi	03/08/2023 10:32:12 WIB
15 MOHAMAD IQBAL ALHADAR	03/08/2023 10:32:52 WIB
16 YENI SANTI	03/08/2023 10:33:03 WIB
17 Parawangsah	03/08/2023 10:33:26 WIB
18 SYAHRUL	03/08/2023 10:33:35 WIB
19 GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH	03/08/2023 10:33:45 WIB
20 Andrew Karst Steven	03/08/2023 10:33:46 WIB
21 MAHIRUDDIN	03/08/2023

	10:33:58 WIB
22 KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL	03/08/2023 10:34:51 WIB
23 Fauzi Nugraha	03/08/2023 10:34:53 WIB
24 ADRI FADLY	03/08/2023 10:34:57 WIB
25 DONY SETIO BUDI	03/08/2023 10:35:01 WIB
26 M. WAHYUDI	03/08/2023 10:35:05 WIB
27 Maruli Tua Sinaga	03/08/2023 10:35:07 WIB
28 ABDUL RAHMAN	03/08/2023 10:35:22 WIB
29 SAID EFFENDI	03/08/2023 10:35:46 WIB
30 RUDI ZULHAM HASIBUAN	03/08/2023 10:35:50 WIB
31 RADIUS SIMBOLON	03/08/2023 10:36:01 WIB
32 JON KENEDI	03/08/2023 10:36:15 WIB
33 WIDI FARIS FAUZAN	03/08/2023 10:36:24 WIB
34 THARIQA ZAHRA	03/08/2023 10:36:27 WIB
35 MOH. IQBAL MUHIDDIN	03/08/2023 10:36:44 WIB
36 JUNIANA SIPAYUNG	03/08/2023 10:36:47 WIB
37 BAMBANG H. RUMNAN	03/08/2023 10:36:56 WIB
38 MUHAMMAD YUSRI ASHARI	03/08/2023 10:37:20 WIB
39 MUH. ASRATILLAH SENGE	03/08/2023 10:37:31 WIB
40 Bima Harits Kurniawan	

	03/08/2023 10:38:02 WIB
41 Ricky K. Margono	03/08/2023 10:38:08 WIB
42 Marlyana Shanty	03/08/2023 10:38:16 WIB
43 SYAIFUL ANWAR	03/08/2023 10:39:00 WIB
44 IZWAR IDRIS	03/08/2023 10:39:35 WIB
45 LARISMAN S. ISHAK	03/08/2023 10:39:50 WIB
46 NOVELIA INDRY RAMANDEY	03/08/2023 10:40:11 WIB
47 BUDIANTA TARIGAN	03/08/2023 10:40:14 WIB
48 ROBBY BERNADUS GASPERSZ	03/08/2023 10:40:31 WIB
49 JIMY YANSEN	03/08/2023 10:40:47 WIB
50 NOVIE P MARANI	03/08/2023 10:41:14 WIB
51 DALILI	03/08/2023 10:41:15 WIB
52 MUHAMMAD DEFRIZAL	03/08/2023 10:41:55 WIB
53 AGUS WINARNO	03/08/2023 10:42:28 WIB
54 MASRUN YUNUS RIVAI	03/08/2023 10:42:38 WIB
55 RICKY HARISMA HASANUDDIN	03/08/2023 10:42:39 WIB
56 ACHMAD BAIHAQI	03/08/2023 10:43:11 WIB
57 ANDI SYAFRIZAL	03/08/2023 10:43:13 WIB
58 RIMHOT TURNIP	03/08/2023 10:43:30 WIB

59 SURAHMAD	03/08/2023 10:43:44 WIB
60 IRFAN NITI SASMITA	03/08/2023 10:44:01 WIB
61 Semmy Hesron Ndolu	03/08/2023 10:44:21 WIB
62 MOHAMMAD ZAM RONI	03/08/2023 10:45:08 WIB
63 NOVIYARTI	03/08/2023 10:46:10 WIB
64 NOVIYARTI	03/08/2023 10:46:10 WIB
65 Ali Hamdan Bogra	03/08/2023 10:46:34 WIB
66 SARI OCTALISA	03/08/2023 10:47:28 WIB
67 SARI OCTALISA	03/08/2023 10:47:37 WIB
68 Rouli Dame Marbun	03/08/2023 10:47:58 WIB
69 SARI OCTALISA	03/08/2023 10:47:59 WIB
70 MARINI	03/08/2023 10:48:24 WIB
71 RINDAYU SITOMPUL	03/08/2023 10:49:12 WIB
72 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:49:31 WIB
73 SRI SUDARTI	03/08/2023 10:49:46 WIB
74 YUSUF RAHMADHAN	03/08/2023 10:49:57 WIB
75 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:50:01 WIB
76 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:50:19 WIB
77 MIJOTO SOLEKAN	03/08/2023



	10:50:21 WIB
78 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:51:09 WIB
79 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:51:34 WIB
80 PRISKA SIREGAR	03/08/2023 10:52:05 WIB
81 Bambang Anto Wibowo	03/08/2023 10:52:10 WIB
82 ANDRI YANDANI	03/08/2023 10:52:42 WIB
83 HASNI	03/08/2023 10:53:47 WIB
84 FIRMANSYAH	03/08/2023 10:54:13 WIB
85 ASWAR	03/08/2023 10:54:52 WIB
86 RIYANTO	03/08/2023 10:54:55 WIB
87 YUDA ADITIA MA ATFA	03/08/2023 10:56:58 WIB
88 Doni Bondan Wicaksono	03/08/2023 11:00:33 WIB
89 Engel Bertus Tekege	03/08/2023 11:01:33 WIB
90 WELHELM DANIEL KURNALA	03/08/2023 11:01:48 WIB
91 RAMUDDIN SIBAGARIANG	03/08/2023 11:04:53 WIB
92 RAMUDDIN SIBAGARIANG	03/08/2023 11:04:53 WIB
93 RAMUDDIN SIBAGARIANG	03/08/2023 11:04:53 WIB
94 OTOPIANUS P TEBAI	03/08/2023 11:08:30 WIB
95 ARMAN	03/08/2023 11:10:54 WIB
96 GERSON KOSSAY	

	03/08/2023 11:13:07 WIB
97 BENY SETIYONO	03/08/2023 11:41:10 WIB
98 BENY SETIYONO	03/08/2023 11:41:23 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT  
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN  
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



*Username :*  
**Pusdiklat\_MKRI**

*password :* **pusdikmk**

*Username :*  
**GK3\_PUSDIKLAT**

*password :* **pusdikmkri**

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



**Tugas Praktik dikirim ke e-mail:**

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Perseorangan**

**Nama File Ms. Word:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Partai Politik**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00  
WIB Hari Rabu,  
2 Agustus 2023**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(dibuat asli oleh  
Masing-Masing  
Peserta) serta sesuai  
dengan Soal yang  
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke  
Petitum**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERINDO**

**KELAS 1**

Narasumber

: Yunita Rhamadani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	SEPTIYANA WIDIYASTUTI, S.E., S.H.	DPP - BARA PERINDO	85	86	88	86.2
2	4	ASEP NANDANG, Amd.Par.,S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta	82	80	80	80.4
3	5	ADRI FADLY, S.H.	DPW Sumatera Selatan	85	82	80	82.2
4	6	NURLAILA, A.Md.Par.	DPW Riau	78	78	80	78.4
5	8	ASKAR, SKM.	DPW Sulawesi Selatan	78	78	78	78
6	10	Hj. HASNI, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	70	75	70	73
7	12	DEDDY ARPANDY, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Barat	80	80	80	80
8	13	SELVIANTI JOENOS, S.H., M.H.	DPW Bali	78	78	80	78.4
9	14	Eko Supriyanto B Putro	DPW Jawa Tengah				0
10	17	JUNIANA SIPAYUNG, S.H., M.H.	DPP - BAJA PERINDO	80	80	80	80
11	19	YENI SANTI, S.KM., M.Pd.	DPP - KARTINI PERINDO	78	80	78	79.2
12	22	DONNA YULIETTA SIAGIAN, S.E., M.AP.	DPW Sumatera Utara	78	78	80	78.4
13	23	DONY SETIO BUDI, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	80	80	80	80
14	24	METTALIA YOLANDA, S.H.	DPW Sumatera Barat	78	78	75	77.4
15	25	Inggrith S.R Luneto, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	80	80	85	81
16	26	KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL, S.H.	DPP - PEMUDA PERINDO	80	80	82	80.4
17	31	CHRISTIAN G. PIOH, S.H., C.L.A.	DPW Papua	80	80	85	81
18	33	Doni Bondan Wicaksono, S.E.	DPW DI Yogyakarta	80	80	80	80
19	35	MOHAMAD IQBAL ALHADAR	DPW Gorontalo	78	80	78	79.2
20	39	SARI OCTALISA, S.pd	DPW Bangka Belitung	80	78	78	78.4
21	40	MAS AGUS IWAN SAPUTRA, S.H.	DPW Lampung	85	85	85	85
22	42	SYAIFUL ANWAR, S.H., M.H., C.Me.	DPW Bengkulu	82	85	80	83.4
23	51	PRISKA SIREGAR, S.H., M.H.	DPP - BASPERINDO	82	85	85	84.4
24	54	FIRMANSYAH	DPW Papua Selatan	80	80	80	80
25	55	Wahyu Wagiman, S.H., M.H.	DPP	85	88	90	87.8
26	59	YUNUS SUPARLIN, S.H.	DPW Sulawesi Barat	85	85	85	85
27	62	REYNOLD BUKORSYOM, S.H., M.Si.	DPW Papua Pegunungan	72	75	70	73.4
28	68	YUDA ADITIA MA ATFA, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	80	85	82	83.4
29	74	Dr. SUBAGYO SRI UTOMO, S.H., M.H., CL.I., CPrM., CLMA., CSSIT.	DPW Jawa Barat	78	78	78	78
30	83	MOH. IQBAL MUHIDDIN, S.H.	DPW Papua Barat Daya	85	85	85	85
31	84	Semmy Hesron Ndolu, S.E.	DPW Nusa Tenggara Timur	78	78	80	78.4
32	96	Herry Yerry Pantouw, S.Pd.	DPW Sulawesi Utara	78	75	78	76.2
33	98	AHMAD ALIFKA RAHIM	DPW Sulawesi Tenggara	80	80	82	80.4
34	108	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.	DPW Jawa Timur	78	78	80	78.4
35	120	dr. SORTAMAN SARAGIH, MARS.	DPP				0
36	130	Fauzi Nugraha, S.H.	DPP - LBH PERINDO	80	85	80	83





**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERINDO**

**KELAS 2**

Narasumber

: A.A. Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	2	THARIQA ZAHRA, S.H.	DPP - BARA PERINDO	90	87	90	88.2
2	7	MAHIRUDDIN, S.H., M.Si.	DPW Sumatera Selatan	88	83	84	84.2
3	9	MUHAMMAD DEFRIZAL	DPW Riau	85	80	85	82
4	15	SELVIANA, A.Md.	DPW Kalimantan Barat	86	81	85	82.8
5	16	Dr. (C) Bambang Anto Wibowo, S.H., M.H.	DPW Jawa Tengah				
6	27	SRI YULI HARSINI, S.H.	DPW Sumatera Barat	83	81	82	81.6
7	29	Parawangsah, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	85	84	85	84.4
8	30	Ir. RUDI ZULHAM HASIBUAN	DPW Sumatera Utara	80	80	80	80
9	36	HERU BUDHI SUTRISNO, S.H., M.H.	DPP - BAJA PERINDO	86	83	85	84
10	43	ANDRI YANDANI, S.H., M.H.	DPW Bangka Belitung	85	82	85	83.2
11	48	LARISMAN S. ISHAK	DPW Gorontalo	80	80	80	80
12	49	TANIT PRAYITNO, S.H., C.CL.	DPW Kalimantan Tengah	86	84	85	84.6
13	53	SEPRIZAL HAMZAH, S.IP.	DPW Lampung	88	84	85	85
14	56	RAMUDDIN SIBAGARIANG, S.H., M.H.	DPP - BASPERINDO	85	80	84	81.8
15	58	RIYANTO	DPW Papua Selatan	82	80	80	80.4
16	61	Kompol (Purn.) Abdu	DPW Bengkulu	80	80	80	80
17	67	ARMAN, S.Kom.	DPW Kalimantan Utara	88	85	85	85.6
18	70	ROBBY BERNADUS GASPERSZ, S.H.	DPW Maluku	80	80	80	80
19	80	Engel Bertus Tekege	DPW Papua Tengah	80	80	80	80
20	93	JUNAIDI, S.H.	DPW Maluku Utara	80	80	80	80
21	95	ANDI SYAFRIZAL, S.K.H.	DPW Aceh	86	83	85	84
22	97	ENDI BASRUL C., SH	DPW Banten	80	80	80	80
23	103	Okto Estomihi Saragi, S.H., M.H.	DPW Kepulauan Riau	90	80	86	83.2
24	106	RONAL BIDAR, S.Si.	DPW Sulawesi Tenggara	87	83	85	84.2
25	109	Rouli Dame Marbun, S.H.	DPW Jawa Timur	88	85	85	85.6
26	113	M. RUSYDANUL ANAM, S.H., M.Kn.	DPW Jambi				0
27	116	SURAHMAD	DPP - Panitia	88	80	81	81.8
28	117	NAUFAL AFIF ALROZI, S.E.	DPP - Panitia				0
29	121	Muhammad Irwan, S.H.	DPP	88	85	86	85.8
30	122	SILVANA SUSAN KUMEANG	DPP - RPA PERINDO	90	85	86	86.2
31	125	RONALDO RUMNGEVOER	DPW Papua Barat				0
32	131	Andrew Karts Steven, S.H.	DPP - LBH PERINDO	87	85	85	85.4
33	132	Mariani Anggreini, S.H.	DPP - LBH PERINDO	86	82	85	83.4
34	133	Maruli Tua Sinaga, S.H.	DPP - LBH PERINDO	88	80	85	82.6
35	134	David Surya, Anziif (SNR ASSOC) CIP., S.H. M.H.	DPP - LBH PERINDO	90	87	90	88.2
36	137	Herna Sutana	DPP				0



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERINDO**

**KELAS 3**

Narasumber : Anna Triningsih

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	MARIA ANGELIN, S.H.	DPP - BARA PERINDO	80	75	75	76
2	11	JON KENEDI, S.H.	DPW Sumatera Selatan				0
3	18	BENY SETIYONO, S.H.	DPW Jawa Tengah				0
4	20	AKBP (Purn.) M. WAHYUDI, S.H., M.H., M.Sos.	DPW Kalimantan Barat	70		70	28
5	21	BAMBANG H. RUMNAN, S.H, M.H.	DPW Riau	75	70	75	72
6	28	IRFAN NITI SASMITA, S.S., M.IKOM	DPP - PEMUDA PERINDO	75	80	70	77
7	32	M. Fajrin, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	70	75	70	73
8	34	IRWAN FAHRIA, S.H.	DPW Sumatera Barat				0
9	37	BUDIANTA TARIGAN, S.E.	DPW Sumatera Utara	70	70	70	70
10	38	YUSUF RAHMADHAN, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	70	75	70	73
11	41	JERICO MANDAHARI, S.H., CBLC.	DPP - BAJA PERINDO	70	70	75	71
12	44	AGUS WINARNO	DPP - BAJA PERINDO	75	75	75	75
13	45	MOHAMMAD ZAM RONI, S.Si.	DPW Papua	80	80	75	79
14	47	ACHMAD BAIHAQI, S.H.	DPW DKI Jakarta	75	80	70	77
15	50	MASRUN YUNUS RIVAI, S.Ag.	DPW Gorontalo	70	70	70	70
16	57	Brigjen (Purn) Yovensius Rosarindarta	DPW DI Yogyakarta	80	75	75	76
17	60	ASWAR	DPW Papua Selatan	70	75	70	73
18	65	KAMILUS LOGO, S.IP.	DPW Papua Pegunungan	70	70	70	70
19	66	SYAHRUL, S.IP.	DPW Sulawesi Barat	70	70	70	70
20	69	Reza Ardiantori, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	70	70	70	70
21	73	Marlyana Shanty, S.E.	DPP - KARTINI PERINDO	75	70	75	72
22	76	KOMANG PURNAMA	DPW Bali				0
23	79	HASAN HANAFI, S.E.	DPW Jawa Barat	80	80	80	80
24	85	Eligius Tebai	DPW Papua Tengah	75	70	75	72
25	87	MUHAMMAD NATSIR BUSRAH, S.H.I.	DPW Sulawesi Selatan	75	80	75	78
26	91	YEHESKIAL NATONIS, S.H., M.Hum.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
27	100	HAMDANI HB., S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	70	70	70	70
28	101	Rul Rudolfia Mantik, S.Th.	DPW Sulawesi Utara	75	80	80	79
29	110	MIJOTO SOLEKAN, S.E., S.H., M.H., M.M.	DPW Jawa Timur	75	75	75	75
30	111	ADNAN, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
31	114	SAID EFFENDI, S.H.	DPW Jambi	70	70	70	70
32	123	BOETJE THOMAS SIMAELA	DPP - RPA PERINDO	75	70	75	72
33	126	MUHAMMAD YUSRI ASHARI	DPW Papua Barat	80	75	80	77
34	138	Desnadya Anjani Putri	DPP				0
35	140	JIMY YANSEN, S.H., M.H.	DPP	80	85	80	83
36	142	Letjen TNI(Purn) Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si.	DPW Papua Barat Daya				0



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERINDO**

**KELAS 4**

**Narasumber** : Syamsudin Noer

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	46	dr. RAFLUS DORANGGI, M.H.	DPW Papua	80	90	80	86
2	52	RIMHOT TURNIP, S.HUT.	DPW DKI Jakarta				0
3	63	Radius Simbolon, S.E., M.B.A.	DPW DI Yogyakarta	80	80	80	80
4	64	AKBP (Purn.) Salta Mulyadi	DPW Bengkulu	80	80	80	80
5	71	WELHELM DANIEL KURNALA, S.H., M.Si.	DPW Maluku	80	90	80	86
6	72	GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH, S.H.	DPW Lampung	80	80	75	79
7	75	JEPRI DWI PURWANTO, S.H.	DPP - BARA PERINDO	80	80	80	80
8	77	GERSON KOSSAY, S.IP.	DPW Papua Pegunungan	80	90	85	87
9	78	YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, S.H., M.H.	DPP - RESCUE PERINDO	80	80	80	80
10	81	YUNU HERDIANA	DPW Jawa Barat	80	80	80	80
11	82	SYARIPUDDIN	DPW Kalimantan Utara	80	80	75	79
12	86	Emanuel Tebai	DPW Papua Tengah	80	80	80	80
13	88	MUH. ASRATILLAH SENGE, S.T., M.T.	DPW Sulawesi Selatan	80	80	85	81
14	89	MARINI, A.Md.	DPW Bangka Belitung	80	85	80	83
15	90	MUHAMMAD YASIN HAKIM	DPW Sulawesi Barat	80	80	85	81
16	92	SERVATIUS LAWANG, S.H., M.M.	DPW Nusa Tenggara Timur	80	80	75	79
17	94	SUITO ROBA, S.H.	DPW Maluku Utara	80	80	80	80
18	99	H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M.	DPW Banten	80	90	85	87
19	102	SLAMET RIADY SULAIMAN, S.H.	DPW Kalimantan Timur	80	80	75	79
20	104	Rudy Meyvo Rumengan, S.E.	DPW Sulawesi Utara	80	90	80	86
21	105	WIDI FARIS FAUZAN, S.H.	DPP - BASPERINDO	80	90	85	87
22	107	NOVIYARTI, S.E.	DPW Kepulauan Riau	80	90	85	87
23	112	IZWAR IDRIS, S.H.	DPW Aceh	80	80	80	80
24	115	ABDUL RAHMAN, S.H.	DPW Jambi				0
25	118	RICKY HARISMA HASANUDDIN	DPP - Panitia				0
26	119	ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	DPP - Panitia	80	80	75	79
27	124	HERLY ALBERT F. LOTULUNG	DPP - RPA PERINDO	80	80	80	80
28	127	NOVIE P MARANI	DPW Papua Barat				0
29	128	Ir. THOMAS BILI, Amd	DPW Bali	80	80	80	80
30	129	DALILI, S.H., M.H.	DPP - BAJA PERINDO	80	90	85	87
31	135	Ricky K. Margono, S.H., M.H., CMLC.	DPP - LBH PERINDO	80	90	80	86
32	136	Agus Setiadi, S.H., S.Ag.	DPP - LBH PERINDO	80	80	85	81
33	139	Bima Harits Kurniawan, S.H.	DPP - LBH PERINDO	80	80	80	80
34	141	RINDAYU SITOMPUL, S.H.	DPP - BARA PERINDO	80	90	80	86
35	143	HELEN MEITY ESTERLINE KAMER, S.E.	DPW Papua Barat Daya	80	80	80	80
36	144	TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.	DPP				0

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO

NAMA NARASUMBER : Yunita Rhamadani

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari segi teknis penulisan dan kerapihan, kelas 1 hampir semua rapih. Tidak
	Hanya mengcopy dari template. Tapi juga membuat permohonan menjadi menarik
	Dengan demikian peserta bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas
2	Meskipun masih ada yang salah pada bagian kedudukan hukum, saat menyebut
	Aturan KPU yang menjadi dasar Pemohon memiliki kedudukan hukum
	Namun banyak juga yang sudah benar, tidak menggunakan SK KPU 234
3	Pada bagian substansi posita sudah ada beberapa peserta yang berusaha
	Membangun argumentasi dalam menjelaskan dalil-dalil permohonannya
	Mungkin peserta yang memiliki pengalaman atau berlatarbelakang advokat
	Tapi argumentasi yang dituangkan cukup bagus
4	
5	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO

NAMA NARASUMBER : A.A. Dian Onita

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Tanggal permohonan dan tanggal waktu pada bagian tenggang waktu harus sinkron
	Tanggal surat kuasa dan tanggal permohonan harus diperhatikan agar sesuai ketentuan
	Kuasa hukum tidak perlu banyak yang penting semua tanda tangan surat kuasa dan permohonan
	Gunakan template seperlunya dan hapus bagian yang tidak perlu seperti table, partai lokal, dll
2	Permohonan perorangan ada nomor SK Penetapan nomor urut calon dan SK nomor urut partai yang nomornya pasti berbeda pada bagian kedudukan hukum
	Penulisan jam penting dicantumkan pada bagian tenggang waktu, jangan hanya mencantumkan tanggal saja
	Penyusunan alat bukti disesuaikan dengan vide bukti dalam permohonan, jangan asal mencantumkan vide bukti tetapi tidak sesuai dengan daftar alat bukti
	Posita harus jelas penulisan angka, jelas tempat peristiwa, dan waktu kejadian
3	Pelajari formulir KPU mulai dari TPS hingga tempat penghitungan suara akhir.
	Semua nomor SK dicantumkan utuh dan sesuai hurufnya baik besar atau kecil
4	
5	

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO**

<b>Sesi I</b>	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. 2. YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, SH., MH
<b>Moderator</b>	Ardiansyah Salim

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan Peserta</b>
1.	Askar_Sulsel : masalah 3 x 24 Jam yang sangat singkat waktunya, hasil pemilu sudah ditetapkan tapi yg dilantik bukan dia yg dilantik dlm posisi kasus seperti ini peran apa peran yg dilakukan MK,?
2.	Raplus_Papua : terkait dg sengketa dari Kepulauan Yapen, yg pd saat itu kita tidak bisa mengajukan gugatan ke MK karena KPU menahan Berita Acara BB1 untuk setelah tenggat waktu di MK di tutup baru di kasih Berita Acara tersebut kepada Partai, Bagai mana solusinya jika terjadi lg di tahun 2024?
3.	Ricky Margono_Mahkamah Partai Perindo : Kaitannya 3 x 24 Jam walaupun kami jadi pemohon yang harus disetujui dan di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Apakah bisa disusul pada saat perbaikan?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO

<b>Sesi II</b>	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
<b>Narasumber</b>	Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH., MH.
<b>Moderator</b>	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Yunus Suparlin_Sulbar : Mengenai Kasus dan perkara kami adalah orang awam mohon penjelasan, proses untuk sampai perkara itu bagai mana? Ingin mendapat gambaran masalah PSU, apa kriteria bisa untuk dilakukan PSU?
2.	Lawang_Kupang : Tentang pemohon dan termohon, persoalannya yg tergugat adalah KPU persoalannya sebetulnya bukan di KPU melainkan di bawah KPU mulai dari TPS sampai PPK itu yg bermasalah tetapi yg di gugat KPU dan kapan KPU turun ke bawah untuk inpestigasi persoalan? Waktu yg di berikan 3 x 24jam sementara pekerjaan yg di kerjakan PPs dan PPK sangat lambat perlu evaluasi dari MK? Seberapa jauh evaluasi MK terhadap apa yg dikerjakan MK selama ini?
3.	Welem_Maluku :MK adalah bagian dari pd lembaga yg bisa memutuskan tentang Pemilu pertanyaannya Sampai sejauh manakah kewenangan MK terkait dg hasil yg dimiliki para kandidat baik dari sisi legislative baik pilkada, ketika kami yg sudah jelas menang di pemilu sudah diusulkan ke mendagri tapi tidak dikeluarkan SK Karena ada interpersi dari Partai ketika persoalan ini kami tidak dilantik dan tidak dikeluarkan SK dimanakah kewenangan MK kewenangan KPU untuk bisa memberi perlindungan kepada kami?
4.	Dr.Subagjo_Jabar : MK itu putusan Painal dan mengikat, Banyak penyelesaian perhitungan yg tidak di kawal banyak sg tersandung di KPU UU MK kalo kita Yudicial Reviu ke MK lg ini kan jeruk makan jeruk jadinya, bagai mana kita usul perlu revisi UU MK termasuk PMKnya?
5.	Robby_Maluku : Sampai sejauh mana MK selama ini mengawal seluruh keputusan PHPU, karna keputusan MK bisa di kalahkan sama Mahkamah Partai, mohon penjelasannya?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERINDO

<b>Sesi III</b>	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ricky Margono_ : Kembali ke masalah 3 x 24 jam, dimungkinkan engga diberikan kuasa Kepada ketua DPW untuk bisa tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen? Kita ajukan dulu permohonan tapi kita belum dapat tanda tangan Ketua Umum di berikan dlm masa perbaikan?
2.	Permohonan para pihak, bisa di ajukan oleh pemohon apa bisa di ajukan sendiri?
3.	Wahyudi_Kalbar : Apakah mungkin pemohon itu lebih dari satu orang atau terkait lebih dari satu orang?
4.	Ronald_Sultra : Mengenai C1 dan Plano, yg sah secara elektronik dari yg kita poto itu yg mana?







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta


## Bimbingan Teknis


### Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$ ), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



19



20



Moderator mengatur jalannya diskusi

Narasumber selesai memberikan materi

Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



22



23



Peserta mengikuti acara penutupan

Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan  
Pusdik akan dibersihkan dengan  
menggunakan disinfektan

**SURAT TUGAS**  
162/ST/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Indonesia sebagai berikut:

**A. PESERTA**

NO	NAMA	JABATAN	ASAL (DPP/DPW)
1	TAMA SATRYA LANGKUN, SH	Ketua Bidang Hukum dan HAM	DPP
2	ABD. KHALIQ AHMAD, S.PD.	Ketua Bidang Keagamaan	DPP
3	DR. SORTAMAN SARAGIH, MARS	Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat	DPP
4	SURIPTO	Ketua Bidang Pembinaan Ormas dan LSM	DPP
5	WAHYU WAGIMAN, S.H.,M.H	Staf-Bidang Hukum dan HAM	DPP
6	MUHAMAD IRWAN, S.H.	Staf-Bidang Hukum dan HAM	DPP
7	JIMY YANSEN	Staf-Bidang Hukum dan HAM	DPP
8	ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.	Ketua Umum	DPP - BARA PERINDO
9	RINDAYU SITOMPUL, SH	Wakil Sekretaris Jenderal I	DPP - BARA PERINDO
10	THARIQA ZAHRA, SH.	Wakil Sekretaris Jenderal IV	DPP - BARA PERINDO
11	JEPRI DWI PURWANTO, SH	Wakil Sekretaris Jenderal V	DPP - BARA PERINDO
12	SEPTIYANA WIDIYASTUTI, SE., SH.	Wakil Bendahara Umum	DPP - BARA PERINDO
13	MARIA ANGELIN, SH.	Internship BARA Partai PERINDO	DPP - BARA PERINDO
14	RICKY K. MARGONO, SH., MH., CMLC.	Ketua Umum	DPP - LBH PERINDO
15	DAVID SURYA, ANZIIF (SNR ASSOC) CIP., SH. MH.	Benahara Umum	DPP - LBH PERINDO
16	MARULI TUA SINAGA, SH.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
17	AGUS SETIADI, SH., S.AG.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
18	MARIANI ANGGREINI, SH.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
19	BIMA HARITS KURNIAWAN, SH.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
20	FAUZI NUGRAHA, SH.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
21	ANDREW KARTS STEVEN, SH.	Anggota LBH PERINDO	DPP - LBH PERINDO
22	AGUS WINARNO	Sekretaris Jenderal	DPP - BAJA PERINDO
23	JERICO MANDAHARI, SH. CBLC.	Ketua Divisi Hukum	DPP - BAJA PERINDO
24	HERU BUDHI SUTRISNO, SH. MH.	Wakil Ketua Divisi Hukum	DPP - BAJA PERINDO
25	DALILI, SH. MH.	Wakil Ketua Divisi Hukum	DPP - BAJA PERINDO
26	JUNIANA SIPAYUNG, SH. MH.	Wakil Ketua Divisi Hukum	DPP - BAJA PERINDO



27	YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, SH., MH	Sekretaris Jenderal	DPP - RESCUE PERINDO
28	PRISKA SIREGAR, SH, MH.	Wakil Ketua Umum	DPP - BASPERINDO
29	WIWIT WIDURI, SH, MH.	Wakil Ketua Umum	DPP - BASPERINDO
30	OLOAN BUTAR BUTAR, SH	KETUA DPW	DPP - BASPERINDO
31	WIDI FARIS FAUZAN, SH	Wakil Sekretaris Jenderal	DPP - BASPERINDO
32	RAMUDDIN SIBAGARIANG, SH,MH.	KETUA DPN	DPP - BASPERINDO
33	IRFAN NITI SASMITA	Anggota Bidang OKK	DPP - PEMUDA PERINDO
34	KHOSTER SAMUEL	Wasekjen	DPP - PEMUDA PERINDO
35	ALEX ADAM PUTRA	Ketua Bidang UMKM	DPP - PEMUDA PERINDO
36	KANURANTO BONANTA	Wasekjen	DPP - PEMUDA PERINDO
37	YENI SANTI, S.KM., M.PD.	Anggota	DPP - KARTINI PERINDO
38	MARLYANA SHANTY	Anggota	DPP - KARTINI PERINDO
39	HERLY ALBERT F. LOTULUNG	Sekretaris Umum RPA	DPP - RPA PERINDO
40	BOETJE THOMAS SIMAELA	Wakil Ketua Umum RPA	DPP - RPA PERINDO
41	SYLVANA SUSAN KUMEANG	Wakil Sekretaris Umum RPA	DPP - RPA PERINDO
42	ANDI SYAFRIZAL	Sekretaris DPW	DPW ACEH
43	AZHARI, SE	Wakil Ketua Bidang OK	DPW ACEH
44	IZWAR IDRIS, SH., MH	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW ACEH
45	IR. RUDI ZULHAM HASIBUAN	Ketua DPW	DPW SUMATERA UTARA
46	DONNA YULIETTA SIAGIAN, SE., M.AP	Sekretaris DPW	DPW SUMATERA UTARA
47	BUDIANTA TARIGAN	Wakil Ketua DPW	DPW SUMATERA UTARA
48	SRI YULI HARSINI, SH	Bendahara DPW	DPW SUMATERA BARAT
49	METTALLIA YOLANDA	Wakil Ketua DPW	DPW SUMATERA BARAT
50	IRWAN FAHRIA, SH	Wakil Ketua DPW	DPW SUMATERA BARAT
51	BAMBANG H.RUMNAN, SH, MH.	Sekretaris DPW	DPW RIAU
52	MUHAMMAD DEFRIZAL	Wakil Bendahara DPW	DPW RIAU
53	NURLAILA	Wakil Bendahara DPW	DPW RIAU
54	KOMPOL (PURN.) ABDU	Wakil Ketua	DPW BENGKULU
55	AKBP (PURN.) SALTA MULYADI	Wakil Ketua	DPW BENGKULU
56	SYAIFUL ANWAR, S.H., M.H., C.ME	Wakil Ketua	DPW BENGKULU
57	M. RUSYDANUL ANAM, SH., M.KN	Wakil Ketua DPW Bidang Hukum	DPW JAMBI
58	SAID EFFENDI, SH	Ketua LBH Perindo Jambi	DPW JAMBI
59	ABDUL RAHMAN, SH	Sekretaris LBH Perindo Jambi	DPW JAMBI
60	NOVIYARTI	Sekretaris DPW	DPW KEPULAUAN RIAU
61	ALIAS WELLO	Ketua Harian DPW	DPW KEPULAUAN RIAU
62	OKTO ESTOMIHI SARAGI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW KEPULAUAN RIAU
63	ADRY FADLY, S.H.	Wakil Ketua Bidang OK	DPW SUMATER SELATAN
64	MAIRUDDIN, SH., M.SI	Wakil Sekretaris	DPW SUMATER SELATAN
65	JON KENEDY, .SH	Wakil Bendahara	DPW SUMATER SELATAN

66	ANDRI YANDANI,S.H., M.H.	Wakil Ketua DPW	DPW KEP. BANGKA BELITUNG
67	MARINI	Sekretaris DPW	DPW KEP. BANGKA BELITUNG
68	SARI OCTALISA	Bendahara DPW	DPW KEP. BANGKA BELITUNG
69	GUNAWAN HAMID RAHMATULLAH, S.H	Wakil Sekretaris I	DPW LAMPUNG
70	SEPRIZAL HAMZAH, S.IP	Wakil Sekretaris III	DPW LAMPUNG
71	MAS AGUS IWAN SAPUTRA, S.H	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW LAMPUNG
72	AGUS TUGIMAN, SE., MM	Sekretaris DPW	DPW BANTEN
73	ENDI BASRUL C.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW BANTEN
74	IDA NOVIANANDA	Wakil Ketua Bidang OK	DPW BANTEN
75	H. RAMDAN ALAMSYAH, S.H., M.H	Sekretaris DPW	DPW DKI JAKARTA
76	RIMHOT TURNIP, S.HUT	Wakil Ketua DPW	DPW DKI JAKARTA
77	ASEP NANDANG, SH	Wakil Ketua DPW	DPW DKI JAKARTA
78	DR. SUBAGYO SRI UTOMO, SH., MH., CLI., CPRM., CLMA., CSST	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM	DPW JAWA BARAT
79	YUNU HERDIANA	Wakil Ketua Bidang Parekraf	DPW JAWA BARAT
80	HASAN HANAFAI, SE	Wakil Sekretaris II	DPW JAWA BARAT
81	BENY SETIYONO, SH	Wakil Ketua DPW	DPW JAWA TENGAH
82	DR. (C ) BAMBANG ANTO WIBOWO, SH., MH	Sekretaris DPW	DPW JAWA TENGAH
83	EKO SUPRIYANTO	Wakil Sekretaris DPW	DPW JAWA TENGAH
84	DONI BONDAN WICAKSONO., S.E.	Sekretaris DPW	DPW D.I. YOGYAKARTA
85	BRIGJEN(PURN) YOVENSIUS ROSARINDARTA	Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM	DPW D.I. YOGYAKARTA
86	RADIUS SIMBOLON., S.E., M.B.A.	Ketua DPD Kota Yogyakarta	DPW D.I. YOGYAKARTA
87	ROULI DAME MARBUN, S.H.	Dept. Pengembangan Lapangan Kerja	DPW JAWA TIMUR
88	MIJOTO SOLEKAN, SE., SH., MH., MM	DEPT. PEMBELAAN & ADVOKASI HUKUM	DPW JAWA TIMUR
89	SRI SUDARTI, SH., SE., MH., MM	Wakil Ketua Bid. Perburuhan dan Ketenagakerjaan	DPW JAWA TIMUR
90	KOMANG PURNAMA	Ketua DPW	DPW BALI
91	THOMAS BILI	Bendahara DPW	DPW BALI
92	SELVIANTI JOENONES, SH., MH	Wakil Sekretaris DPW	DPW BALI
93	REZA ARDIANTORI	Divisi Hukum DPW	DPW NUSA TENGGARA BARAT
94	YUDA ADITIA MAATFA,SH.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW NUSA TENGGARA BARAT
95	SERVAS LAWANG, S.H.,MM	Wakil Ketua DPW	DPW NUSA TENGGARA TIMUR
96	SEMMY HESRON NDOLU, SE	Wakil Ketua DPW	DPW NUSA TENGGARA TIMUR
97	YEHEKIAL NATONIS, SH., M.HUM	Wakil Ketua DPW	DPW NUSA TENGGARA TIMUR

98	DEDDY ARPANDI, SH., MH	Wakil Ketua DPW	DPW KALIMANTAN BARAT
99	SELVIANA, A.MD	Sekretaris DPW	DPW KALIMANTAN BARAT
100	AKBP (PURN.) M. WAHYUDI, SH., MH., M.SOS	Wakil Ketua Bid. Hukum	DPW KALIMANTAN BARAT
101	YUSUF RAMADHAN, SH.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW KALIMANTAN SELATAN
102	HJ. HASNI, SH.	Wakil Ketua Bidang PA	DPW KALIMANTAN SELATAN
103	TANIT PRAYITNO, SH., C.CL	Sekretaris DPW	DPW KALIMANTAN TENGAH
104	HAMDANI HB., SH., MH	Ketua DPW	DPW KALIMANTAN TIMUR
105	SLAMET RIYADI SULAIMAN, SH	Wakil Ketua DPW	DPW KALIMANTAN TIMUR
106	DONY SETIO BUDI, SH., MH	Ketua LBH Perindo Kaltim	DPW KALIMANTAN TIMUR
107	ARMAN, S.KOM	Sekretaris DPW	DPW KALIMANTAN UTARA
108	SYARIPUDDIN	Wakil Ketua DPD Bulungan	DPW KALIMANTAN UTARA
109	MUH. ASRATILLAH SENGE, ST., MT	Wakil Ketua Bidang OK	DPW SULAWESI SELATAN
110	MUHAMMAD NATSIR BUSRAH, SH.I	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW SULAWESI SELATAN
111	ASKAR, SKM	Wakil Ketua DPD Makassar	DPW SULAWESI SELATAN
112	MUHAMMAD YASIN HAKIM	Ketua DPW	DPW SULAWESI BARAT
113	SYAHRUL, S.IP	Sekretaris DPW	DPW SULAWESI BARAT
114	YUNUS SUPARLIN	Wakil Ketua Bid. Hukum	DPW SULAWESI BARAT
115	INGGRITH S.R LUNETO, S.H	Ketua Bid. Advokasi LBH Perindo	DPW SULAWESI TENGAH
116	M.FAJRIN, S.H	Sekretaris LBH Perindo	DPW SULAWESI TENGAH
117	PARAWANGSAH, SH	Anggota Bid. Advokasi LBH Perindo	DPW SULAWESI TENGAH
118	AHMAD ALIFKA RAHIM	Wakil Sekretaris DPW	DPW SULAWESI TENGGARA
119	ADNAN, SH., MH	Ketua DPD Buton Tengah	DPW SULAWESI TENGGARA
120	RONAL BIDAR, S.SI	Ketua DPD Konawe Utara	DPW SULAWESI TENGGARA
121	HERRY YERRY PANTOUW, S.PS	Sekretaris DPW	DPW SULAWESI UTARA
122	RUDY MEYVO RUMENGAN, SE	Wakil Ketua DPW	DPW SULAWESI UTARA
123	RUL RUDOLFA MANTIK, S.TH	Bendahara DPW	DPW SULAWESI UTARA
124	MASRUN YUNUS RIVAI	Ketua DPW	DPW GORONTALO
125	LARISMAN S. ISHAK	SEKRETARIS DPW	DPW GORONTALO
126	MOHAMMAD IQBAL ALHADAR	WAKIL SEKRETARIS DPW	DPW GORONTALO
127	ROBBY BERNADUS GASPERS, SH	Wakil Ketua DPW	DPW MALUKU
128	WELHELM DANIEL KURNALA, SH., M.Si	Wakil Ketua DPW	DPW MALUKU
129	AGUSTHINUS LOMO, SE	Wakil Ketua DPW	DPW MALUKU
130	RUSLI HAMID ARIFIN	Sekretaris DPW	DPW MALUKU UTARA
131	SUITO ROBA,SH	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW MALUKU UTARA
132	JUNAIDI, SH	Wakil Sekretaris	DPW MALUKU UTARA
133	dr. RAFLUS DORANGGI, MH	Ketua	DPW PAPUA
134	MOHAMMAD ZAM RONI, S.Si	Sekretaris	DPW PAPUA
135	CHRISTIAN G. PIOH, S.H., C.LA	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW PAPUA

136	KAMILUS LOGO, S.IP	Sekretaris DPW	DPW PAPUA PEGUNUNGAN
137	GERSON KOSSAY, S.IP	Wakil Sekretaris DPW	DPW PAPUA PEGUNUNGAN
138	REYNOLD BUKORSYOM, SH., M.Si	Wakil Ketua DPW	DPW PAPUA PEGUNUNGAN
139	FIRMANSYAH	Ketua DPW	DPW PAPUA SELATAN
140	RIYANTO	Sekretaris DPW	DPW PAPUA SELATAN
141	ASWAR	Sekretaris DPD Kab. Merauke	DPW PAPUA SELATAN
142	ALI HAMDAN BOGRA, S.IP., M.Si	Ketua DPW	DPW PAPUA BARAT DAYA
143	HELEN MEITY ESTERLINE KAMER, SE	Sekretaris	DPW PAPUA BARAT DAYA
144	MOH. IQBAL MUHIDDIN, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW PAPUA BARAT DAYA
145	NOVIE P MARANI	Sekretaris DPW	DPW PAPUA BARAT
146	RONALDO RUMNGEVOER	Wakil Ketua DPW	DPW PAPUA BARAT
147	MUHAMMAD YUSRI ASHARI	Staff DPW	DPW PAPUA BARAT
148	ELEGIUS TEBAI	Wakil Ketua DPW	DPW PAPUA TENGAH
149	ENGEL BERTUS TEKEGE	Wakil Sekretaris DPW	DPW PAPUA TENGAH
150	EMANUEL TEBAI	Caleg DPRD Kab. Nabire	DPW PAPUA TENGAH

#### B. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN	ASAL
1	SURAHMAD	STAFF SEKRETARIAT DPP	DPP
2	RICKY HARISMA HASANUDDIN	STAFF SEKRETARIAT DPP	DPP
3	NAUFAL AFIF ALROZI	STAFF SEKRETARIAT DPP	DPP
4	ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	STAFF SEKRETARIAT DPP	DPP

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis**  
**31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

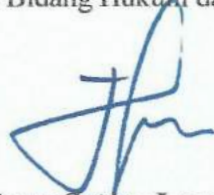
Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,**  
**Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor**

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)**

Ketua Bidang Hukum dan HAM,

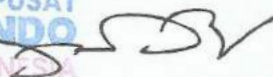
Sekretaris Jenderal,



**Tama Satria Langkun**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI PERINDO**  
**PERSATUAN INDONESIA**



**Ahmad Rofiq**

Data Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	SEPTIYANA WIDIYASTUTI, S.E.,	Perempuan	DPP - BARA PERINDO	JAWA TENGAH	S1
2	THARIQA ZAHRA, S.H.	Perempuan	DPP - BARA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
3	MARIA ANGELIN, S.H.	Perempuan	DPP - BARA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
4	ASEP NANDANG, Amd.Par.,S.H., M	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	JAWA BARAT	S2
5	ADRI FADLY, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATA	S1
6	NURLAILA, A.Md.Par.	Perempuan	DPW Riau	RIAU	DIII
7	MAHIRUDDIN, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATA	S2
8	ASKAR, SKM.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
9	MUHAMMAD DEFRIZAL	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	SMA
10	Hj. HASNI, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELA	S1
11	JON KENEDI, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATA	S1
12	DEDDY ARPANDY, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARA	S2
13	SELVIANTI JOENOS, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Bali	BALI	S2
14	Eko Supriyanto B Putro	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
15	SELVIANA, A.Md.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARA	DIII
16	Dr. (C) Bambang Anto Wibowo, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S3
17	JUNIANA SIPAYUNG, S.H., M.H.	Perempuan	DPP - BAJA PERINDO	JAWA BARAT	S2
18	BENY SETIYONO, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
19	YENI SANTI, S.KM., M.Pd.	Perempuan	DPP - KARTINI PERINDO	BANTEN	S2
20	AKBP (Purn.) M. WAHYUDI, S.H.,	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARA	S2
21	BAMBANG H. RUMNAN, S.H, M.H	Laki-laki	DPS Riau	RIAU	S2
22	DONNA YULIETTA SIAGIAN, S.E	Perempuan	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
23	DONY SETIO BUDI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMU	S2
24	METTALIA YOLANDA, S.H.	Perempuan	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
25	Inggrith S.R Luneto, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1

26	KHOSTER SAMUEL HUTAGAOL,	Laki-laki	DPP - PEMUDA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
27	SRI YULI HARSINI, S.H.	Perempuan	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
28	IRFAN NITI SASMITA, S.S., M.IK	Laki-laki	DPP - PEMUDA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S2
29	Parawangsa, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
30	Ir. RUDI ZULHAM HASIBUAN	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
31	CHRISTIAN G. PIOH, S.H., C.L.A.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
32	M. Fajrin, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
33	Doni Bondan Wicaksono, S.E.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
34	IRWAN FAHRIA, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
35	MOHAMAD IQBAL ALHADAR	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	SMA
36	HERU BUDHI SUTRISNO, S.H., M.	Laki-laki	DPP - BAJA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S2
37	BUDIANTA TARIGAN, S.E.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
38	YUSUF RAHMADHAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
39	SARI OCTALISA, S.pd	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
40	MAS AGUS IWAN SAPUTRA, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
41	JERICHO MANDAHARI, S.H., CBL	Laki-laki	DPP - BAJA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
42	SYAIFUL ANWAR, S.H., M.H., C.M	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S2
43	ANDRI YANDANI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
44	AGUS WINARNO	Laki-laki	DPP - BAJA PERINDO	JAWA BARAT	S1
45	MOHAMMAD ZAM RONI, S.Si.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
46	dr. RAFLUS DORANGGI, M.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
47	ACHMAD BAIHAQI, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
48	LARISMAN S. ISHAK	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
49	TANIT PRAYITNO, S.H., C.CL.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
50	MASRUN YUNUS RIVAI, S.Ag.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
51	PRISKA SIREGAR, S.H., M.H.	Perempuan	DPP - BASPERINDO	JAWA BARAT	S2
52	RIMHOT TURNIP, S.HUT.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
53	SEPRIZAL HAMZAH, S.IP.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
54	FIRMANSYAH	Laki-laki	DPW Partai PERINDO Pro	PAPUA SELATAN	S1
55	Wahyu Wagiman, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2

56	RAMUDDIN SIBAGARIANG, S.H.,	Laki-laki	DPP - BASPERINDO	JAWA BARAT	S2
57	Brigjen (Purn) Yovensius Rosarindart	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
58	RIYANTO	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	SMA
59	YUNUS SUPARLIN, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
60	ASWAR	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
61	Kompol (Purn.) Abdu	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	S1
62	REYNOLD BUKORSYOM, S.H., M	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGA	S2
63	Radius Simbolon, S.E., M.B.A.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
64	AKBP (Purn.) Salta Mulyadi	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	SMA
65	KAMILUS LOGO, S.IP.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGA	S1
66	SYAHRUL, S.IP.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
67	ARMAN, S.Kom.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTAR	S1
68	YUDA ADITIA MA ATFA, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA B	S2
69	Reza Ardiantori, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA B	S1
70	ROBBY BERNADUS GASPERSZ, S	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
71	WELHELM DANIEL KURNALA, S	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S2
72	GUNAWAN HAMID RAHMATULI	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
73	Marlyana Shanty, S.E.	Perempuan	DPP - KARTINI PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Dr. SUBAGYO SRI UTOMO, S.H., M	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S3
75	JEPRI DWI PURWANTO, S.H.	Laki-laki	DPP - BARA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
76	KOMANG PURNAMA	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
77	GERSON KOSSAY, S.IP.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGA	S1
78	YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA	Laki-laki	DPP - RESCUE PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S2
79	HASAN HANAFAI, S.E.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
80	Engel Bertus Tekege	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
81	YUNU HERDIANA	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	SMA
82	SYARIPUDDIN, A.Md.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTAR	S1
83	MOH. IQBAL MUHIDDIN, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
84	Semmy Hesron Ndolu, S.E.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timu	NUSA TENGGARA TI	S1
85	OTOPIANUS P TEBAI	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1



86	NOVELIA INDRI RAMANDEY	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
87	MUHAMMAD NATSIR BUSRAH, S	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
88	MUH. ASRATILLAH SENGE, S.T.,	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
89	MARINI, A.Md.	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	DIII
90	MUHAMMAD YASIN HAKIM	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	SMA
91	YEHESKIAL NATONIS, S.H., M.Hu	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timu	NUSA TENGGARA TI	S2
92	SERVATIUS LAWANG, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timu	NUSA TENGGARA TI	S2
93	JUNAIDI, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
94	SUITO ROBA, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
95	ANDI SYAFRIZAL, S.K.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
96	Herry Yerry Pantouw, S.Pd.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
97	ENDI BASRUL C., SH	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
98	AHMAD ALIFKA RAHIM	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGGA	SMA
99	H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
100	HAMDANI HB., S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMU	S2
101	Rul Rudolfa Mantik, S.Th.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
102	SLAMET RIADY SULAIMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMU	S1
103	Okto Estomihi Saragi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
104	Rudy Meyvo Rumengan, S.E.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
105	WIDI FARIS FAUZAN, S.H.	Laki-laki	DPP - BASPERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
106	RONAL BIDAR, S.Si.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGGA	S1
107	NOVIYARTI, S.E.	Perempuan	DPW KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
108	SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.N	Perempuan	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
109	Rouli Dame Marbun, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
110	MIJOTO SOLEKAN, S.E., S.H., M.H	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
111	ADNAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGGA	S2
112	IZWAR IDRIS, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
113	M. RUSYDANUL ANAM, S.H., M.K	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S2
114	SAID EFFENDI, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
115	ABDUL RAHMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1

116	SURAHMAD	Laki-laki	DPP - Panitia	D.K.I. JAKARTA	S1
117	NAUFAL AFIF ALROZI, S.E.	Laki-laki	DPP - Panitia	D.K.I. JAKARTA	S1
118	RICKY HARISMA HASANUDDIN	Laki-laki	DPP - Panitia	D.K.I. JAKARTA	S1
119	ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM	Laki-laki	DPP - Panitia	D.K.I. JAKARTA	-
120	dr. SORTAMAN SARAGIH, MARS.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
121	Muhammad Irwan, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
122	SILVANA SUSAN KUMEANG	Perempuan	DPP - RPA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
123	BOETJE THOMAS SIMAELA	Laki-laki	DPP - RPA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
124	HERLY ALBERT F. LOTULUNG	Laki-laki	DPP - RPA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
125	RONALDO RUMNGEVOER	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
126	MUHAMMAD YUSRI ASHARI	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
127	NOVIE P MARANI	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
128	Ir. THOMAS BILI, Amd	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
129	DALILI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP - BAJA PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S2
130	Fauzi Nugraha, S.H.	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	JAWA BARAT	S1
131	Andrew Karst Steven, S.H.	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	SUMATERA UTARA	S1
132	Mariani Anggreini, S.H.	Perempuan	DPP - LBH PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S1
133	Maruli Tua Sinaga, S.H.	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	SUMATERA UTARA	S1
134	David Surya, Anziif (SNR ASSOC) C	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	BANTEN	S2
135	Ricky K. Margono, S.H., M.H., CML	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	D.K.I. JAKARTA	S2
136	Agus Setiadi, S.H., S.Ag.	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	JAWA BARAT	S1
137	Herna Sutana	Perempuan		-	-
138	Desnadya Anjani Putri	Perempuan		-	-
139	Bima Harits Kurniawan, S.H.	Laki-laki	DPP - LBH PERINDO	BANTEN	S1
140	JIMY YANSEN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
141	RINDAYU SITOMPUL, S.H.	Laki-laki	DPP - BARA PERINDO	BANTEN	S1
142	Letjen TNI(Purn) Ali Hamdan Bogra,	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
143	HELEN MEITY ESTERLINE KAMH	Perempuan	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
144	TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
145	Emanuel Tebai	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1

146	Elegius Tebai	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1
-----	---------------	-----------	------------------	--------------	----